

**MODUL MATA KULIAH LOGIKA DASAR DAN KONSEP
PENDIDIKAN MORAL**



Disusun oleh:

PURWANI PUJI UTAMI, M.PD

1 MARET 2017

**JURUSAN PENDIDIKAN PANCASILA
DAN KEWARGANEGARAAN SEKOLAH TINGGI KEGURUAN
DAN ILMU PENDIDIKAN (STKIP) KUSUMA NEGARA
2017**

KATA PENGANTAR

Segala Puja-Puji Syukur dipanjatkan kehadirat ALLAH SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Modul Mata Kuliah Logika Dasar dan Konsep Pendidikan Moral. Dengan adanya modul ini, diharapkan mahasiswa dapat mengetahui berbagai pokok pembahasan tentang Pendidikan Moral. Semoga modul ini bermanfaat bagi penulis secara pribadi dan para pembacanya pada umumnya.

Penulis menyadari bahwa modul ini masih jauh dari sempurna, masih banyak kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu semua masukan, saran dan kritik yang konstruktif dari semua pihak sangat diharapkan untuk perbaikan dan penyempurnaan modul ini. Akhir kata, semoga modul ini dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan wawasan keilmuan dan memberi ide-ide baru untuk pembahasan lebih lanjut.

Jakarta, Maret 2017

Purwani Puji Utami, M.Pd

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI	3
MODUL I. PENGERTIAN MORAL.....	4
MODUL II. ASPEK - ASPEK KAWASAN MORAL	16
MODUL III. TEORI PERKEMBANGAN MORAL	24
MODUL IV. TEORI PERKEMBANGAN MORAL KOHLBERG.....	34
MODUL V. ALIRAN FILSAFAT MORAL TEORI TELEOLOGI.....	48
MODUL VI. ALIRAN FILSAFAT MORAL TEORI DEONTOLOGI	56
MODUL VII. PENDIDIKAN MORAL.....	72
MODUL VIII. AGAMA, NILAI DAN KEPERCAYAAN	91
MODUL IX. TEORI KEPRIBADIAN	102
MODUL X. WAWASAN NUSANTARA.....	107
MODUL XI. GEOPOLITIK.....	112
MODUL XII. GEOSTRATEGI.....	117

MODUL I

PENGERTIAN MORAL

1. Pengertian Moral

Salah satu tujuan penyelenggaraan pendidikan adalah untuk membentuk sikap, moral, dan watak murid yang berbudi luhur. Dahulu para murid diberikan pelajaran Budi Pekerti untuk mencapai tujuan tersebut. Namun sekarang pelajaran itu telah ditiadakan karena pelajaran tersebut mungkin tidak banyak merubah kepribadian murid menjadi kepribadian yang lebih baik dan bermoral.

Moral berasal dari kata *mores* yang berarti dalam kehidupan adat-istiadat atau kebiasaan. (Suseno, 1987: 18). Suseno mengatakan (1987:19) bahwa kata moral selalu mengacu pada baik buruknya manusia sebagai manusia. Norma-norma moral adalah tolak ukur untuk menentukan betul salahnya sikap dan tindakan manusia dilihat dari segi baik buruknya. Nilai moral bertolak pada sikap, kelakuan yang dapat dilihat melalui perbuatan. Perbuatan yang dapat terlihat terpuji dan baik secara lahiriyah akan dinilai memiliki nilai moral yang baik. Suseno (1987: 57) mengatakan bahwa penilaian dipengaruhi oleh pandangan hidup bangsa yang bersangkutan.

Menurut Dr. Al. Purwa Hadi wardoyo (1990:13) Moral menyangkut kebiasaan. Orang yang tidak baik juga disebut orang yang tidak bermoral, atau sekurang-kurangnya sebagai orang yang kurang moral. Maka secara sederhana kita mungkin dapat menyamakan moral dengan kebaikan orang atau kebaikan manusiawi. Purwa Hadi wardoyo 1990:13) mengemukakan bahwa moral sesungguhnya memuat dua segi yang berbeda, yakni segi batiniah dan segi lahiriyah. Orang yang baik adalah orang yang memiliki sikap batin yang baik dalam dan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik pula. Sikap batin ini juga sering kali disebut hati. Ukuran moral berkaitan dengan hati nurani dan norma. Hati nurani menyediakan ukuran subjek, norma pada ukuran objek, dengan kata lain; hati nurani memberitahukan kepada mana yang benar, norma diberikan untuk menunjukkan kepada semua orang mana yang benar itu. Jadi, hubungan hati nurani dan norma dapat dijelaskan sebagai berikut: norma diberitahukan

kepadaku, supaya kau memahami kebaikan dan hidup sesuai dengan kebaikan itu, tetapi hati nuraniku itulah yang akan mengatakan dengan lebih tegas kepadaku tentang kebaikan yang harus kukejar (Purwa Hadi wardoyo, 1990:15).

2. Pengertian Moral Menurut Para Ahli

- a. Pengertian moral dalam kamus psikologi (Chaplin, 2006): Dituliskan bahwa moral mengacu pada akhlak yang sesuai dengan peraturan sosial, atau menyangkut hukum atau adat kebiasaan yang mengatur tingkah laku.
- b. Pengertian moral dalam Hurlock (Edisi ke-6, 1990): mengatakan bahwa perilaku moral adalah perilaku yang sesuai dengan kode moral kelompok sosial. Moral sendiri berarti tata cara, kebiasaan, dan adat. Perilaku moral dikendalikan konsep konsep moral atau peraturan perilaku yang telah menjadi kebiasaan bagi anggota suatu budaya.
- c. Pengertian moral menurut Webster New word Dictionary (Wantah, 2005): bahwa moral adalah sesuatu yang berkaitan atau ada hubungannya dengan kemampuan menentukan benar salah dan baik buruknya tingkah laku.
- d. Dian Ibung: bahwa moral adalah nilai (value) yang berlaku dalam suatu lingkungan sosial dan mengatur tingkah laku seseorang.
- e. Maria Assumpta : pengertian moral adalah aturan aturan (rule) mengenai sikap (attitude) dan perilaku manusia (human behavior) sebagai manusia. Hal ini mirip bila dikatakan bahwa orang yang bermoral atau dikatakan memiliki moral adalah manusia yang memanusiaikan orang lain.
- f. Bapak Sonny Keraf : bahwa moral merupakan sebuah tolak ukur. Moral dapat digunakan untuk mengukur kadar baik dan buruknya sebuah tindakan manusia sebagai manusia, mungkin sebagai anggota masyarakat (member of society) atau sebagai manusia yang memiliki posisi tertentu atau pekerjaan tertentu.
- g. Zainuddin Saifullah Nainggolan : bahwa pengertian moral adalah suatu tendensi rohani untuk melakukan seperangkat standar dan norma yang mengatur perilaku seseorang dan masyarakat. Pengertian moral kali ini erat hubungannya dengan akhlak manusia ataupun fitrah manusia yang diciptakan

memang dengan kemampuan untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk.

- h. Imam Sukardi : bahwa pengertian moral adalah kebaikan-kebaikan yang disesuaikan dengan ukuran-ukuran tindakan yang diterima oleh masyarakat atau umum, meliputi kesatuan sosial maupun lingkungan tertentu. Disini, dapat anda perhatikan bahwa pengertian moral selalu dihubungkan dengan adat istiadat suatu masyarakat.
- i. Menurut Wantah (2005): Moral adalah sesuatu yang harus dilakukan atau tidak ada hubungannya dengan kemampuan untuk menentukan siapa yang benar dan perilaku yang baik dan buruk.
- j. Menurut W. J. S. Poerdarminta : Menyatakan bahwa ajaran moral dari perbuatan baik dan buruk dan perilaku.
- k. Menurut Dewey: Mengatakan bahwa masalah moral yang berkaitan dengan nilai-nilai moral.
- l. Menurut Baron dkk: Mengatakan bahwa moral yang terkait dengan pelanggaran dan mendiskusikan tindakan yang benar atau salah.
- m. Menurut Magnis-Susino : Mengatakan bahwa moral selalu mengacu pada baik orang miskin sebagai manusia, sehingga aspek moral kehidupan manusia dalam hal kebaikan sebagai manusia.

3. Nilai Moral Dalam Kehidupan

Religius

Sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain.

Jujur

Perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan.

Toleransi

Sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya.

Disiplin

Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan. Perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan belajar dan tugas, serta menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya.

Kerja Keras

Perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan belajar dan tugas, serta menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya.

Kreatif

Berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki.

Mandiri

Sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas.

Demokratis

Cara berfikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain.

Rasa Ingin Tahu

Sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajarinya, dilihat, dan didengar.

Semangat Kebangsaan

Cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya.

Cinta Tanah Air

Cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial budaya, ekonomi, dan politik bangsa.

Menghargai Prestasi

Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan mengakui, serta menghormati keberhasilan orang lain.

Bersahabat/komunikatif

Tindakan yang memperlihatkan rasa senang berbicara, bergaul, dan bekerja sama dengan orang lain.

Cinta Damai

Sikap, perkataan, dan tindakan yang menyebabkan orang lain merasa senang dan aman atas kehadiran dirinya.

Gemar membaca

Kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca berbagai bacaan yang memberikan kebajikan bagi dirinya.

Peduli lingkungan

Sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya, dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi.

Peduli sosial

Sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan.

Tanggung Jawab

Sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan, terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial dan budaya), negara dan Tuhan Yang Maha Esa

4. Fungsi Moral Bagi Kehidupan Manusia

Nilai moral dan hukum mempunyai keterkaitan yang sangat erat sekali. nilai dianggap penting oleh manusia itu harus jelas, harus semakin diyakini oleh individu dan harus diaplikasikan dalam perbuatan. moralitas diidentikan dengan perbuatan baik dan perbuatan buruk (etika) yang mana cara mengukurnya adalah melalui nilai-nilai yang terkandung dalam perbuatan tersebut. Pada dasarnya nilai, moral, dan hukum mempunyai fungsi yaitu untuk melayani manusia.

- a. pertama, berfungsi mengingatkan manusia untuk melakukan kebaikan demi diri sendiri dan sesama sebagai bagian dari masyarakat.
- b. kedua, menarik perhatian pada permasalahan-permasalahan moral yang kurang ditanggapi manusia.
- c. Ketiga, dapat menjadi penarik perhatian manusia kepada gejala –Pembiasaan emosional

Selain itu fungsi dari nilai, moral dan hukum yaitu dalam rangka untuk pengendalian dan pengaturan. Pentingnya sistem hukum ialah sebagai perlindungan bagi kepentingan-kepentingan yang telah dilindungi agama, kaidah kesusilaan dan kaidah kesopanan karena belum cukup kuat untuk melindungi dan menjamin mengingat terdapat kepentingan-kepentingan yang tidak teratur. Untuk melindungi lebih lanjut kepentingan yang telah dilindungi kaidah-kaidah tadi maka diperlukanlah sistem hukum. Hukum yang mengatur kehidupan masyarakat dan nyata berlaku dalam masyarakat, disebut hukum positif.

Istilah hukum positif dimaksudkan untuk menandai –diferensi (perbedaan) dan hukum terhadap kaidah-kaidah lain dalam masyarakat tampil lebih jelas tegas, dan didukung oleh perlengkapan yang cukup agar diikuti oleh anggota masyarakat sebagai atribut positif ini ialah: Bukanlah kaidah social yang mengambang atau tidak jelas bentuk dan tujuannya sehingga dibutuhkan lembaga khusus yang bertujuan merumuskan dengan jelas tujuan yang hendak dicapai oleh hukum.

Bahkan tatkala terjadi dilema di dalam hukum sendiri, yang dapat disebabkan karena adanya konflik, baik dari lembaga-lembaga hukum, sarana prasarana hukum bahkan rendahnya budaya hukum dalam masyarakat, maka setiap orang (masyarakat dan aparatur hukum) harus mengembalikannya pada rasa keadilan hukum masyarakat, artinya harus mengutamakan moralitas masyarakat

5. Bentuk Nilai Moral

Menurut Suseno (1987: 142-150) sikap dan tindakan yang berkaitan dengan nilai moral, yaitu sebagai berikut:

- Kejujuran

Kejujuran berhubungan dengan ketulusan hati dan kelurusan hati. Suseno (1987:142-143) mengemukakan bahwa bersikap terhadap orang lain, tetapi tanpa kejujuran adalah kemunafikan dan sering beracun. Bersikap jujur kepada orang lain berarti dua sikap yaitu bersikap terbuka dan bersifatfair. Bersikap terbuka adalah kita selalu muncul sebagai diri kita sendiri (kita berhak atas batin kita). Yang dimaksud terbuka bukan berarti pertanyaan orang lain berhak mengetahui perasaan dan pikiran kita, sehingga tidak pernah menyembunyikan dengan apa yang kita perlihatkan. Yang kedua bersifatfair (wajar), yaitu memperlakukan menurut standard-standar yang dipergunakan orang lain terhadap dirinya. Bersikap tetapi tidak pernah bertindak bertentangan dengan suara hati dan keyakinannya. Keselarasan yang berdasarkan kepalsuan, ketidak adilan, dan kebohongan akan disobeknya.

- Nilai-nilai otentik

Otentik berarti asli. Manusia otentik adalah manusia yang menghayati, menunjukkan dirinya sesuai dengan keasliannya, dengan kepribadian yang sebenarnya (Suseno, 1987:143).

- Kesiediaan untuk bertanggung jawab

Kesiediaan untuk bertanggung jawab adalah yang pertama, kesiediaan untuk melakukan apa yang harus dilakukan dengan sebaik mungkin. Bertanggung jawab berarti suatu sikap terhadap tugas yang membebani kita. Kedua, bertanggung jawab mengatasi segala etika peraturan. Suseno (1987: 16) etika tidak dapat mengantikan agama namun ia juga tidak bertentangan dengan agama, bahkan diperlukan. Etika peraturan hanya mempertanyakan apakah sesuatu atau tidak, sehingga terikat pada apa yang perlu dan nilai yang mau dihasilkan (Suseno, 1987:145-146).

- Kemandirian moral

Kemandirian berarti kita tidak pernah ikut-ikutan dengan berbagai pandangan moral dalam lingkungan kita, melainkan selalu membentuk penelitian, dan pendirian sendiri dalam bertindak sesuai dengannya. Kemandirian adalah kekuatan batin untuk memahami sikap moral sendiri dan bertindak sesuai dengannya.

- keberanian moral

Keberanian adalah ketekatan dan bertindak untuk bersikap mandiri. Keberanian menunjukkan dalam tekad untuk tetap mempertahankan sikap yang telah diyakini. Sebagai kewajiban pun apabila tidak disetujui atau secara aktif dilawan oleh lingkungan, sehingga tidak mundur dari tugas dan tanggung jawab. Keberanian adalah kesetiaan terhadap suara hati yang menyatakan diri dalam kesediaan untuk mengambil resiko konflik (Suseno, 1987:147).

- Kerendahan hati.

Kerendahan hati adalah kekuatan batin untuk melihat diri sesuai dengan kenyataannya. Orang yang rendah hati tidak hanya melihat kelemahannya melainkan juga kekuatannya, sehingga sadar akan keterbatasan kebaikan kita, termasuk kemampuan untuk memberikan penilaian moral terbatas, sehingga penilaian kita masih jauh sempurna karena hati belum jernih (Suseno, 1987:148).

- Realitas dan kritis

Realitas dan kritis yaitu menjamin keadilan dan menciptakan sesuatu keadaan masyarakat yang membuka kemungkinan lebih besar dari anggota-anggota untuk membangun hidup lebih tegas dari penderitaan dan lebih bahagia (Suseno, 1987:150).

6. Pendekatan Moral

Pendekatan moral bertolak dari asumsi dasar bahwa salah satu tujuan kehadiran sastra ditengah-tengah masyarakat pembaca adalah berupaya untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia sebagai makhluk berbudaya, berpikir dan berketuhanan. Memang karya sastra tidak safah, gagasan, tema, dan pesan-pesan tertentu. Dengan pendekatan moral ini, peneliti hendak melihat sejauh mana karya sastra itu memiliki moral. Moral dalam pengertian filsafat merupakan suatu konsep yang telah dirumuskan oleh sebuah masyarakat bagi menentukan kebaikan atau keburukan. Karena itu moral merupakan suatu norma tentang kehidupan yang telah diberikan kedudukan istimewa dalam kegiatan ataupun kegiatan sebuah masyarakat (Semi, 1993:72).

7. Konsep dan Kriteria

Menurut Semi pendekatan moral mempunyai konsep sebagai berikut:

- Sebuah karya sastra yang bernilai tinggi adalah sebuah karya sastra yang mengandung moral yang tinggi, yang dapat mengangkat harkat umat. Dalam hal ini karya sastra, karya sastra diciptakan penulis tidak semata-mata mengandalkan bakat dan kemahiran berekspresi, lebih dari itu, seorang penulis

melahirkan karya sastra karena ia juga memiliki visi, aspirasi, itikad baik, dan perjuangan, sehingga karya sastra yang dihasilkannya memiliki nilai tinggi. Karya sastra yang hanya mementingkan nilai seni tanpa memperhatikan moral dinilai sebagai karya yang tidak bermutu.

- Dalam memberikan ukuran baik dan buruk lebih menitik beratkan kepada masalah isi seperti tema, pemikiran, falsafah, dan pesan-pesan dibandingkan dengan masalah bentuk. Masalah bentuk dalam pendekatan ini memang agak diabaikan, karena pandangan bahwa mutu karya sastra bukan ditentukan oleh bagaimana karya sastra disajikan tetapi bagaimana kemampuan karya tersebut memotivasi masyarakat kearah kehidupan yang lebih baik.
- Masalah didaktis, yakni pendidikan dan pengajaran, yang dapat mengantarkan pembaca kepada suatu arah tertentu. Oleh sebab itu karya sastra yang baik adalah karya sastra yang memperlihatkan tokoh-tokoh yang memiliki kebijaksanaan dan kearifan sehingga pembaca dapat mengambilnya sebagai teladan.
- Pendekatan moral menghendaki sastra menjadi medium perekaman keperluan zaman, yang memiliki semangat menggerakkan masyarakat kearah budi pekerti yang terpuji. Karya sastra dalam hal ini dinilai guru yang dapat dijadikan panutan.
- Pendekatan ini percaya bahwa masyarakat tidak dapat meningkatkan kualitas hidupnya bila dibantu oleh pemikir, ilmuwan, budayawan, sastrawan. Oleh karena itu, pendekatan moral menempatkan karya sastra lebih dari suatu seni.- Aspek kesejarahan pergerakan kemajuan masyarakat dari suatu zaman ke zaman yang lain. Artinya pendekatan moral menganalisis juga masalah perjuangan umat manusia melepaskan diri dari keterbelakangan dan kebodohan. Dari gambaran tentang criteria pendekatan moral diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pendekatan ini menitik beratkan misi sastra sebagai alat perjuangan meningkatkan mutu kehidupan umat manusia, meningkatkan budi pekerti anggota masyarakat

8. Metode atau langkah kerja pendekatan moral adalah sebagai berikut:

- Didalam menghadapi karya sastra yang paling pokok diperhatikan adalah isinya yang terdiri dari pemikiran, falsafah, dan nilai-nilai. Disamping itu, diperhatikan pula tujuan dan pesan-pesan penulis.
- Aspek didaktis mendapat kajian secara kritis. Hal ini dapat melihat melalui kajian perwatakan peran tokoh-tokoh.
- Pembahasan aspek moral hendaknya dibedakan dengan pembahasan moral yang berada dalam buku teks sekolah. Bagaimanapun masalah moral ini menjadi titik perhatian utama, namun aspek kesastraannya jangan terlalu dikorbankan. Karya sastra yang dihadapi mesti tetap dipandang sebagai karya sastra. Bila tidak demikian, bisa terjadi pemakaian pendekatan moral ini menjadi kaku. Disamping itu harus dipahami bahwa moral yang diperlihatkan didalam karya sastra tidak semata-mata segi putihnya saja, tetapi sekaligus diperlihatkann segi hitamnya sebagai perbandingan. Justru dialektika ini merupakan kekhasan karya sastra.
- Pendekatan moral memperhatikan pula masalah kesan dan resepsi pembaca, karena yang mentukan berfaedah atau tidak berfaedah sebuah karya sastra tergantung kepada kesan dan rersepsi pembaca. Bisa saja sebuah karya sastra membawa misi yang besar ditinjau dari segi konsep moralitas, namun tidak banyak gunanya bila pembaca tidka mampu menangkap atau memhami misi tersebut.
- Kekuatan dan Kelemahan
- Memperhatikan kosepsi pendekatan moral ini terlihat bahwa kekuatan pendekatan moral ini adalah pada upaya memandang karya sastra sebagai karya yang mengandung nilai-nilai, pemikiran dan falsafah hidup yang akan membawa manusia menuju kearah kehidupan manusia yang lebih bermutu.
- Kelemahan pendekatan ini antara lain :
- Berkecenderungan untuk melengahkan masalah bentuk dengan lebih banyak memperhatikan aspek isi,

- Sukar sekali merumuskan konsep moral, karena pengertian moral bisa berubah-ubah dan tidak sama bagi setiap orang dan pada setiap waktu,
- Pendekatan moral berkecenderungan untuk menjurus kepada ukuran nilai moral keagamaan,
- Terdapat kemungkinan untuk mengidentikkan apa yang dilukiskan pengarang dalam karyanya dengan sikap hidup beragama pengarang.

Kesimpulan

Moral adalah tolak ukur untuk menentukan betul salahnya sikap dan tindakan manusia dilihat dari segi baik buruknya. Nilai moral bertolak pada sikap, kelakuan yang dapat dilihat melauai perbuatan. Perbuatan yang dapat terlihat terpuji dan baik secara lahiriyah akan dinilai memiliki nilai moral yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Suseno, Frans Magnis. 1987. Etika Dasar Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral. Yogyakarta: Kanisius.
- Hadiwardoyo, Purwa. 1990. Moral dan Masalahnya. Yogyakarta: Kanisius.
- Noor, Redyanto. 2007. Pengantar Pengkajian Sastra. Semarang: Fasindo.
- <https://languagemta.wordpress.com/2012/03/08/pendekatan-moral-dalam-pengkajian-sastra/>
- <http://kajiansastra.blogspot.co.id/2011/08/analisis-nilai-moral-dalam-novel.html>
- <http://www.rumpunsastra.com/2014/09/pendekatan-dalam-kajian-sastra.html>

MODUL II

ASPEK – ASPEK KAWASAN MORAL

1. Pengertian Moral

Kata moral berasal dari bahasa Latin *mos* (jamak *mores*) yang berarti kebiasaan, adat (Bertens, 1993). Moral merupakan suatu standar salah atau benar bagi seseorang (Rogers & Baron, dalam Martini, 1995). Berns (1997) mengemukakan bahwa moralitas mencakup mematuhi aturan sosial dalam kehidupan sehari-hari dan *conscience* atau aturan personal seseorang untuk berinteraksi dengan orang lain. Setiono (dalam Muslimin, 2004) menjelaskan bahwa menurut teori penalaran moral, moralitas terkait dengan jawaban atas pertanyaan mengapa dan bagaimana orang sampai pada keputusan bahwa sesuatu dianggap baik dan buruk. Moralitas pada dasarnya dipandang sebagai pertentangan (konflik) mengenai hal yang baik disatu pihak dan hal yang buruk dipihak lain. Keadaan konflik tersebut mencerminkan keadaan yang harus diselesaikan antara dua kepentingan, yakni kepentingan diri dan orang lain, atau dapat pula dikatakan keadaan konflik antara hak dan kewajiban.

2. Pengertian Penalaran Moral

Kohlberg (dalam Glover, 1997), mendefinisikan penalaran moral sebagai penilaian nilai, penilaian sosial, dan juga penilaian terhadap kewajiban yang mengikat individu dalam melakukan suatu tindakan. Penalaran moral dapat dijadikan prediktor terhadap dilakukannya tindakan tertentu pada situasi yang melibatkan moral. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Rest (1979) bahwa penalaran moral adalah konsep dasar yang dimiliki individu untuk menganalisa masalah sosial-moral dan menilai terlebih dahulu tindakan apa yang akan dilakukannya. Menurut Kohlberg (1981) penalaran moral adalah suatu pemikiran tentang masalah moral. Pemikiran itu merupakan prinsip yang dipakai dalam menilai dan melakukan suatu tindakan dalam situasi moral. Penalaran moral dipandang sebagai suatu struktur bukan isi. Jika penalaran moral dilihat sebagai isi, maka sesuatu dikatakan baik atau buruk akan sangat tergantung pada

lingkungan sosial budaya tertentu, sehingga sifatnya akan sangat relatif. Tetapi jika penalaran moral dilihat sebagai struktur, maka apa yang baik dan buruk terkait dengan prinsip filosofis moralitas, sehingga penalaran moral bersifat universal. Penalaran moral inilah yang menjadi indikator dari tingkatan atau tahap kematangan moral. Memperhatikan penalaran mengapa suatu tindakan salah, akan lebih memberi penjelasan dari pada memperhatikan perilaku seseorang atau bahkan mendengar pernyataannya bahwa sesuatu itu salah (Duska dan Whelan, 1975). Berdasarkan uraian teori di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa penalaran moral adalah kemampuan (konsep dasar) seseorang untuk dapat memutuskan masalah sosial-moral dalam situasi kompleks dengan melakukan penilaian terlebih dahulu terhadap nilai dan sosial mengenai tindakan apa yang akan dilakukannya.

3. Tahapan-tahapan Perkembangan Penalaran Moral

Kohlberg (Muslimin, 2004) menyatakan bahwa proses perkembangan penalaran moral merupakan sebuah proses alih peran, yaitu proses perkembangan yang menuju ke arah struktur yang lebih komprehensif, lebih terdiferensiasi dan lebih seimbang dibandingkan dengan struktur sebelumnya. Melihat pentingnya perkembangan penalaran moral dalam kehidupan manusia, maka berbagai penelitian psikologi di bidang ini dilakukan. Lawrence Kohlberg, memperluas penelitian Piaget tentang penalaran aturan konvensi sosial, menjadi tiga tingkat penalaran moral yang terdiri dari prakonvensional, konvensional, dan pascakonvensional (Hasan, 2006). Tahap-tahap perkembangan penalaran moral dibagi menjadi 3 tingkat, yang terdiri dari prakonvensional, konvensional, dan pascakonvensional. Tiga tingkat tersebut kemudian dibagi atas enam tahap (Kohlberg, 1995).

a. Tingkat Prakonvensional

Pada tahap ini anak tanggap terhadap aturan-aturan budaya dan ungkapan-ungkapan budaya mengenai baik dan buruk, atau benar dan salah. Akan tetapi hal ini ditafsirkan dari segi menghindari hukuman atau untuk

mendapatkan hadiah. Tingkat ini biasanya terdapat pada usia 4 sampai 10 tahun. Terdapat dua tahap pada tingkat ini.

Tahap 1) : *Orientasi hukuman dan kepatuhan*

Akibat-akibat fisik suatu perbuatan menentukan baik buruknya, tanpa menghiraukan arti dan nilai manusiawi dari akibat tersebut. Anak hanya semata-mata menghindarkan hukuman dan tunduk pada kekuasaan tanpa mempersoalkannya. Dinilai sebagai hal yang bernilai dalam dirinya sendiri dan bukan karena rasa hormat terhadap tatanan moral yang melandasi dan yang didukung oleh hukuman dan otoritas.

Tahap 2) : *Orientasi relativis-instrumental*

Perbuatan yang benar adalah perbuatan yang merupakan cara atau alat untuk memuaskan kebutuhannya sendiri dan kadangkadang juga kebutuhan orang lain. Hubungan antar manusia dipandang seperti hubungan di pasar. Terdapat elemen kewajaran tindakan yang bersifat resiprositas dan pembagian sama rata, tetapi ditafsirkan secara fisik dan pragmatis. Resiprositas ini merupakan hal "Jika engkau menggaruk punggungku, nanti aku juga akan menggaruk punggungmu", dan bukan karena loyalitas, rasa terima kasih atau keadilan.

b. Tingkat Konvensional

Individu pada tingkat konvensional menemukan pemikiran-pemikiran moral pada masyarakat. Pada tingkat ini seseorang menyadari dirinya sebagai seorang individu ditengah-tengah keluarga, masyarakat dan bangsanya. Keluarga, masyarakat, bangsa dinilai memiliki kebenarannya sendiri, karena jika menyimpang dari kelompok ini akan terisolasi. Oleh karena itu, kecenderungan individu pada tahap ini adalah menyesuaikan diri dengan aturan-aturan masyarakat dan mengidentifikasi dirinya terhadap kelompok sosialnya. Kalau pada tingkat prakonvensional perasaan dominan adalah takut, pada tingkat ini perasaan dominan adalah malu. Tingkat ini berkisar usia 10 sampai 13 tahun. Tingkat ini mempunyai dua tahap.

Tahap 3) : *Orientasi kesepakatan antara pribadi / orientasi "Anak Manis"*

Perilaku yang baik adalah yang menyenangkan dan membantu orang lain serta yang disetujui oleh anak. Terdapat banyak konformitas terhadap gambaran stereotip mengenai apa itu perilaku mayoritas atau *lalamiah*. Perilaku sering dinilai menurut niatnya, ungkapan *l*dia bermaksud baik*l* untuk pertama kalinya menjadi penting. Orang mendapatkan persetujuan dengan menjadi *l*baik*l*. Konsep seperti kesetiaan, kepercayaan dan rasa terima kasih mulai dikenal. Individu mulai mengisi peran sosial yang diharapkan masyarakatnya. Sesuatu dikatakan benar jika memenuhi harapan masyarakat dan dikatakan buruk jika melanggar aturan sosial.

Tahap 4) : *Orientasi hukum dan ketertiban*

Pada tahap ini, individu dapat melihat sistem sosial secara keseluruhan. Aturan dalam masyarakat merupakan dasar baik atau buruk, melaksanakan kewajiban dan memperlihatkan penghargaan terhadap otoritas adalah hal yang penting. Alasan mematuhi peraturan bukan merupakan ketakutan terhadap hukuman atau kebutuhan individu, melainkan kepercayaan bahwa hukum dan aturan harus dipatuhi untuk mempertahankan tatanan dan fungsi sosial. Perilaku yang baik adalah semata-mata melakukan kewajiban sendiri, menghormati otoritas dan menjaga tata tertib sosial yang ada, sebagai yang bernilai dalam dirinya sendiri.

c. Tingkat Pasca-konvensional

Tingkat ini disebut juga moralitas yang berprinsip (*principled morality*). Pada tingkat ini terdapat usaha yang jelas untuk merumuskan nilai-nilai dan prinsip moral yang memiliki keabsahan dan dapat diterapkan terlepas dari otoritas kelompok atau orang yang berpegang pada prinsip-prinsip itu dan terlepas pula dari identifikasi individu sendiri dengan kelompok tersebut. Baik atau buruk didefinisikan pada keadilan yang lebih besar, bukan pada aturan masyarakat yang tertulis atau kewenangan tokoh otoritas. Tahap ini sudah dimulai dari remaja awal sampai seterusnya. Ada dua tahap pada tingkat ini.

Tahap 5): Orientasi kontrak sosial legalistik Pada umumnya tahap ini amat bernada semangat utilitarian. Perbuatan yang baik cenderung dirumuskan dalam kerangka hak Universitas Sumatera Utara dan ukuran individual umum yang telah diuji secara kritis dan telah disepakati oleh seluruh masyarakat. Terdapat kesadaran yang jelas mengenai relativisme nilai dan pendapat pribadi bersesuaian dengannya, terdapat suatu penekanan atas aturan prosedural untuk mencapai kesepakatan. Terlepas dari apa yang telah disepakati secara konstitusional dan demokratis, hak adalah soal nilai dan pendapat pribadi. Hasilnya adalah penekanan pada sudut pandangan legal, tetapi dengan penekanan pada kemungkinan untuk mengubah hukum berdasarkan pertimbangan rasional mengenai manfaat sosial (dan bukan membekukan hukum itu sesuai dengan tata tertib gaya tahap 4).

Tahap 6) : *Orientasi prinsip etika universal*

Hak ditentukan oleh keputusan suara batin, sesuai dengan prinsip-prinsip etis yang dipilih sendiri dan yang mengacu pada komprehensivitas logis, universalitas, konsistensi logis. Keenam tingkat penalaran moral yang dikemukakan oleh Kohlberg (1995) tersebut dibedakan satu dengan yang lainnya bukan berdasarkan keputusan yang dibuat, tetapi berdasarkan alasan yang dipakai untuk mengambil keputusan.

4. Komponen Penalaran Moral

Rest membagi komponen penalaran moral menjadi empat hal (dalam Kurtines & Gerwitz, 1992). Adapun empat komponen utama penalaran moral yang dikemukakan oleh Rest, antara lain :

- a. Menginterpretasi situasi dan mengidentifikasi permasalahan moral (mencakup empati, berbicara selaras dengan perannya, memperkirakan bagaimana masing-masing pelaku dalam situasi terpengaruh oleh berbagai tindakan tersebut).
- b. Memperkirakan apa yang seharusnya dilakukan seseorang, merumuskan suatu rencana tindakan yang merujuk kepada suatu standar moral atau suatu ide

tertentu (mencakup konsep kewajaran & keadilan, penalaran moral, penerapan nilai moral sosial).

- c. Mengevaluasi berbagai perangkat tindakan yang berkaitan dengan bagaimana caranya orang memberikan penilaian moral atau bertentangan dengan moral, serta memutuskan apa yang secara aktual akan dilakukan seseorang (mencakup proses pengambilan keputusan, model integrasi nilai, dan perilaku mempertahankan diri).
- d. Melaksanakan serta mengimplementasikan rencana tindakan yang berbobot moral (mencakup ego-strength dan proses pengaturan diri).

5. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penalaran Moral

Menurut Kohlberg (dalam Janssens, 1992), ada 3 faktor umum yang memberikan kontribusi pada perkembangan penalaran moral yaitu :

- a. Kesempatan pengambilan peran Perkembangan penalaran moral meningkat ketika seseorang terlibat dalam situasi yang memungkinkan seseorang mengambil perspektif sosial seperti situasi dimana seseorang sulit untuk menerima ide, perasaan, opini, keinginan, kebutuhan, hak, kewajiban, nilai dan standar orang lain.
- b. Situasi moral Setiap lingkungan sosial dikarakteristikan sebagai hak dan kewajiban yang fundamental yang didistribusikan dan melibatkan keputusan. Dalam beberapa lingkungan, keputusan diambil sesuai dengan aturan, tradisi, hukum, atau figur otoritas (tahap 1). Dalam lingkungan yang lain, keputusan didasarkan pada pertimbangan pada system yang tersedia (tahap 4 atau lebih tinggi). Tahap penalaran moral ditunjukkan oleh situasi yang menstimulasi orang untuk menunjukkan nilai moral dan norma moral.
- c. Konflik moral kognitif Konflik moral kognitif merupakan pertentangan penalaran moral seseorang dengan penalaran orang lain. Dalam beberapa studi, subjek bertentangan dengan orang lain yang mempunyai penalaran moral lebih tinggi maupun lebih rendah. Anak yang mengalami pertentangan dengan orang lain yang memiliki penalaran moral yang lebih tinggi menunjukkan tahap perkembangan moral yang lebih tinggi dari pada anak

yang berkonfrontasi dengan orang lain yang memiliki tahap penalaran moral yang sama dengannya. Interaksi antara orangtua dan anak dalam berbagai situasi menunjukkan 3 faktor umum di atas. Faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi penalaran moral anak (Janssens, 1992). Menurut Supeni (dalam Muslimin, 2004) faktor lain yang dapat mempengaruhi perkembangan moral anak adalah keluarga. Kohlberg (dalam Janssens, 1992) memandang bahwa pengaruh utama dari keluarga adalah pada diskusi antara orangtua dengan anak mengenai nilai-nilai dan norma, dari pada pengalaman anak sendiri akan disiplin, hukuman, dan hadiah dari orangtua. Kohlberg juga menyatakan bahwa penalaran moral dipengaruhi oleh tahap perkembangan kognitif yang tinggi (seperti pendidikan) dan pengalaman sosiomoral (Glover, 1997). Pendidikan adalah prediktor yang kuat dari perkembangan penalaran moral, karena lingkungan pendidikan yang lebih tinggi menyediakan kesempatan, tantangan dan lingkungan yang lebih luas yang dapat merangsang perkembangan kognitif (Rest, 1979) Berdasarkan uraian di atas maka ada 5 faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan penalaran moral seseorang, yaitu kesempatan alih peran, situasi moral, konflik moral kognitif, keluarga, dan pendidikan.

6. Pengukuran Penalaran Moral

Penalaran moral sangat diperlukan dalam kehidupan. Berdasarkan penelitian, penalaran moral dapat diukur dengan menggunakan suatu alat ukur.

- a. Penelitian yang dilakukan oleh Nashori (1995) tentang penalaran moral pada 30 orang siswa Sekolah Menengah Atas menggunakan Defining Issues Test (DIT) sebagai alat untuk mengukur penalaran moral.
- b. Nichols dan Day (1982) meneliti perbandingan penalaran moral kelompok dan individual pada mahasiswa Universitas Minnesota dengan menggunakan Rest's Defining Issues Test (DIT) untuk mengukur penalaran moral.
- c. Martani (1995) melakukan penelitian tentang perkembangan penalaran moral pada remaja, dengan menggunakan Defining Issues Test (DIT) untuk mengungkap penalaran moral 100 orang remaja.

- d. Glover (1997) melakukan penelitian mengenai hubungan penalaran moral dan religiusitas diantara kelompok anggota konservatif, moderat, dan liberal, dengan menggunakan Defining Issues Test (DIT). Menurut penelitian Davidson dan Robbins (dalam Rest, 1979) konsistensi internal Alpha Cronbach pada DIT adalah diatas 0.70. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Rest's Defining Issues Test (DIT) untuk mengukur penalaran moral remaja delinkuen. DIT merupakan tes pilihan berganda yang bersifat objektif, disusun berdasarkan teori perkembangan moral dari Kohlberg. Saat ini telah ada dua versi , yaitu DIT-1 dan DIT-2. Dalam penelitian ini digunakan DIT-1 bentuk pendek (Short Form). DIT-1 terdiri dari 3 buah cerita atau dilema sosial yang menyangkut moral, masing-masing disertai dengan 12 pernyataan. Setiap pernyataan ini mencerminkan suatu tahap perkembangan moral tertentu atau tipe penalaran moral tertentu. Untuk setiap pernyataan subjek harus memilih salah satu pertimbangan dari lima pertimbangan yang ada, yaitu: sangat penting, penting, agak penting, kurang penting, dan tidak penting. Selanjutnya adalah menentukan urutan (ranking), pernyataan mana yang menurut subjek merupakan pernyataan terpenting pertama, terpenting kedua, Universitas Sumatera Utara terpenting ketiga dan terpenting keempat. Penalaran moral dalam penelitian ini ditunjukkan melalui nilai P dari test DIT (Defining Issues Test). Nilai P menunjukkan principle morality yaitu kemampuan seseorang untuk dapat memutuskan masalah sosial menyangkut moral yang dihadapinya dengan mempertimbangkan prinsipprinsip moral yang dimiliki.

MODUL III

TEORI PERKEMBANGAN MORAL

1. Pengertian Moral

Secara kebahasaan perkataan moral berasal dari ungkapan bahasa latin yaitu *mores* yang merupakan bentuk jamak dari perkataan *mos* yang berarti adat kebiasaan. Dalam kamus umum bahasa Indonesia dikatakan bahwa moral adalah penentuan baik buruk terhadap perbuatan dan kelakuan. Istilah moral biasanya dipergunakan untuk menentukan batas-batas suatu perbuatan, kelakuan, sifat dan perangai yang dinyatakan benar, salah, baik, buruk, layak atau tidak layak, patut maupun tidak patut. Moral dalam istilah dipahami juga sebagai:

- a. Prinsip hidup yang berkenaan dengan benar dan salah, baik dan buruk.
- b. Kemampuan untuk memahami perbedaan benar dan salah.
- c. Ajaran atau gambaran tentang tingkah laku yang baik.

Moral ialah tingkah laku yang telah ditentukan oleh etika. Moral terbagi menjadi dua yaitu:

- a. Baik; segala tingkah laku yang dikenal pasti oleh etika sebagai baik.
- b. Buruk; tingkah laku yang dikenal pasti oleh etika sebagai buruk.

Perkembangan moral adalah perubahan penalaran, perasaan, dan perilaku tentang standar mengenai benar dan salah. Perkembangan moral memiliki dimensi intrapersonal, yang mengatur aktifitas seseorang ketika dia terlibat dalam interaksi sosial dan dimensi interpersonal yang mengatur interaksi sosial dan penyelesaian konflik. (Santrock, 2007 ;Gibbs,2003 ; Power,2004 ; Walker &Pitts,1998). Perkembangan moral berkaitan dengan aturan-aturan dan ketentuan tentang apa yang seharusnya dilakukan oleh seseorang dalam berinteraksi dengan orang lain.

2. Teori Perkembangan Moral Piaget

Jean Piaget (1896-1980) menyusun teori perkembangan moralnya yang dikenal sebagai teori struktural-kognitif. Teori ini melihat perkembangan moral sebagai suatu hasil interaksi antara pelaksana aturan, pengikut atau pembuatnya secara individual dengan kerangka jalinan aturan yang bersangkutan yang

menunjukkan esensi moralitas itu. Fokus teori ini ada pada sikap, perasaan (afeksi), serta kognisi dari individu terhadap perangkat aturan yang bersangkutan (Kurtines, 1992: 513). Piaget melakukan penelitiannya yang menunjukkan adanya kontradiksi yang jelas antara perubahan persepsi yang berkaitan dengan usia dan ketaatan terhadap aturan. Kontradiksi yang dimaksud diselesaikan dengan jalan mengklasifikasikan penalaran moral dan anak-anak yang agak kecil dan yang agak besar (Burton, 1992: 323-324). Berdasarkan penelitian itu dirumuskan dua buah urutan perkembangan yang paralel: satu rumusan urutan perkembangan berkenaan dengan pelaksanaan aturan, sedang rumusan lainnya berkenaan dengan kesadaran akan peraturan. Masing-masing urutan perkembangan melukiskan adanya peralihan dari orientasi yang bersifat eksternal, egosentris dan heteronom, ke arah orientasi yang menunjukkan adanya keinginan untuk bekerjasama dan berpegang pada aturan itu sebagai hasil perjanjian bersama (Turiel dan Smetana, 1992:459). Pengamatan Piaget tersebut dapat diringkaskan sebagai berikut :

Pada Level I

Pada anak sekitar usia 1 sampai 2 tahun, pelaksanaan peraturan masih bersifat motor activity, belum ada kesadaran akan adanya peraturan. Semua gerakannya masih belum dibimbing oleh pikiran tentang adanya peraturan yang harus ditaatinya.

Pada Level II

Pada usia sekitar 2 sampai 6 tahun, sudah mulai ada kesadaran akan adanya peraturan, namun menganggap peraturan itu bersifat suci, tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun, merubah peraturan merupakan kesalahan besar. Dalam pelaksanaan peraturan mereka ini masih bersifat egosentrik, berpusat pada dirinya.

Pada Level III

Pada usia sekitar 7 sampai 10 tahun pelaksanaan peraturan sudah mulai bersifat sebagai aktivitas sosial, sifat egosentrik sudah mulai ditinggalkan. Dalam

tahap ini sudah ada keinginan yang kuat untuk memahami peraturan, dan setia mengikuti peraturan tersebut. Sifat heteronomi mulai bergeser pada sifat otonomi.

Pada Tahap IV

Pada usia sekitar 11 sampai 12 tahun kemampuan berpikir anak sudah mulai berkembang. Pada tahap ini sudah ada kemampuan untuk berpikir abstrak, sudah ada kesadaran bahwa peraturan merupakan hasil kesepakatan bersama. Tahap ini merupakan tahap kodifikasi atau tahap pematangan peraturan (Soenarjati dan Cholisin, 1989: 34-35). Dari skema di atas tampak bahwa keputusan moral anak berubah seiring dengan pertumbuhan usianya (Conn, 1982:378).

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perkembangan moral terdapat pergeseran yang sifatnya alami, yang terjadi secara bersamaan dengan atau segera setelah peralihan kognitif dari pemikiran pra-operasional ke arah pemikiran operasional, di sekitar usia tujuh tahun. Pergeseran tersebut berlangsung sedemikian, sehingga anak yang bersangkutan untuk pertamakalinya mulai menyadari maksudnya sendiri serta memanfaatkan informasi ini dalam mengadakan pertimbangan moral yang menyangkut orang lain (Liebert, 1992: 291). Pada bagian lain, pertimbangan moral berkembang sejalan dengan prinsip-prinsip dasar Piaget tentang konflik moral-kognitif dengan organisasi tahapan urutan. Tahapan perkembangan pertimbangan moral Piaget mengandung suatu proses berjalur tunggal.

Artinya, pertimbangan moral tidak timbul dari tindakan moral itu sendiri. Suatu tahapan dari pertimbangan moral mungkin mengandung suatu perilaku baru, demikian pula halnya suatu tindakan yang mengandung konflik dan pilihan mungkin membawa orang untuk menata suatu tahapan baru dari pertimbangan moral.

3. Implementasi Teori Perkembangan Moral Piaget Dalam Pembelajaran

- a. Memfokuskan pada proses berfikir atau proses mental anak tidak sekedar pada produknya. Di samping kebenaran jawaban siswa, guru harus memahami proses yang digunakan anak sehingga sampai pada jawaban tersebut.
- b. Pengenalan dan pengakuan atas peranan anak-anak yang penting sekali dalam inisiatif diri dan keterlibatan aktif dalam kegiatan pembelajaran. Dalam kelas Piaget penyajian materi jadi (ready made) tidak diberi penekanan, dan anak-anak didorong untuk menemukan untuk dirinya sendiri melalui interaksi spontan dengan lingkungan.
- c. Tidak menekankan pada praktek - praktek yang diarahkan untuk menjadikan anak-anak seperti orang dewasa dalam pemikirannya.
- d. Penerimaan terhadap perbedaan individu dalam kemajuan perkembangan, teori Piaget mengasumsikan bahwa seluruh anak berkembang melalui urutan perkembangan yang sama namun mereka memperolehnya dengan kecepatan yang berbeda.

4. Pengertian Kognitif

Secara umum kognitif diartikan sebagai potensi intelektual yang terdiri dari tahapan: pengetahuan (knowledge), pemahaman (comprehention), penerapan (aplication), analisa (analysis), sintesa (sinthesis), evaluasi (evaluation). Kognitif berarti persoalan yang menyangkut kemampuan untuk mengembangkan kemampuan rasional (akal). Teori kognitif lebih menekankan bagaimana proses atau upaya untuk mengoptimalkan kemampuan aspek rasional yang dimiliki oleh orang lain. Oleh sebab itu kognitif berbeda dengan teori behavioristik, yang lebih menekankan pada aspek kemampuan perilaku yang diwujudkan dengan cara kemampuan merespons terhadap stimulus yang datang kepada dirinya. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar kata kognitif. Dari aspek tenaga pendidik misalnya. Seorang dosen diharuskan memiliki kompetensi bidang kognitif. Artinya dosen tersebut harus memiliki kemampuan intelektual, seperti

penguasaan materi perkuliahan, pengetahuan mengenai cara mengajar, pengetahuan cara menilai mahasiswa dan sebagainya.

Jean Piaget (1896-1980), pakar psikologi dari Swiss, mengatakan bahwa anak dapat membangun secara aktif dunia kognitif mereka sendiri. Dalam pandangan Piaget, terdapat dua proses yang mendasari perkembangan dunia individu, yaitu pengorganisasian dan penyesuaian (adaptasi). Kecenderungan organisasi dapat dilukiskan sebagai kecenderungan bawaan setiap organisme untuk mengintegasi proses-proses sendiri menjadi sistem-sistem yang koheren. Adaptasi dapat dilukiskan sebagai kecenderungan bawaan setiap organisme untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan dan keadaan sosial.

5. Teori Perkembangan Kognitif Piaget

Perkembangan Kognitif adalah tahap-tahap perkembangan kognitif manusia mulai dari usia anak-anak sampai dewasa; mulai dari proses-proses berpikir secara konkret sampai dengan yang lebih tinggi yaitu konsep-konsep abstrak dan logis. Menurut Piaget, perkembangan kognitif merupakan suatu proses genetik, yaitu suatu proses yang didasarkan atas mekanisme biologis perkembangan sistem syaraf (maturasi). Dengan makin bertambahnya umur seseorang, maka makin komplekslah susunan syarafnya dan makin meningkat pula kemampuannya. Ketika individu berkembang menuju kedewasaan, akan mengalami adaptasi biologis dengan lingkungannya yang akan menyebabkan adanya perubahan-perubahan kualitatif yang ada didalam struktur kognitifnya (aktivitas).

Bagaimana seseorang memperoleh kecakapan intelektual, pada umumnya akan berhubungan dengan proses mencari keseimbangan antara apa yang mereka rasakan dan mereka ketahui pada satu sisi dengan apa yang mereka lihat suatu fenomena baru sebagai pengalaman atau persoalan. Bila seseorang dalam kondisi sekarang dapat mengatasi situasi baru, keseimbangan mereka tidak akan terganggu. Jika tidak, ia harus melakukan adaptasi dengan lingkungannya.

Dalam pandangan Piaget, anak-anak secara aktif membangun dunia kognitif mereka dengan menggunakan skema untuk menjelaskan hal-hal yang

mereka alami. Skema adalah struktur kognitif yang digunakan oleh manusia untuk mengadaptasi diri terhadap lingkungan dan menata lingkungan ini secara intelektual. Piaget (1952) mengatakan bahwa ada dua proses yang bertanggung jawab atas seseorang menggunakan dan mengadaptasi skema mereka:

- a. Asimilasi adalah proses menambahkan informasi baru ke dalam skema yang sudah ada. Proses ini bersifat subjektif, karena seseorang akan cenderung memodifikasi pengalaman atau informasi yang diperolehnya agar bisa masuk ke dalam skema yang sudah ada sebelumnya.
- b. Akomodasi adalah bentuk penyesuaian lain yang melibatkan perubahan atau penggantian skema akibat adanya informasi baru yang tidak sesuai dengan skema yang sudah ada. Dalam proses ini dapat pula terjadi pemunculan skema yang baru sama sekali.

Piaget membagi perkembangan kognitif anak ke dalam 4 periode utama yang berkorelasi dengan dan semakin canggih seiring penambahan usia :

- a. Periode sensorimotor (usia 0–2 tahun)

Bagi anak yang berada pada tahap ini, pengalaman diperoleh melalui fisik (gerakan anggota tubuh) dan sensori (koordinasi alat indra). Pada mulanya pengalaman itu bersatu dengan dirinya, ini berarti bahwa suatu objek itu ada bila ada pada penglihatannya. Perkembangan selanjutnya ia mulai berusaha untuk mencari objek yang asalnya terlihat kemudian menghiang dari pandangannya, asal perpindahannya terlihat. Akhir dari tahap ini ia mulai mencari objek yang hilang bila benda tersebut tidak terlihat perpindahannya. Objek mulai terpisah dari dirinya dan bersamaan dengan itu konsep objek dalam struktur kognitifnya pun mulai dikatakan matang. Ia mulai mampu untuk melambungkan objek fisik ke dalam symbol-simbol, misalnya mulai bisa berbicara meniru suara kendaraan, suara binatang, dan lain lain.

b. Periode praoperasional (usia 2–7 tahun)

Tahap ini adalah tahap persiapan untuk pengorganisasian operasi konkrit. Pada tahap ini pemikiran anak lebih banyak berdasarkan pada pengalaman konkrit daripada pemikiran logis, sehingga jika ia melihat objek-objek yang kelihatannya berbeda, maka ia mengatakannya berbeda pula. Pada tahap ini anak masih berada pada tahap pra operasional belum memahami konsep kekekalan (*conservation*), yaitu kekekalan panjang, kekekalan materi, luas, dll. Selain dari itu, ciri-ciri anak pada tahap ini belum memahami dan belum dapat memikirkan dua aspek atau lebih secara bersamaan.

c. Periode operasional konkrit (usia 7–11 tahun)

Pada umumnya anak-anak pada tahap ini telah memahami operasi logis dengan bantuan benda-benda konkrit. Kemampuan ini terwujud dalam memahami konsep kekekalan, kemampuan untuk mengklasifikasikan dan serasi, mampu memandang suatu objek dari sudut pandang yang berbeda secara objektif. Anak pada tahap ini sudah cukup matang untuk menggunakan pemikiran logika, tetapi hanya objek fisik yang ada saat ini (karena itu disebut tahap operasional konkrit). Namun, tanpa objek fisik di hadapan mereka, anak-anak pada tahap ini masih mengalami kesulitan besar dalam menyelesaikan tugas-tugas logika.

d. Periode operasional formal (usia 11 tahun sampai dewasa)

Anak pada tahap ini sudah mampu melakukan penalaran dengan menggunakan hal-hal yang abstrak dan menggunakan logika. Penggunaan benda-benda konkret tidak diperlukan lagi. Anak mampu bernalar tanpa harus berhadapan dengan dengan objek atau peristiwa berlangsung. Penalaran terjadi dalam struktur kognitifnya telah mampu hanya dengan menggunakan simbol-simbol, ide-ide, astraksi dan generalisasi. Ia telah memiliki kemampuan-kemampuan untuk melakukan operasi-operasi yang menyatakan hubungan di antara hubungan-hubungan, memahami konsep promosi.

6. Implementasi Teori Perkembangan Kognitif Piaget Dalam Pembelajaran

Memfokuskan pada proses berfikir atau proses mental anak tidak sekedar pada produknya. Di samping kebenaran jawaban siswa, guru harus memahami proses yang digunakan anak sehingga sampai pada jawaban tersebut. Pengenalan dan pengakuan atas peranan anak-anak yang penting sekali dalam inisiatif diri dan keterlibatan aktif dalam kegiatan pembelajaran. Dalam kelas Piaget penyajian materi jadi (*ready made*) tidak diberi penekanan, dan anak-anak didorong untuk menemukan untuk dirinya sendiri melalui interaksi spontan dengan lingkungan. Tidak menekankan pada praktek - praktek yang diarahkan untuk menjadikan anak-anak seperti orang dewasa dalam pemikirannya. Penerimaan terhadap perbedaan individu dalam kemajuan perkembangan, teori Piaget mengasumsikan bahwa seluruh anak berkembang melalui urutan perkembangan yang sama namun mereka memperolehnya dengan kecepatan yang berbeda.

7. Teori Belajar Cognitive-Developmental Menurut Teori Jean Piaget



Piaget merupakan salah seorang tokoh yang disebut-sebut sebagai pelopor aliran konstruktivisme. Salah satu sumbangan pemikirannya yang banyak digunakan sebagai rujukan untuk memahami perkembangan kognitif individu

yaitu teori tentang tahapan perkembangan individu. Menurut Piaget bahwa perkembangan kognitif individu meliputi empat tahap yaitu :

- a. sensory motor;
- b. pre operational;
- c. concrete operational dan
- d. formal operational.

Pemikiran lain dari Piaget tentang proses rekonstruksi pengetahuan individu yaitu asimilasi dan akomodasi. James Atherton (2005) menyebutkan bahwa asimilasi adalah *–the process by which a person takes material into their mind from the environment, which may mean changing the evidence of their senses to make it fit* dan akomodasi adalah *–the difference made to one’s mind or concepts by the process of assimilation*.

Dikemukakannya pula, bahwa belajar akan lebih berhasil apabila disesuaikan dengan tahap perkembangan kognitif peserta didik. Peserta didik hendaknya diberi kesempatan untuk melakukan eksperimen dengan obyek fisik, yang ditunjang oleh interaksi dengan teman sebaya dan dibantu oleh pertanyaan tilikan dari guru. Guru hendaknya banyak memberikan rangsangan kepada peserta didik agar mau berinteraksi dengan lingkungan secara aktif, mencari dan menemukan berbagai hal dari lingkungan.

Kesimpulan

Jean Piaget dikenal dengan teori perkembangan intelektual yg menyeluruh, yg mencerminkan adanya kekuatan antara fungsi biologi & psikologis. Bayi lahir dengan refleks bawaan, skema dimodifikasi dan digabungkan untuk membentuk tingkah laku yang lebih kompleks. Pada masa kanak-kanak, anak belum mempunyai konsepsi tentang objek yang tetap. Ia hanya dapat mengetahui hal-hal yang ditangkap dengan indranya. Anak telah dapat mengetahui symbol-simbol matematis, tetapi belum dapat menghadapi hal-hal yang abstrak (tak berwujud).

DAFTAR PUSTAKA

Yudhoshare. –Teori Perkembangan Moral dan Kognitifl. Tersedia:

http://yudhoshare.blogspot.co.id/2012/11/teori-perkembangan-kognitif-dan-teori_1.html

Eny Rahayu. –Teori Belajar Cognitive developmentall. Tersedia:

<http://catatanenyrahayu.blogspot.co.id/2012/04/teori-belajar-cognitive-developmentall.html>

MODUL IV

TEORI PERKEMBANGAN MORAL KOHLBERG

1. Biografi Kohlberg

Kohlberg tumbuh besar di Bronxville, New York, dan memasuki Akademi Andover di Massachusetts, sekolah menengah atas swasta yang mahal dan menuntut kemampuan akademis tinggi. Dia tidak langsung melanjutkan keperguruan tinggi namun pergi membantu pemulangan orang-orang Israel, bekerja sebagai insinyur hingga dua di pesawat angkut yang membawa pelarian dari Eropa melewati blockade Inggris ke Israel. Setelah itu, pada 1948, Kohlberg masuk ke Universitas Chicago di mana dua lulusan tes penerimaan dengan angka yang sangat tinggi sehingga hanya mengambil sedikit saja mata kuliah untuk memperoleh gelar sarjana mudnya. Dalam wacana ini memang dicapai hanya dalam waktu setahun. Dia tinggal Chicago sebentar untuk mengejar gelar sarjananya di dalam psikologi yang awalnya dia ingin mengambil psikologi kimia. Namun segera dia menjadi tertarik kepada piaget dan mulai mewawancarai anak-anak dan remaja tentang masalah-masalah moral. Semua hasil penelitiannya itu ditulis dalam disertasi doktoralnya (1958), rancangan pertama dari teori pentahapan psikologi yang baru. Kohlberg mengajar di Universitas Chicago dari tahun 1962 sampai 1968, dan di Universitas Harvard dari tahun 1968 sampai ajal menjemputnya ditahun 1987.[1]

2. Asumsi teori perkembangan Kohlberg

Kohlberg mengembangkan teorinya berdasarkan kepada asumsi-asumsi umum tentang teori perkembangan kognitif dari Dewey dan Piaget di atas. Kohlberg mendefinisikan kembali dan mengembangkan teorinya menjadi lebih terperinci. Asumsi-asumsi yang Kohlberg guna dalam mengembangkan teorinya sebagai berikut:

- a. Untuk memahami tingkah laku moral seseorang adalah dengan memahami falsafah moralnya, dengan memahami alasan-alasan yang melatar belakangi perbuatannya.
- b. Tingkat perkembangan tersusun sebagai suatu keseluruhan cara berfikir. Setiap orang akan konsisten dalam tingkat pertimbangan moralnya.
- c. Konsep tingkat perkembangan moral menyatakan rangkaian urutan perkembangan yang bersifat universal, dalam berbagai kondisi kebudayaan.

3. Teori perkembangan moral Lawrence Kohlberg

Tahapan perkembangan moral adalah ukuran dari tinggi rendahnya moral seseorang berdasarkan perkembangan penalaran moralnya, seperti yang diungkapkan oleh Lawrence Kohlberg. Tahapan tersebut dibuat saat ia belajar psikologi di University of Chicago berdasarkan teori yang ia buat setelah terinspirasi hasil kerja Jean Piaget dan kekagumannya akan reaksi anak-anak terhadap dilema moral. Ia menulis disertasi doktornya pada tahun 1958 yang menjadi awal dari apa yang sekarang disebut tahapan-tahapan perkembangan moral dari Kohlberg.

Teori ini berpandangan bahwa penalaran moral, yang merupakan dasar dari perilaku etis mempunyai enam tahapan perkembangan yang dapat teridentifikasi. Ia mengikuti perkembangan dari keputusan moral seiring penambahan usia yang semula diteliti Piaget, yang menyatakan bahwa logika dan moralitas berkembang melalui tahapan-tahapan konstruktif.

Kohlberg memperluas pandangan dasar ini, dengan menentukan bahwa proses perkembangan moral pada prinsipnya berhubungan dengan keadilan dan perkembangannya berlanjut selama kehidupan, walaupun ada dialog yang mempertanyakan implikasi filosofis dari penelitiannya.

Kohlberg menggunakan cerita-cerita tentang dilema moral dalam penelitiannya. Ia tertarik bagaimana orang-orang akan menjustifikasi tindakan-tindakan mereka bila mereka berada dalam persoalan moral yang sama. Lawrence

Kohlberg menekankan bahwa perkembangan moral didasarkan terutama pada penalaran moral dan berkembang secara bertahap. Konsep kunci dari teori Kohlberg ialah internalisasi, yakni perubahan perkembangan dari perilaku yang dikendalikan secara eksternal menjadi perilaku yang dikendalikan secara internal. Kohlberg sampai pada pandangannya setelah 20 tahun melakukan wawancara yang unik dengan anak-anak.

Dalam wawancara, anak-anak diberikan serangkaian cerita dimana tokoh-tokohnya menghadapi dilema-dilema moral. Bagaimana anak-anak dalam menyikapi setiap cerita yang dilakukan oleh masing-masing tokoh dalam cerita yang disampaikan oleh Kohlberg. Berikut ini adalah salah satu cerita dilema Kohlberg yang paling populer: –Di Eropa seorang perempuan hampir meninggal akibat sejenis kanker. Ada suatu obat yang menurut dokter dapat menyelamatkannya. Obat tersebut adalah sejenis radium yang baru-baru ini ditemukan oleh seorang apoteker di kota yang sama. Biaya membuat obat ini sangat mahal, tetapi sang apoteker menetapkan harganya sepuluh kali lipat lebih mahal dari pembuatan obat tersebut. Untuk pembuatan satu dosis kecil obat ia membayar 200 dolar dan menjualnya 2000 dolar. Suami pasien perempuan, Heinz pergi ke setiap orang yang ia kenal untuk meminjam uang, tetapi ia hanya bisa mengumpulkan 1000 dolar atau hanya setengah dari harga obat tersebut. Ia memberitahu apoteker bahwa istrinya sedang sakit dan memohon agar apoteker bersedia menjual obatnya lebih murah atau memperbolehkannya membayar setengahnya kemudian. Tetapi sang apoteker berkata, –Tidak, aku menemukan obat, dan aku harus mendapatkan uang dari obat itu. Heinz menjadi nekat dan membongkar toko obat itu untuk mencuri obat bagi istrinya.

Cerita ini adalah salah satu dari sebelas cerita yang dikembangkan oleh Kohlberg untuk menginvestigasi hakekat pemikiran moral. Setelah membaca cerita, anak-anak menjadi responden menjawab serangkaian pertanyaan tentang dilema moral. Haruskah Heinz mencuri obat? Apakah mencuri obat tersebut benar atau salah? Mengapa? Apakah tugas suami untuk mencuri obat bagi istrinya kalau ia tidak mendapatkannya dengan cara lain? Apakah apoteker memiliki hak untuk mengenakan harga semahal itu walaupun tidak ada suatu aturan hukum yang

membatasi harga? Mengapa atau mengapa tidak?. Berdasarkan penalaran tersebut, Kohlberg kemudian mengkategorisasi dan mengklasifikasi respon yang dimunculkan ke dalam enam tahap yang berbeda.[2] Keenam tahapan tersebut dibagi ke dalam tiga tingkatan: pra-konvensional, konvensional, dan pasca-konvensional.

Teorinya didasarkan pada tahapan perkembangan konstruktif, setiap tahapan dan tingkatan memberi tanggapan yang lebih memenuhi syarat terhadap dilema-dilema moral dibanding tahap/tingkat sebelumnya:

a. Tingkat Moralitas Pra-Konvensional

Penalaran pra-konvensional adalah tingkat yang paling rendah dalam teori perkembangan moral Kohlberg. Pada tingkat ini, anak tidak memperlihatkan internalisasi nilai-nilai moral, penalaran moral dikendalikan oleh imbalan (hadiah) dan hukuman eksternal. Seperti dalam tahap heteronomous Piaget, anak-anak menerima aturan figur otoritas, dan tindakan yang dinilai oleh konsekuensi mereka. Perilaku yang mengakibatkan hukuman dipandang sebagai buruk, dan mereka yang mengarah pada penghargaan dilihat sebagai baik. Tingkat pra-konvensional dari penalaran moral umumnya ada pada anak-anak, walaupun orang dewasa juga dapat menunjukkan penalaran dalam tahap ini. Seseorang yang berada dalam tingkat pra-konvensional menilai moralitas dari suatu tindakan berdasarkan konsekuensinya langsung. Tingkat pra-konvensional terdiri dari dua tahapan awal dalam perkembangan moral, dan murni melihat diri dalam bentuk egosentris:

Tahap 1: Orientasi kepatuhan dan hukuman.

Orientasi hukuman dan kepatuhan (punishment and obedience orientation) ialah tahap pertama dalam teori perkembangan moral Kohlberg. Pada tahap ini perkembangan moral didasarkan atas hukuman, seseorang memfokuskan diri pada konsekuensi langsung dari tindakan mereka yang dirasakan sendiri. Sebagai contoh, suatu tindakan dianggap salah secara moral bila orang yang melakukannya dihukum. Semakin keras hukuman diberikan

dianggap semakin salah tindakan itu. Sebagai tambahan, ia tidak tahu bahwa sudut pandang orang lain berbeda dari sudut pandang dirinya. Tahapan ini bisa dilihat sebagai sejenis otoriterisme. Anak-anak taat karena orang-orang dewasa menuntut mereka untuk taat. Anak-anak pada tahap ini sulit untuk mempertimbangkan dua sudut pandang dalam dilema moral. Akibatnya, mereka mengabaikan niat orang-orang dan bukan fokus pada ketakutan otoritas dan menghindari hukuman sebagai alasan untuk bersikap secara moral.

Tahap 2: Orientasi minat pribadi

Individualisme dan tujuan (individualism and purpose) ialah tahap kedua dalam teori perkembangan moral Kohlberg. Pada tahap ini penalaran moral didasarkan pada imbalan dan kepentingan diri sendiri. Anak-anak taat bila mereka ingin taat dan bila yang paling baik untuk kepentingan terbaik adalah taat. Apa yang benar adalah apa yang dirasakan baik dan apa yang dianggap menghasilkan hadiah. Anak-anak menyadari bahwa orang dapat memiliki perspektif yang berbeda dalam dilema moral, tetapi pemahaman ini adalah pada awalnya sangat konkret. Mereka melihat tindakan yang benar sebagai yang mengalir dari kepentingan diri sendiri. Timbal balik dipahami sebagai pertukaran yang sama nikmat –Anda melakukan ini untuk saya dan saya akan melakukannya untuk Anda.

b. Tingkat Moralitas Konvensional

Penalaran konvensional adalah tingkat kedua atau tingkat menengah dari teori perkembangan moral Kohlberg. Internalisasi individu pada tahap ini adalah menengah, seseorang mentaati standar-standar (internal) tertentu, tetapi mereka tidak mentaati standar-standar (internal) orang lain, seperti orang tua atau masyarakat. Pada tingkat konvensional, seseorang terus memperhatikan kesesuaian dengan aturan-aturan sosial yang penting, tetapi bukan karena alasan kepentingan diri sendiri. Mereka percaya bahwa aktif dalam memelihara sistem sosial saat ini memastikan hubungan manusia yang positif

dan ketertiban masyarakat. Tingkat konvensional umumnya ada pada seorang remaja atau orang dewasa. Orang di tahapan ini menilai moralitas dari suatu tindakan dengan membandingkannya dengan pandangan dan harapan masyarakat:

Tahap 3: Orientasi keserasian interpersonal dan konformitas (Sikap anak baik).

Norma-norma interpersonal (interpersonal norms) ialah tahap ketiga dalam teori perkembangan moral Kohlberg. Tahap penyesuaian dengan kelompok atau orientasi untuk menjadi –anak manis|. Pada tahap selanjutnya, terjadi sebuah proses perkembangan kearah sosialitas dan moralitas kelompok. Norma-norma interpersonal, pada tahap ini seseorang menghargai kebenaran, kepedulian, dan kesetiaan pada orang lain sebagai landasan pertimbangan-pertimbangan moral. Kesadaran dan kepedulian atas kelompok akrab, serta tercipta sebuah penilaian akan dirinya dihadapan komunitas/kelompok. Keinginan untuk mematuhi aturan karena mereka mempromosikan hubungan harmoni sosial muncul dalam konteks hubungan pribadi yang dekat.

Seseorang ingin mempertahankan kasih sayang dan persetujuan dari teman-teman dan kerabat dengan menjadi –orang baik|, bisa dipercaya, setia, menghormati, membantu, dan baik. Anak-anak sering mengadopsi standar-standar moral orang tuanya pada tahap ini. Sambil mengharapkan dihargai oleh orangtuanya sebagai seorang perempuan yang baik atau laki-laki yang baik, seseorang memasuki masyarakat dan memiliki peran sosial. Individu mau menerima persetujuan atau ketidaksetujuan dari orang-orang lain karena hal tersebut merefleksikan persetujuan masyarakat terhadap peran yang dimilikinya. Mereka mencoba menjadi seorang –anak baik| untuk memenuhi harapan tersebut, karena telah mengetahui ada gunanya melakukan hal tersebut. Penalaran tahap tiga menilai moralitas dari suatu tindakan dengan mengevaluasi konsekuensinya dalam bentuk hubungan interpersonal, yang mulai menyertakan hal seperti rasa hormat, rasa terimakasih. Keinginan untuk

mematuhi aturan dan otoritas ada hanya untuk membantu peran sosial yang stereotip ini.

Tahap 4: Orientasi otoritas dan pemeliharaan aturan sosial (Moralitas hukum dan aturan).

Moralitas sistem sosial (social system morality) ialah tahap keempat dalam teori perkembangan moral Kohlberg. Pada tahap ini, pertimbangan moral didasarkan atas pemahaman aturan sosial, hukum-hukum, keadilan, dan kewajiban. Pada kondisi ini dimana seseorang sudah mulai beranjak pada orientasi hukum legal/peraturan yang berfungsi untuk menciptakan kondisi yang tertib dan nyaman dalam kelompok/komunitas. Seseorang memperhitungkan perspektif yang lebih besar dari hukum masyarakat. pilihan moral tidak lagi tergantung pada hubungan dekat dengan orang lain. Sebaliknya, peraturan harus ditegakkan dengan cara sama untuk semua orang, dan setiap anggota masyarakat memiliki tugas pribadi untuk menegakkan mereka serta mematuhi hukum, keputusan, dan konvensi sosial karena berguna dalam memelihara fungsi dari masyarakat. Penalaran moral dalam tahap empat lebih dari sekedar kebutuhan akan penerimaan individual seperti dalam tahap tiga; kebutuhan masyarakat harus melebihi kebutuhan pribadi. Idealisme utama sering menentukan apa yang benar dan apa yang salah, seperti dalam kasus fundamentalisme. Bila seseorang bisa melanggar hukum, mungkin orang lain juga akan begitu, sehingga ada kewajiban atau tugas untuk mematuhi hukum dan aturan.

c. **Tingkat Moralitas Pasca-Konvensional**

Pada tingkat ini, moralitas benar-benar diinternalisasikan dan tidak didasarkan pada standar-standar orang lain. Seseorang mengenal tindakan moral alternatif, menjajaki pilihan-pilihan, dan kemudian memutuskan berdasarkan suatu kode moral pribadi. Seseorang pada tingkat pasca-konvensional bergerak di luar tidak perlu diragukan lagi dukungan untuk peraturan dan undang-undang masyarakat mereka sendiri. Mereka mendefinisikan moralitas dalam hal prinsip abstrak dan nilai-nilai yang berlaku untuk semua situasi dan masyarakat. Tingkatan pasca-konvensional, juga dikenal sebagai tingkat berprinsip, terdiri dari tahap lima dan enam dari perkembangan moral. Kenyataan bahwa individu-individu adalah entitas yang terpisah dari masyarakat kini menjadi semakin jelas. Perspektif seseorang harus dilihat sebelum perspektif masyarakat. Pada tingkat ini, moralitas benar-benar diinternalisasikan dan tidak didasarkan pada standar-standar orang lain. Seseorang mengenal tindakan-tindakan moral alternatif, menjajaki pilihan-pilihan, dan kemudian memutuskan berdasarkan suatu kode moral pribadi:

Tahap 5: Orientasi kontrak sosial.

Hak-hak masyarakat versus hak-hak individual (*community rights versus individual rights*) ialah tahap kelima dalam teori perkembangan moral Kohlberg. Pada tahap ini, seseorang memahami bahwa nilai-nilai dan aturan-aturan adalah bersifat relatif dan bahwa standar dapat berbeda dari satu orang ke orang lain, menyadari bahwa hukum penting bagi masyarakat, tetapi juga mengetahui bahwa hukum dapat diubah. Seseorang percaya bahwa beberapa nilai, seperti kebebasan, lebih penting daripada hukum. Seseorang dipandang sebagai memiliki pendapat dan nilai-nilai yang berbeda. Pada tahap ini penting bahwa mereka dihormati dan dihargai tanpa memihak. Permasalahan yang tidak dianggap sebagai relatif seperti kehidupan dan pilihan jangan sampai ditahan atau dihambat. Kenyataannya, tidak ada pilihan yang pasti benar atau absolut _memang anda siapa membuat keputusan kalau yang lain tidak?_. Sejalan dengan itu, hukum dilihat sebagai kontrak sosial dan bukannya

keputusan kaku. Aturan-aturan yang tidak mengakibatkan kesejahteraan sosial harus diubah bila perlu demi terpenuhinya kebaikan terbanyak untuk sebanyak-banyaknya orang. Hal tersebut diperoleh melalui keputusan mayoritas, dan kompromi. Dalam hal ini, pemerintahan yang demokratis tampak berlandaskan pada penalaran tahap lima. Seseorang menganggap hukum dan aturan sebagai instrumen yang fleksibel untuk melanjutkan tujuan manusia. Mereka dapat membayangkan alternatif tatanan sosial mereka, dan mereka menekankan prosedur yang adil untuk menafsirkan dan mengubah hukum. Ketika hukum konsisten dengan hak-hak individu dan kepentingan mayoritas setiap orang mengikuti mereka karena orientasi partisipasi kontrak sosial bebas dan bersedia dalam sistem karena membawa lebih baik bagi orang-orang dari pada jika tidak ada.

Tahap 6: Prinsip etika universal.

Prinsip etis universal (*universal ethical principles*) ialah tahap keenam dan tertinggi dalam teori perkembangan moral Kohlberg. Pada tahap tertinggi, tindakan yang benar didefinisikan sendiri, prinsip-prinsip etis yang dipilih dari hati nurani yang berlaku untuk semua umat manusia, tanpa hukum dan kesepakatan sosial. Penalaran moral berdasar pada penalaran abstrak menggunakan prinsip etika universal. Bila menghadapi konflik secara hukum dan suara hati, seseorang akan mengikuti suara hati, walaupun keputusan itu mungkin melibatkan resiko pribadi. Hukum hanya valid bila berdasar pada keadilan, dan komitmen terhadap keadilan, juga menyertakan keharusan untuk tidak mematuhi hukum yang tidak adil. Hak tidak perlu sebagai kontrak sosial dan tidak penting untuk tindakan moral deontis. Keputusan dihasilkan secara kategoris dalam cara yang absolut dan bukannya secara hipotetis secara kondisional. Hal ini bisa dilakukan dengan membayangkan apa yang akan dilakukan seseorang saat menjadi orang lain, yang juga memikirkan apa yang dilakukan bila berpikiran sama. Tindakan yang diambil adalah hasil konsensus, dengan cara ini tindakan tidak pernah menjadi cara tapi selalu

menjadi hasil; seseorang bertindak karena hal itu benar, dan bukan karena ada maksud pribadi, sesuai harapan, legal, atau sudah disetujui sebelumnya.[3]

Teori perkembangan moral yang dikemukakan Kohlberg seperti halnya Piaget menunjukkan bahwa sikap dan perilaku moral bukan hasil sosialisasi atau pelajaran yang diperoleh dari kebiasaan yang berhubungan dengan nilai kebudayaan semata-mata. Tetapi juga terjadi sebagai akibat dari aktivitas spontan yang dipelajari dan berkembang melalui interaksi sosial anak dengan lingkungannya.

Kohlberg percaya bahwa ketiga tingkat dan keenam tahap tersebut terjadi dalam suatu urutan dan berkaitan dengan usia:

- (1) Sebelum usia 9 tahun, kebanyakan anak-anak berpikir tentang dilema moral dengan cara yang prakonvensional.
- (2) Pada awal masa remaja, mereka berpikir dengan cara-cara yang lebih konvensional.
- (3) Pada awal masa dewasa, sejumlah kecil orang berpikir dengan cara-cara yang pasca konvensional.

4. Kelemahan dan kelebihan teori Lawrence Kohlberg

a. Kelemahan:

Teori Kohlberg dikritik karena memberi terlalu banyak penekanan pada penalaran moral dan kurang memberi penekanan pada perilaku moral. Penalaran moral kadang-kadang dapat menjadi tempat perlindungan bagi perilaku immoral. Seperti para penipu, koruptor, dan pencuri mungkin mengetahui apa yang benar, tetapi masih melakukan apa yang salah.

Kebudayaan dan Perkembangan Moral: Kritik lain terhadap pandangan Kohlberg ialah bahwa pandangan ini secara kebudayaan bisa Suatu tinjauan penelitian terhadap perkembangan moral di 27 Negara menyimpulkan bahwa penalaran moral lebih bersifat spesifik kebudayaan daripada yang dibayangkan oleh Kohlberg dan bahwa sistem skor Kohlberg tidak mempertimbangkan penalaran moral tingkattinggi pada

kelompok-kelompok kebudayaan tertentu. Penalaran moral lebih dibentuk oleh nilai-nilai dan keyakinan-keyakinan suatu kebudayaan daripada yang dinyatakan oleh Kohlberg.

Gender dan Perspektif Keperdulian: Carol Gilligan percaya bahwa teori perkembangan moral Kohlberg tidak mencerminkan secara memadai relasi dan kepedulian terhadap manusia lain. Perspektif keadilan (justice perspective) ialah suatu perspektif moral yang berfokus pada hak-hak individu; individu berdiri sendiri dan bebas mengambil keputusan moral. Teori Kohlberg ialah suatu perspektif keadilan. Sebaliknya, perspektif kepedulian (care perspective) ialah suatu perspektif moral yang memandang manusia dari sudut keterkaitannya dengan manusia lain dan menekankan komunikasi interpersonal, relasi dengan manusia lain, dan kepedulian terhadap orang lain. Teori Gilligan ialah suatu perspektif kepedulian. Menurut Gilligan, Kohlberg kurang memperhatikan perspektif kepedulian dalam perkembangan moral. Ia percaya bahwa hal ini mungkin terjadi karena Kohlberg seorang laki-laki, karena kebanyakan penelitiannya adalah dengan laki-laki daripada dengan perempuan, dan karena ia menggunakan respons laki-laki sebagai suatu model bagi teorinya.

Altruisme: Altruisme ialah suatu minat yang tidak mementingkan diri sendiri dalam menolong seseorang. Timbal balik dan pertukaran (reciprocity and exchange) terlibat dalam altruisme. Timbal balik ditemukan di seluruh dunia manusia. Timbal balik mendorong anak-anak untuk berbuat baik kepada orang lain sebagaimana mereka mengharapkan orang lain berbuat yang sama kepada mereka. Sentimen-sentimen manusia disarikan dalam timbal balik ini. Barangkali kepercayaan adalah prinsip yang paling penting dalam jangka panjang dalam altruisme. Rasa bersalah dapat muncul di permukaan kalau anak tidak membalas (melakukan timbal balik), dan kemarahan dapat terjadi kalau seseorang tidak melakukan timbal balik. Tidak semua altruisme dimotivasi oleh timbal balik dan pertukaran, tetapi interaksi dan reaksi dengan orang lain dapat

menolong kita memahami hakekat altruisme. Keadaan-keadaan yang paling mungkin melibatkan altruisme ialah emosi yang empatik terhadap seseorang yang mengalami kebutuhan atau suatu relasi yang erat antara dermawan dan penerima derma. William Damon menggambarkan suatu urutan perkembangan altruisme anak-anak, khususnya berbagi (*sharing*). Hingga usia 3 tahun, berbagi dilakukan karena alasan-alasan yang nonempatis; pada kira-kira 4 tahun, kombinasi kesadaran empatik dan dukungan orang dewasa menghasilkan suatu rasa kewajiban untuk berbagi; pada tahun-tahun awal sekolah dasar, anak-anak mulai secara sungguh-sungguh memperlihatkan gagasan-gagasan yang lebih obyektif tentang keadilan. Pada masa ini prinsip keadilan mulai dipahami; pada tahun-tahun pertengahan akhir sekolah dasar, prinsip-prinsip prestasi dan kebajikan dipahami.[4]

5. Implikasinya bagi pendidikan

Pendidikan saat ini umumnya mempersiapkan peserta didik memiliki banyak pengetahuan, tetapi tidak tahu cara memecahkan masalah tertentu yang dihadapi dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari. Pendidikan lebih mempersiapkan peserta didik untuk menjadi anak yang pandai dan cerdas, tetapi kurang mempersiapkan peserta didik untuk menjadi anak yang baik. Masalah berkenaan dengan baik dan buruk menjadi kajian bidang moral.

Demikian juga dalam mengembangkan aspek moral peserta didik berarti bagaimana cara membantu peserta didik untuk menjadi anak yang baik, yang mengetahui dan berperilaku atau bersikap berbuat baik dan benar. Sikap dan perilaku moral dapat dikembangkan melalui pendidikan dan penanaman nilai/norma yang dilakukan secara terintegrasi dalam pelajaran maupun kegiatan yang dilakukan anak di keluarga dan sekolah. Pendidikan bukan hanya mempersiapkan anak menjadi manusia cerdas, tetapi juga menjadi manusia yang baik, berbudi luhur, dan berguna bagi orang lain.[5]

Pengembangan moral melalui pendidikan mestinya bukan hanya mengajarkan nilai-nilai sebagai slogan saja. Hal ini tampak pada moral yang

diyakini penganut dan moral budaya yang diterima warga masyarakat. Proses pendidikan dan pembelajaran moral diteladankan orang tua dan dilakukan secara terpadu (integrated) pada tiap peluang dalam semua kegiatan sekolah. Disana pendidik mengajarkan keterampilan hidup, disiplin serta melatih dan membiasakan peserta didik bermoral dalam perilaku dan kegiatannya. Otoritas mendukung berbagai kegiatan pengembangan moral warga masyarakat sebagai bagian upaya membangun karakter manusia Indonesia seutuhnya. Cara yang ideal adalah dengan memantapkan Pancasila melalui keteladanan pendidik pada umumnya kepada warga bangsa sebagai peserta didik sepanjang hayat. Disini berproses pembangunan watak bangsa.[6]

6. Kesimpulan

Dari uraian makalah di atas maka dapat disimpulkan bahwa ada 6 Tahap perkembangan moral Kohlberg yang terbagi menjadi 3 tingkatan, yakni:

Tingkat 1: Prakonvensional. Tingkat ini dibagi menjadi dua tahap:

- a. Tahap orientasi terhadap kepatuhan dan hukuman
- b. Tahap relativistik –instrument

Tingkat 2 : Konvensional. Pada tingkat ini juga dibagi menjadi 2 tahapan:

- a. Tahap orientasi mengenai anak yang baik.
- b. Tahap mempertahankan norma sosial dan otoritas.

Tingkat 3: Pasca konvensional, otonom atau berlandaskan prinsip. Pada tingkat ini anak mematuhi aturan untuk menghindari hukuman kata hatinya. Tingkat ini juga terdiri dari dua tahap yaitu:

- a. Tahap orientasi terhadap perjanjian antara dirinya dengan lingkungan sosial.
- b. Tahap prinsip etika universal.

DAFTAR PUSTAKA

- Crain, William . 2007. *Teori Perkembangan*, Cetakan I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Makmun. Abi syamsudin. 2005. *Psikologi Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Syah. Muhibbin. 2000. *Psikologi Pendidikan Dengan Pendekatan Baru*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.

MODUL V

ALIRAN FILSAFAT MORAL TEORI TELEOLOGI

1. Pengertian Teori Etika

Untuk memahami apa itu etika sesungguhnya kita perlu membandingkannya dengan moralitas. Baik etika dan moralitas sering dipakai secara dipertukarkan dengan pengertian yang sering disamakan begitu saja. Ini sesungguhnya tidak sepenuhnya salah. Hanya saja perlu diingat bahwa etika bisa saja punya pengertian yang sama sekali berbeda dengan moralitas. Sehubungan dengan itu, secara teoritis kita dapat membedakan dua pengertian etika—kendati dalam penggunaan praktis sering tidak mudah dibedakan. Pertama, etika berasal dari kata Yunani *ethos*, yang dalam bentuk jamaknya berarti –adat istiadat‡ atau –kebiasaan‡. Dalam pengertian ini etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, baik pada diri seseorang maupun pada suatu masyarakat atau kelompok masyarakat. Ini berarti etika berkaitan dengan nilai nilai, tata cara hidup yang baik, aturan hidup yang baik, dan segala kebiasaan yang dianut dan diwariskan dari satu orang ke orang lain secara turun menurun. Yang menarik disini, dalam pengertian etika ini justru persis sama dengan pengertian moralitas.

Moralitas berasal dari kata Latin (*mos*), yang dalam bentuk jamaknya adalah –adat istiadat‡ atau –kebiasaan‡. Jadi dalam pengertian pertama ini etika dan moralitas sama-sama berarti sistem nilai tentang bagaimana manusia harus hidup dengan baik yang telah diinstitutionalisasikan dalam sebuah adat kebiasaan yang berwujud pada pola perilaku dan terulang dalam kurun waktu yang lama sebagaimana kebiasaan.

Kedua, etika juga dipahami dalam pengertian yang sekaligus berbeda dengan moralitas. Dalam pengertian kedua ini, etika mempunyai pengertian yang jauh lebih luas dari moralitas dan etika seperti pengertian yang pertama. Etika dalam pengertian kedua ini dimengerti sebagai filsafat moral, atau ilmu yang membahas dan mengkaji nilai dan norma yang diberikan oleh moralitas dan etika dalam pengertian pertama. Dengan demikian sebagaimana halnya

moralitas,berisikan nilai dan norma-norma konkret yang menjadi pedoman dan pegangan hidup manusia dalam seluruh kehidupannya.

Sebaliknya dalam pengertian kedua ini yaitu sebagai filsafat moral tidak langsung memberi perintah konkret sebagai pegangan siap pakai dengan demikian dapat disimpulkan etika sebagai refleksi kritis dan rasional mengenai (a) nilai dan norma yang menyangkut bagaimana manusia harus hidup baik;dan (b)masalah kehidupan manusia dengan mendasarkan diri pada nilai dan norma moral yang umum diterima.

2. Pengertian Etika Menurut Para Ahli

- a. Menurut Drs.O.P.Simorangkir: Etika atau etik dapat diartikan sebagai pandangan manusia dalam berperilaku menurut ukuran dan nilai baik.
- b. Menurut Maryani dan Ludiggo: Etika adalah seperangkat aturan atau norma atau pedoman yang mengatur perilaku manusia,baik yang harus dilakukan maupun yang harus ditinggalkan yang dianut oleh sekelompok atau segolongan masyarakat atau profesi.
- c. c.Menurut Drs.H.Burhannudin Salam: Etika merupakan cabang filsafat yang berbicara mengenai nilai dan norma yang menentukan perilaku manusia dalam hidupnya.
- d. Menurut Brooks: Etika adalah cabang dari filsafat yang menyelidiki penilaian normatif tentang apakah perilaku ini benar atau apa yang seharusnya dilakukan. Kebutuhan akan etika muncul dari keinginan untuk menghindari permasalahan di dunia nyata.

3. Aliran-Aliran filsafat Moral

Ukuran baik buruk perbuatan manusia dibicarakan dalam filsafat moral/etika.

berikut penjelasan aliran-aliran filsafat moral :

a. IDEALISME

Menurut aliran idealisme baik buruknya perbuatan manusia tergantung dari cara pandang orang itu sendiri. Jika yang dipikirkan adalah kebaikan maka akan diwujudkan dalam perbuatan yang baik. Begitu juga sebaliknya.

b. HEDONISME

Aliran hedonisme berakar pada pemikiran filsafat Yunani. Menurut paham ini perbuatan baik adalah perbuatan yang banyak mendatangkan kelezatan, kenikmatan, dan kepuasan nafsu. Dan suatu perbuatan dikatakan buruk apabila mendatangkan penderitaan. Aliran HEDONISME dibagi 2 yaitu EGOISTIK (kepuasan diri sendiri) dan UNIVERSALISTIK (untuk sesama manusia).

c. EUDAEMONISME

Menurut aliran eudaemonisme suatu tindakan dikatakan baik apabila mendatangkan kebahagiaan bagi diri sendiri maupun orang lain. Begitu juga sebaliknya.

d. UTILITARISME

Menurut aliran utilitarisme perbuatan manusia dinilai baik apabila memberikan manfaat bagi orang lain. Dan dinilai buruk apabila memberikan kerugian bagi orang lain.

e. DEONTOLOGI

Dalam aliran deontologi lebih menekankan kewajiban manusia untuk bertindak baik.

f. TELEOLOGI

Menurut aliran teleologi ukuran baik buruk perbuatan manusia ada pada tujuannya. Selama tujuannya baik apapun perbuatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan itu akan maka akan tetap dinilai baik.

4. Teori Teleologi

Teleologi adalah Mengukur baik buruknya suatu tindakan berdasarkan tujuan yang mau dicapai dengan tindakan itu, atau berdasarkan akibat yang ditimbulkan oleh tindakan itu. Teleologi merupakan sebuah studi tentang gejala-gejala yang memperlihatkan keteraturan, rancangan, tujuan, akhir, maksud, kecenderungan, sasaran, arah, dan bagaimana hal-hal ini dicapai dalam suatu proses perkembangan.

Dalam arti umum, teleologi merupakan sebuah studi filosofis mengenai bukti perencanaan, fungsi, atau tujuan di alam maupun dalam sejarah. Dalam bidang lain, teleologi merupakan ajaran filosofis-religius tentang eksistensi tujuan dan –kebijaksanaan| objektif di luar manusia

Berbeda dengan etika deontologi, etika teleologi justru menilai baik buruknya suatu tindakan berdasarkan tujuan yang mau dicapai dengan tindakan itu, atau berdasarkan akibat yang ditimbulkan oleh tindakan itu. Suatu tindakan dinilai baik jika bertujuan mencapai sesuatu yang baik, atau jika akibat yang ditimbulkan oleh tindakan itu baik. Baik atau buruk nya tindakan mencuri, sebagai contoh, bagi etika teleologi tidak ditentukan oleh tindakan itu sendiri baik atau buruk, melainkan ditentukan oleh tujuan dan akibat dari tindakan itu. Jika tujuannya baik, maka tindakan mencuri dapat dipandang baik.

Seorang anak yang mencuri uang karena tidak mempunyai cara lain untuk membeli obat bagi ibunya yang sedang sakit parah dalam perspektif etika teleologi dipandang sebagai tindakan yang baik, tetapi jika ia mencuri untuk membeli narkoba atau keperluan tidak mulia lainnya, maka tindakan itu dinilai jahat. Contoh dari etika teleologi: Setiap agama mempunyai Tuhan dan kepercayaan yang berbeda-beda dan karena itu aturan yang ada di setiap agama pun berbeda-beda.

5. Tokoh Teori Etika Teleologi

a. Plato

Pandangan Plato tentang pencapaian hidup yang baik tidak lepas dari teorinya mengenai jiwa dan ide-ide. Untuk mencapai kebahagiaan, jiwa manusia harus sampai kepada dunia ide-ide. Hal ini hanya bisa terjadi dengan cara pengendalian rasio atau akal budi.

b. Aristoteles

Aristoteles menegaskan "kebahagiaan adalah sesuatu yang final, serba cukup pada dirinya, dan tujuan dari segala tindakan...". Dengan demikian, semua tindakan yang bertujuan untuk membahagiakan orang lain atau diri sendiri dikatakan dapat dikatakan sebagai sebuah tindakan yang baik.

c. Thomas Aquinas

Filsuf sekaligus teolog Thomas Aquinas menegaskan bahwa Allah adalah "tujuan" dari segala sesuatu. Dengan demikian, segala sesuatu yang berorientasi kepada Allah dikatakan "baik", dan segala sesuatu yang tertuju di luar Allah dikatakan "jahat".

6. Penggolongan Teori Etika Teleologi

Penggolongan Teori Etika Teleologi dibagi menjadi dua yaitu sebagai berikut:

a. Egoisme Etis

Egoisme merupakan motivasi untuk mempertahankan dan meningkatkan pandangan yang hanya menguntungkan diri sendiri. Egoisme berarti menempatkan diri di tengah satu tujuan serta tidak peduli dengan penderitaan orang lain, termasuk yang dicintainya atau yang dianggap sebagai teman dekat. Istilah lainnya adalah *-egois*. Teori egoisme atau egotisme diungkapkan oleh Friedrich Wilhelm Nietzsche yang merupakan pengkritik keras utilitarianisme dan juga kuat menentang teori Kemoralan Sosial. Teori egoisme berprinsip bahwa setiap orang harus bersifat keakuan, yaitu melakukan sesuatu yang bertujuan memberikan manfaat kepada diri sendiri. Selain itu, setiap perbuatan yang memberikan keuntungan merupakan perbuatan yang baik dan satu perbuatan yang

buruk jika merugikan diri sendiri. Kata *-egoismell* merupakan istilah yang berasal dari bahasa latin yakni *ego*, yang berasal dari kata Yunani kuno – yang masih digunakan dalam bahasa Yunani modern – *ego* (yang berarti *-dirill* atau *-Sayall*, dan *-isme*, digunakan untuk menunjukkan sistem kepercayaannya. Dengan demikian, istilah ini secara etimologis berhubungan sangat erat dengan *egoisme* filosofis. Inti pandangan *egoisme* adalah bahwa tindakan dari setiap orang pada dasarnya bertujuan untuk mengejar pribadi dan memajukan dirinya sendiri. Disini *Egoisme* masih dibedakan lagi menjadi dua yaitu *Hedonisme* dan *Eudaimonisme*. Yang dimaksud dengan *Hedonisme* adalah mencapai suatu tujuan dengan menghalalkan segala cara (mengorbankan hak dan kepentingan orang lain) untuk mendapatkan kenikmatan lahiriah diri sendiri. Dan *Eudaimonisme* adalah paham teleologis ini menegaskan bahwa tujuan akhir hidup manusia adalah kebahagiaan untuk menyingkirkan penderitaan.

b. *Utilitarianisme*

Berasal dari bahasa latin *utilis* yang berarti *-bermanfaatll*. Menurut teori ini suatu perbuatan adalah baik jika membawa manfaat, tapi manfaat itu harus menyangkut bukan saja satu dua orang melainkan masyarakat sebagai keseluruhan. Atau dapat disebut juga sebagai teori *'konsekuensialisme'*, kualitas moral ditentukan oleh konsekuensi atau akibat yang dibawakannya.[4] Jadi, baik atau buruknya sesuatu berdasarkan berguna atau tidaknya sesuatu bagi diri sendiri maupun orang lain. Dalam rangka pemikiran *utilitarianisme*, kriteria untuk menentukan baik buruknya suatu perbuatan adalah *-the greatest happiness of the greatest numberll*, kebahagiaan terbesar dari jumlah orang yang terbesar. Istilah teleologi dikemukakan oleh Christian Wolff, seorang filsuf Jerman abad ke-18. Dalam arti yang umum, Teleologi merupakan sebuah studi filosofis mengenai bukti perencanaan, fungsi, atau tujuan di alam maupun dalam sejarah yang akan dicapai. Dalam dunia etika, Teleologi bisa diartikan sebagai pertimbangan moral akan baik buruknya suatu tindakan

yang dilakukan. Namun dengan demikian, tujuan yang baik tetap harus diikuti dengan tindakan yang benar menurut hukum.[5]

c. Contoh Kasus 1:

Kasus perselingkuhan, ukuran baik buruk dari tindakan pekerja sosial bukan didasarkan kepada kepatuhannya menjalankan prinsip-prinsip etik semata. Namun, juga mempertimbangkan tentang keselamatan orang yang menjadi target balas dendam kilen. Jadi, dalam kasus ini prinsip kerahasiaan dan self-determination tidak selalu dianggap baik karena ditentukan oleh keselamatan orang lain sebagai dampak dari kasus tersebut.

d. Contoh Kasus 2:

Febri merupakan seorang yang berasal dari golongan sangat mampu. Febri mempunyai teman bernama Asep. Asep seorang anak Febri merupakan seorang yang berasal dari golongan sangat mampu. Febri mempunyai teman bernama Asep. Asep seorang anak pertama dan berasal dari keluarga tidak mampu, pekerjaan orang tuanya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan perut. Belum lagi saudara Asep banyak berjumlah 4 saudara. Walaupun begitu Asep mempunyai cita-cita tinggi yaitu ingin melanjutkan kuliah di perguruan tinggi ternama di luar negeri. Tetapi sayang, cita-citanya mesti terhalang oleh tingginya biaya yang mesti dikeluarkan. Febri tau hal ini dan ingin memberikan bantuan pada Asep. Tetapi Febri sadar keinginan tersebut terhalang oleh orang tuanya yang tidak bersedia meminjamkan karena keluarganya walaupun sangat mampu tapi sangat pelit. Alhasil, Febri berbohong pada orang tuanya dengan alasan yang Febri buat. Akhirnya Febri diberikan uang. Lalu ia memberi uang tersebut kepada Asep. Asep sangat berterimakasih karena berkat bantuan yang diberikan cita-cita Asep dapat tercapai. Berbohong merupakan perbuatan yang buruk. Tetapi, akibatnya adalah kebaikan, kenapa dikatakan sebagai kebaikan karena berbohong untuk membantu orang yang tidak mampu.

Kesimpulan

Dalam era globalisasi filsafat moral keberadaannya sangat penting, sebab filsafat moral dapat menginspirasi dan mendorong manusia untuk berpikir dan menerapkan kebaikan atau berperilaku bermoral dalam kehidupannya. Untuk menciptakan generasi muda bermoral yang berani mengambil keputusan dengan pertimbangan moral khususnya pelajar diperlukan strategi diantaranya adalah penerapan model pembelajaran *Moral Reasoning* (perkembangan moral) dalam pembelajaran di kelas. Teleologi yaitu mengukur baik buruknya sesuatu tindakan berdasarkan tujuan yang mau dicapai dengan tindakan itu, atau berdasarkan akibat yang ditimbulkan oleh tindakan itu.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Sukrisno, Ardana, I cenik. Etika Bisnis dan Profesi: Tantangan membangun manusia seutuhnya. 2014. Jakarta : Salem
- Dr. Amril M. MA, Etika Islam; Telaah Pemikiran Filsafat Moral Raghif Al-Ishafani, Cet.1 (Pekanbaru: Pustaka Pelajar, 2002).
- Fu'ad Farid Ismail & Abdul Hamid Mutawalli, Cara Mudah Belajar Filsafat : Barat Dan Islam, cet . I (Jogjakarta, IRCiSoD, 2012).

MODUL VI

ALIRAN FILSAFAT MORAL TEORI DEONTOLOGI

1. Teori Deontologi

Teori Deontologi yaitu: berasal dari bahasa Yunani, –Deon— berarti tugas dan –logosl berarti pengetahuan. Sehingga Etika Deontologi menekankan kewajiban manusia untuk bertindak secara baik. Suatu tindakan itu baik bukan dinilai dan dibenarkan berdasarkan akibatnya atau tujuan baik dari tindakanyang dilakukan, melainkan berdasarkan tindakan itu sendiri sebagai baik pada diri sendiri. Dengan kata lainnya, bahwa tindakan itu bernilai moral karena tindakan itu dilaksanakan terlepas dari tujuan atau akibat dari tindkan itu. Contoh: jika seseorang diberi tugas dan melaksanakanny sesuai dengan tugas maka itu dianggap benar, sedang dikatakan salah jika tidak melaksanakan tugas.

Teori ini menafikan konsep Teori Teleologikal karena golongan deontologist ini ialah golongan yang tidak percaya dengan akibat. Teori ini menegaskan bahwa betul atau salahnya sesuatu tindakan itu tidak berdasarkan atau ditentukan oleh akibat-akibat tindakan tersebut. Mengikut teori ini, nilai moral suatu tindakan tidak boleh dinilai ke atas kesudahannya iaitu hasil atau kebaikan yang akan didapati kerana kesudahan sesuatu tindakan adalah tidak jelas dan tidak dapat ditentukan hasilnya semasa tindakan tersebut dibuat tetapi bergantung pada niat seseorang itu yang membuat keputusan atau melakukan tindakan.

Immanuel Kant, seorang ahli falsafah German (1724-1804) yang pernah mengajar di University of Konigsberg di bahagian barat Rusia merupakan seorang ahli falsafah yang sering dikaitkan dengan Teori Deontologikal ini. Hal ini kerana, beliau percaya bahawa apa yang memberi nilai moral kepada sesuatu tindakan bukan akibatnya kerana akibat-akibat tindakan kita tidak sentiasa berada di bawah kawalan kita tetapi motif atau niat tindakan kita adalah di bawah kawalan kita. Oleh itu, kita harus bertanggungjawab secara moral atas motif kita untuk membuat kebaikan atau keburukan.

2. Aspek-aspek Teori Deontologi

Teori Deontologikal ini terbagi kepada dua aspek yaitu deontologikal tindakan (eksistensialisme) dan deontologikal peraturan (prinsip kewajiban). Eksistensialisme bermaksud kebebasan moral bertindak tanpa amanah, paksaan dan larangan iaitu merangkumi aspek kebebasan; kebebasan jasmani, kebebasan kehendak dan kebebasan moral. Eksistensialisme berasal daripada perkataan existent yang bermaksud wujud atau ada. Deontologikal tindakan ini dipelopori oleh Jean Paul Satre yang menekankan kebebasan iaitu manusia bebas memilih tindakannya. Individu bebas buat pilihan atau keputusan moral dan tidak membenarkan pilihan atau keputusannya dipengaruhi orang lain.

Eksistensialisme juga dikaitkan dengan pilihan moral (First Hand Choice) iaitu membuat pilihan terus dari akal rasional berdasarkan kepada sesuatu keputusan moral yang sentiasa berubah, tidak universal, bersifat subjektif, tidak mutlak, tidak kekal dan individualistik. Contohnya, seseorang individu tidak dilahirkan terus untuk menjadi guru, tetapi merupakan pilihan individu tersebut untuk menjadi guru atau pekerjaan lain. Begitu juga dengan pelaksanaan tindakan lain oleh seseorang yang dirasakan yakin dan betul untuk dilaksanakan. Aspek ini mementingkan kebebasan individu untuk memilih tanpa dipengaruhi oleh faktor lain tetapi masih dalam konteks rasional membuat pemilihan.

Prinsip kewajiban pula membawa maksud sesuatu tindakan dianggap bermoral jika dilakukan dengan kerelaan hati atau tanggungjawab yang diakui. Arti kata lain, prinsip ini menegaskan tanggungjawab dilaksanakan semata-mata karena amalan itu merupakan kewajiban. Sebagai contoh, menunaikan janji yang telah dikotakan. Seorang ayah yang telah berjanji akan memberi hadiah atau ganjaran kepada anaknya sekiranya berjaya di dalam peperiksaan, perlu menunaikan janjinya. Jika tidak si anak akan hilang kepercayaan terhadap ayahnya dan berputus asa untuk meneruskan kejayaannya kerana janji yang dikotakan tidak dilaksanakan. Bagi mengambil sesuatu tindakan bermoral, kita perlu mempraktikkan formula berikut:

$$\text{Kebebasan} + \text{Keadilan} + \text{Kebijaksanaan} + \text{Pilihan (rujukan Maxim)} = \text{Tindakan Bermoral.}$$

Tekad baik dapat diterangkan lebih jelas dengan tindakan manusia dalam melakukan tugas dan tanggungjawabnya semata-mata kerana desakan nilai dalaman yang dipanggil *'good will'* atau tekad baik dan bukan disebabkan oleh motif-motif lain seperti ganjaran, hukuman atau tekanan. Jika seseorang melakukan tugas dan tanggungjawabnya disebabkan keseronokan, simpati atau kasihan tetapi bukan disebabkan *'good will'*, maka tindakannya dikatakan tidak mempunyai nilai moral walaupun mendapat sanjungan dan pujian.

Prinsip kewajipan terbagi kepada dua kategori iaitu *categorical imperative* (perintah mutlak) dan *practical imperative*. *Categorical imperative* atau perintah mutlak menerangkan perintah yang wujud tanpa sebarang pengecualian atau syarat-syarat. Terdapat tiga prinsip utama dalam perintah mutlak ini iaitu prinsip tersebut mestilah diterima secara umum, dapat menghormati manusia dan pihak yang bertanggungjawab sanggup diperlakukan sedemikian sekiranya dia berada dalam kedudukan teraniaya. *Practical imperative* (*Praktikal Imperatif*) menyatakan bahawa kemanusiaan hendaklah sentiasa menjadi matlamat dan bukan alat perlakuan individu. Malah, kemanusiaan adalah suatu nilai intrinsik manusia.

Contoh yang berkaitan dengan kehidupan seharian yang boleh dikaitkan dengan *categorical imperative* atau perintah mutlak ialah situasi semasa peperiksaan. Ramai yang mengetahui meniru atau menipu di dalam peperiksaan merupakan satu tindakan yang salah, namun atas sifat mementingkan diri dan ingin mencapai kejayaan dengan mudah masih ramai yang berani meniru atau menipu di dalam peperiksaan. Perlakuan ini akan sentiasa dihina kerana ia merupakan satu perbuatan yang tidak adil bagi individu yang jujur dan berusaha untuk mencapai kejayaan.

Hasil daripada pembacaan dan pemahaman saya berkaitan Teori Deontologikal ini, dapat saya ulaskan bahwa setiap tindakan yang dilakukan diletakkan atas niat, tujuan dan motif, bukan pada apa yang dilakukannya atau kesan dan akibat hasil daripada tindakannya. Setiap tindakan yang diambil akan mempunyai nilai moral yang baik jika dilakukan atas kerelaan hati dan motif tindakannya ialah satu tanggungjawab kepada masyarakat bukan kerana paksaan

atau desakan. Sekiranya disebabkan desakan atau paksaan, tindakan tersebut mempunyai nilai moral yang buruk. Selain itu, setiap tindakan yang dianggap betul dari segi moral tidak dianggap memadai jika dilakukan semata-mata untuk kepentingan diri. Contohnya seperti menderma, menderma merupakan satu tindakan yang baik dan setiap individu digalakkan untuk menderma. Menderma juga dikatakan salah satu tindakan yang bermoral dan mempunyai nilai yang baik jika dilakukan dengan penuh keikhlasan serta kerelaan hati penderma. Namun, menderma masih menjadi tindakan bermoral tetapi mempunyai nilai yang buruk jika berlaku desakan yang memaksa penderma untuk menderma.

2.1 Pengertian Etika Deontologi

Etika berasal dari kata Yunani *ethos*, yang dalam bentuk jamaknya (*ta etha*) berarti *‘adat istiadat’* atau *‘kebiasaan’*. Dalam pengertian ini, etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, baik pada diri seseorang maupun pada suatu masyarakat atau kelompok masyarakat. Ini berarti etika berkaitan dengan nilai-nilai, tata cara hidup yang baik, aturan hidup yang baik, dan segala kebiasaan yang dianut dan diwariskan dari satu orang ke orang yang lain atau dari satu generasi ke generasi yang lain. Kebiasaan ini lalu terungkap dalam perilaku berpola yang terus berulang sebagai sebuah kebiasaan.

Yang menarik di sini, dalam pengertian ini etika justru persis sama dengan pengertian moralitas. Moralitas berasal dari kata Latin *mos*, yang dalam bentuk jamaknya (*mores*) berarti *‘adat istiadat’* atau *‘kebiasaan’*. Jadi, dalam pengertian pertama ini, yaitu pengertian harfiahnya, etika dan moralitas, sama-sama berarti sistem nilai tentang bagaimana manusia harus hidup baik sebagai manusia yang telah diinstitutionalisasi dalam sebuah adat kebiasaan yang kemudian terwujud dalam pola perilaku yang ajeg dan terulang dalam kurun waktu yang lama sebagaimana baiknya sebuah kebiasaan.

Etika dapat dirumuskan sebagai refleksi kritis dan rasional mengenai nilai dan norma yang menyangkut bagaimana manusia harus hidup baik sebagai

manusia, dan mengenai masalah-masalah kehidupan manusia dengan mendasarkan diri pada nilai dan norma-norma moral yang umum diterima.

Teori Etika Deontologi

Etika deontologis atau deontologi adalah pandangan etika normative yang menilai moralitas suatu tindakan berdasarkan kepatuhan pada peraturan. Etika ini kadang-kadang disebut etika berbasis "kewajiban" atau "obligasi" karena peraturan memberikan kewajiban kepada seseorang.

Istilah deontologi berasal dari kata Yunani *deon* yang berarti kewajiban. Yang menjadi dasar baik buruknya perbuatan adalah kewajiban. Pendekatan deontologi sudah diterima dalam konteks agama, sekarang merupakan juga salah satu teori etika yang terpenting. Contohnya : kewajiban seseorang yang memiliki dan mempecah agamanya, maka orang tersebut harus beribadah, menjalankan perintah dan menjauhi larangannya.

Istilah Deontologi berasal dari kata Yunani yang berarti *deon* (kewajiban) atau keharusan. Oleh karena itu etika deontologi menekankan kewajiban manusia untuk bertindak secara baik. Menurut perspektif deontologi, suatu tindakan itu baik bukanlah dinilai dan dibenarkan berdasarkan akibat atau tujuan baik dari tindakan itu, melainkan berdasarkan tindakan itu sendiri sebagai baik menurut dirinya sendiri. Maka tindakan itu bernilai moral/etis karena tindakan itu dilaksanakan berdasarkan kewajiban. Atas dasar pandangan demikian, etika deontologi sangat menekankan pentingnya motif, kemauan baik, kesadaran dan watak yang kuat dari para pelaku, terlepas dari akibat yang timbul dari perilaku para pelaku itu.

Dengan kata lain, suatu tindakan dianggap baik karena tindakan itu memang baik pada dirinya sendiri, sehingga merupakan kewajiban yang harus kita lakukan. Sebaliknya, suatu tindakan dinilai buruk secara moral sehingga tidak menjadi kewajiban untuk kita lakukan. Bersikap adil adalah tindakan yang baik, dan sudah kewajiban kita untuk bertindak demikian. Sebaliknya, pelanggaran terhadap hak orang lain atau mencurangi orang lain adalah tindakan yang buruk

pada dirinya sendiri sehingga wajib dihindari. Salah satu tokoh terkenal dari teori ini adalah Immanuel Kant (1734-1804) seorang filsuf Jerman abad 18.

Bagi Kant, Hukum Moral ini dianggapnya sebagai perintah tak bersyarat (imperatif kategoris), yang berarti hukum moral ini berlaku bagi semua orang pada segala situasi dan tempat. Perintah Bersyarat adalah perintah yang dilaksanakan kalau orang menghendaki akibatnya, atau kalau akibat dari tindakan itu merupakan hal yang diinginkan dan dikehendaki oleh orang tersebut. Perintah Tak Bersyarat adalah perintah yang dilaksanakan begitu saja tanpa syarat apapun, yaitu tanpa mengharapkan akibatnya, atau tanpa mempedulikan apakah akibatnya tercapai dan berguna bagi orang tersebut atau tidak.

Etika deontologi sangatlah menekankan perlunya *law and order* dalam kancah kehidupan bermasyarakat secara beradab yang hanya akan terjadi bila manusia itu memenuhi aturan: aturan Allah, alam, negara, dsb. Kesulitan yang membelit etika deontologis terletak dalam pengandaianya (asumsi) bahwa fakta itu sudahlah selaras dengan cita-cita, bahwa *das Sein* itu telah identik dengan *das Sollen*. Akibatnya, etika deontologis itu sering memberi kesan kaku, legalistik dan konservatif: melestarikan *status quo!* Misalnya, adalah benar bahwa manusia itu pada umumnya wajib taat kepada orang tuanya atau patuh pada hukum negaranya, namun bagaimana bila kebetulan orang tua itu adalah orang tua yang tirani atau negara itu adalah negara yang Zionistik serta rasialis.

Konsep Deontologi

- a) Sistem etika ini hanya menekankan suatu perbuatan di dasarkan pada wajib tidaknya kita melakukan perbuatan itu.
- b) Yang disebut baik dalam arti sesungguhnya hanyalah kehendak yang baik, semua hal lain di sebut baik secara terbatas atau dengan syarat. Contohnya: kesehatan, kekayaan, intelegensia, adalah baik jika digunakan dengan baik oleh kehendak manusia. Tetapi jika digunakan oleh kehendak jahat, semua hal itu menajdi jahat sekali.

- c) Kehendak menjadi baik, jika bertindak karena kewajiban. Kalau perbuatan dilakukan dengan suatu maksud atau motif lain, perbuatan itu tidak bisa disebut baik, walaupun perbuatan itu suatu kecendrungan atau watak baik.
- d) Perbuatan dilakukan berdasarkan kewajiban, bertindak sesuai dengan kewajiban di sebut legalitas. Dengan legalitas kita memenuhi norma hukum.

Prinsip Etika Deontologi

Ada tiga prinsip yg harus dipenuhi :

- a) Supaya tindakan punya nilai moral, tindakan ini harus dijalankan berdasarkan kewajiban.
- b) Nilai moral dari tindakan ini tidak tergantung pada tercapainya tujuan dari tindakan itu melainkan tergantung pada kemauan baik yang mendorong seseorang untuk melakukan tindakan itu, berarti walaupun tujuan tidak tercapai, tindakan itu sudah dinilai baik.
- c) Sebagai konsekuensi dari kedua prinsip ini, kewajiban adalah hal yang niscaya dari tindakan yang dilakukan berdasarkan sikap hormat pada hukum moral universal.

Pandangan kant :

- a) 1. Tidak ada didunia yg dianggap baik kecuali kemauan baik. Kepandaian bisa merugikan kalau tidak didasarkan pada kemauan baik.
- b) 2. Tindakan yg baik adalah tidak saja sesuai kewajiban, melainkan tindakan tindakan yg dijalankan demi kewajiban.

Dengan demikian, etika deontologi sama sekali tidak mempersoalkan akibat dari tindakan tersebut, baik atau buruk. Akibat dari suatu tindakan tidak pernah diperhitungkan untuk menentukan kualitas moral suatu tindakan. Hal ini akan membuka peluang bagi subyektivitas dari rasionalisasi yang menyebabkan kita ingkar akan kewajiban-kewajiban moral. Etika deontologi menekankan pentingnya motivasi, kemauan baik dan watak yg kuat dari para pelaku.

2.2 Kelebihan dan Kelemahan Deontologi

a. Kelebihan

- 1) Deontologi menempatkan yang hak menjadi prioritas atas yang baik, tapi tidak menganggap yang baik dan yang hak itu berbeda tingkatnya, melainkan keduanya komplementer.
- 2) Keadilan bukan masalah kebajikan atau kebaikan, melainkan masalah kewajiban.

b. Kelemahan

- 1) Dalam kehidupan sehari-hari ketika menghadapi situasi yang dilematis, etika deontologis tidak memadai untuk menjawab pertanyaan bagaimana saya harus bertindak dalam situasi konkret yang dilematis itu.
- 2) Ketika ada dua atau lebih kewajiban yang saling bertentangan, ketika kita harus memilih salah satu sambil melanggar yang lain, etika deontologis tidak banyak membantu karena hanya mengatakan: bertindaklah sesuai dengan kewajibanmu.

Kekuatan etika deontologis Kant

a. Memberi dasar kokoh bagi rasionalitas dan objektivitas kesadaran moral

Dengan menekankan bahwa prinsip moralitas bisa diturunkan secara apriori dari akalbudi murni dan tidak ditentukan baik oleh objek tindakan, oleh akibat-akibatnya, maupun oleh kepentingan-kepentingan subjek pelaku, maka etika deontologis Kant memberi dasar yang kokoh bagi rasionalitas dan objektivitas kesadaran moral. Seperti sudah pernah kita bicarakan, rasionalitas kesadaran moral menuntut bahwa penentuan benar salahnya tindakan atau baik buruknya kelakuan manusia itu bukan hanya perkara selera atau perasaan belaka dari orang yang memberi penilaian, melainkan bahwa itu berdasarkan suatu prinsip yang nalar (masuk akal). Keputusan moral itu bisa dan perlu dipertang-gungjawabkan sehingga kebenarannya dapat diuji oleh orang lain.

Objektivitas kesadaran moral juga dijamin oleh etika deontologis melawan arus subjektivisme dan relativisme, karena prinsip yang secara apriori diturunkan dari akalbudi murni itu prinsip yang berlaku umum dan mengikat secara mutlak setiap manusia sejauh ia makhluk yang berakalbudi (rasional).

- b. Memberi tolak ukur yang perlu dan penting untuk menilai moralitas suatu tindakan, yakni prinsip universalitas

Imperatif kategoris Kant sebagaimana dirumuskan di atas, kendati, seperti masih akan kita lihat di bawah, belum mencukupi sebagai tolak ukur penilaian moralitas tindakan, sudah memberi salah satu unsur yang memang perlu dan penting, yakni prinsip universalitas. Tindakan yang secara moral betul setidak-tidaknya mesti didasarkan atas prinsip yang tidak hanya berlaku untuk subjek pelaku tertentu dan pada waktu serta kondisi tertentu, melainkan pada prinsip yang bisa disetujui dan berlaku untuk semua orang di mana dan kapan saja mereka berada.

Kesulitan pokok etika deontologis Kant

- a. Tidak memberi tempat bagi adanya dilema moral dan tidak bisa memberi jalan keluar bila terjadi konflik prinsip moral.

Dilema moral adalah situasi ketika seorang pelaku S secara moral wajib untuk melakukan A dan sekaligus juga secara moral wajib untuk melakukan B, namun ia tak dapat melakukan keduanya sekaligus, entah karena dengan melakukan A itu berarti ia tidak melakukan B, atau karena keterbatasannya sebagai manusia tidak memungkinkan untuk melakukan keduanya sekaligus. Sebagai contoh misalnya dalam ceritera drama Sophocles yang berjudul Antigone, raja Creon menetapkan bahwa upacara penguburan untuk Polyneices kakak Antigone dianggap melawan hukum setempat yang melarang memberikan penghormatan terhadap seorang pengkianat seperti Polyneices.

Dengan demikian Antigone telah melanggar kewajibannya terhadap negara. Di lain pihak sebagai adik kandung Polyneices ia secara keagamaan dan kekeluargaan berkewajiban untuk melakukan upacara penguburan itu. Dalam cerita sendiri Antigone memilih untuk mengikuti kewajibannya yang kedua, tetapi sebenarnya kasus itu bisa merupakan contoh adanya dilemma moral. Etika deontologis Kant menganggap bahwa orang tidak mungkin terikat oleh dua kewajiban moral yang sama. Bagi Kant kalau Antigone wajib secara moral untuk melakukan upacara penguburan untuk kakaknya, ia tidak terikat oleh kewajiban moral untuk tunduk pada peraturan negara yang telah ditetapkan oleh rajanya. Menurut dia salah satu kewajiban itu pasti keliru. Dalam praktek hidup, halnya tidak sesederhana itu. Bahkan seandainya orang akhirnya terpaksa memilih salah satu, tetap dia merasa bahwa kewajibannya yang lain bukanlah hal yang begitu saja dapat diabaikan.

Karena etika deontologis Kant tidak memberi ruang pada adanya dilemma moral, maka ia juga tidak bisa memberi jalan keluar bila terjadi konflik prinsip moral. Misalnya, seorang dokter berdasarkan prinsip informed consent wajib secara moral memberitahukan kepada pasiennya apa yang menjadi penyakit dia sesungguhnya, sehingga ia perlu menjalani treatment tertentu. Akan tetapi pasien tersebut juga mengidap penyakit jantung dan ada kemungkinan besar bahwa pemberitahuan apa adanya mengenai penyakitnya akan menyebabkan dia terkejut dan malah mati mendadak. Dalam hal ini prinsip informed consent dan sekaligus prinsip larangan untuk berbohong, bertabrakan dengan prinsip hormat terhadap hidup manusia. Karena dalam sistem etika deontologis semua kewajiban moral mengikat setiap makhluk rasional secara mutlak, maka dalam kasus tersebut dokter berhadapan dengan suatu dilemma moral yang sulit dicari jalan keluarnya. Etika deontologis tidak memberi tempat bagi penentuan kewajiban kongkrit berdasarkan pertimbangan akibat tindakan.

- b. Kemutlakan norma tanpa kemungkinan pengecualian dengan mengindahkan akibat tindakan, sulit diterima

Teori etika deontologis tidak mengenal kekecualian; ada norma ada kewajiban yang mengikat mutlak; jadi harus dilaksanakan entah apa pun akibatnya. Kant misalnya memberi contoh bahwa orang wajib untuk mengatakan yang benar, meskipun dalam kasus ada seorang pembunuh bayaran yang mencari seseorang yang saya tahu di mana dia bersembunyi. Argumen dia yang mengatakan bahwa kalau kita berdusta dengan maksud untuk melindungi atau menyelamatkan nyawa orang itu lalu menunjuk suatu tempat lain, padahal kebetulan orang yang dimaksud tanpa sepengetahuan kita sudah pindah ke tempat yang kita tunjuk itu, sehingga si pembunuh tadi berhasil menemukan dan membunuh dia, kita salah dua kali: pertama melanggar kewajiban untuk berkata benar, dan yang kedua menyebabkan orang itu mati dibunuh. Sedangkan kalau kita mengatakan sebenarnya, andaikan orang itu lalu terbunuh, maka pembunuhan itu bukanlah karena kesalahan kita. Argumen ini rupanya tidak begitu meyakinkan.

- c. Imperatif kategoris Kant melulu formal, hingga tidak membantu mengerti kewajiban mana yang secara konkret mengikat seorang pelaku moral

Dengan mengembalikan semua norma norma kepada satu prinsip saja, yakni imperatif kategoris, Kant bisa menghindarkan diri dari adanya konflik norma, tetapi dia tidak berhasil untuk menunjukkan bagaimana dari satu norma dasar yang melulu bersifat formal itu dapat disimpulkan norma-norma material konkret yang wajib diikuti. Imperatif kategoris hanya menegaskan apa yang tidak boleh dilakukan (misalnya: jangan ingkar janji, jangan dusta, jangan bunuh diri etc.), bukan apa yang secara positif perlu dilakukan. Mengenai kegiatan-kegiatan apa yang harus dilakukan, tujuan-tujuan mana perlu dikejar, imperatif kategoris tidak memberi keterangan apa-apa.

Moralitas dalam hal ini lalu hanya menetapkan batas-batas ruang lingkup kegiatan hidup kita, tetapi tidak memberi arah. Imperatif kategoris Kant memberi tolok ukur untuk menguji benar tidaknya suatu kaidah tindakan, tetapi tidak membantu mengetahui dari mana seorang pelaku moral memperoleh kaidah yang mau diuji tersebut. Dengan demikian moralitas dalam teori etika Kant mengandaikan adanya suatu praktek moral yang sudah berlaku. Sebagaimana dikatakan oleh John Stuart Mill, para penganut etika deontologis sesungguhnya tidak bisa mengelakkan pentingnya akibat dari suatu tindakan untuk menentukan apakah tindakan itu baik atau buruk.

Para penganut etika deontologis secara diam-diam menutup mata terhadap pentingnya akibat suatu tindakan supaya bisa memperlihatkan pentingnya nilai suatu tindakan moral itu sendiri. Kant sendiri tidak mengabaikan pentingnya akibat suatu tindakan. Hanya saja, ia ingin menekankan pentingnya kita menghargai tindakan tertentu sebagai bermoral karena nilai tindakan itu sendiri, dan tidak terlalu terjebak dalam tujuan menghalalkan cara. Lebih dari itu, Kant ingin menekankan pentingnya hukum moral universal dalam hati kita masing-masing, sekaligus mencegah subyektivitas kita dalam bertindak secara moral. Tanpa itu, kita bisa bertindak secara berubah-ubah sesuai dengan konsekuensi yang ingin kita capai.

2.3 Kritik terhadap Teori Deontologi

a. Sistem moral Kant merupakan suatu etika yang suram dan kaku

Diberi kesan seolah-olah kita berkelakuan baik hanya jika semata-mata melakukan karena kewajiban, melawan kecenderungan spontan kita. Orang yang tanpa pamrih membaktikan seluruh tenaganya kepada anak-anak yatim piatu atau anak-anak cacat, patutlah kita anggap orang yang berkualitas moral tinggi. Tapi menurut Kant, bertindak karena cinta atau belas kasih berarti bertindak berdasarkan kecenderungan saja dan karena itu tidak bebas. Memang benar, perbuatan moral juga.

Tapi Kant di sini mempunyai pengertian terlalu sempit tentang kebebasan. Rupanya ia tidak mengenal kebebasan eksistensial, dan itu bentuk kebebasan yang justru paling cocok dan berharga bagi bidang moral. Dalam hal otonomi dan kebebasan, semua emosi tidak boleh disamakan. Dalam tingkah laku yang terhanyut oleh kemarahan, si pelaku memang bisa tidak bebas dalam arti tidak menentukan diri. Tetapi tingkah laku yang dijiwai oleh cinta sudah bisa berada pada taraf kebebasan lebih tinggi.

b. Perbuatan belum tentu baik, jika tujuannya atau konsekuensinya baik

-Tujuan tidak menghalalkan cara adalah prinsip deontologis yang mudah dapat disetujui. Namun, sulit juga untuk diterima bahwa tujuan dan konsekuensi bisa diabaikan begitu saja dalam menilai moralitas perbuatan kita. Tidak bisa disangkal, kadang-kadang tujuan dan konsekuensi dengan jelas berdampak atas kualitas moral perbuatan. Andaikan situasi sebagai berikut. Dalam keadaan perang negara kita diduduki oleh musuh. Saya menyembunyikan di rumah saya seorang teman yang dicari oleh musuh. Jika ia jatuh dalam tangan mereka pasti ia dibunuh, biarpun belum pernah ia melakukan tindakan yang melanggar hukum. Pada suatu hari ada orang ketok pintu rumah saya. Seorang tentara musuh berdiri di situ dan bertanya apakah di rumah saya ada X (ia sebut nama teman saya). Saya tidak boleh berbohong, memang, tapi dengan mengatakan kebenaran akan saya celakakan teman saya yang tidak bersalah sedikit pun. Menurut Kant, dalam kasus seperti tadi, saya harus mengatakan yang benar. Jika orang lain menjadi korban kewajiban saya, maka itu bukan tanggung jawab saya. Bukan saya yang mencelakakan dia.

2.4 Contoh Kasus

Mendadak nama SMP Perdana Semarang menjadi terkenal, terkait penolakan terhadap pengawas Ujian Nasional (UN) 2013 dari sekolah lain, dengan alasan karena 26 guru pengawas tersebut berasal dari SMP Negeri. Tentu saja hal itu menimbulkan sebuah kecurigaan besar bagi masyarakat.

Bagaimana tidak ? Sekolah yang disebut-sebut tidak termasuk dalam sekolah favorit ini ternyata telah mendapat peringkat kedua se-Kota Semarang pada nilai UN tahun 2011/2012 lalu, dengan rata-rata 9,21. Menurut Pengelola Yayasan SMP Perdana Semarang, Bugiar, pengawasan akan menjadi lebih obyektif apabila pengawasnya tidak hanya dari guru sekolah negeri, tetapi juga dari sekolah swasta. Ia juga mengaku bahwa, tidak ada masalah dengan sekolahnya dan UN berjalan dengan aman.

Analisis :

Dalam hal ini, warga sekolah termasuk guru, kepala sekolah, pengelola yayasan, dan orang tua telah melakukan apa yang harus mereka lakukan untuk kemajuan SMP Perdana Semarang tanpa memperdulikan pandangan, bahkan kritikan dari luar. Mereka menutup sekolah dari pengawas luar untuk mewujudkan keinginan mereka menjadikan sekolah tersebut yang terbaik. Dengan kata lain, mereka melakukan sesuatu yang wajib untuk dilakukan.

3.1 Kesimpulan

Etika deontologis (kata Yunani *deon* berarti: apa yang harus dilakukan / kewajiban), memandang suatu sistem etika yang tidak mengukur baik tidaknya suatu perbuatan berdasarkan hasilnya, melainkan semata-mata berdasarkan maksud si pelaku dalam melakukan perbuatan tersebut. Sistem ini juga dapat dikatakan tidak menyoroti tujuan yang dipilih bagi perbuatan atau keputusan kita, melainkan semata-mata wajib tidaknya perbuatan dan keputusan kita.

Etika deontologis atau deontologi adalah pandangan etika normative yang menilai moralitas suatu tindakan berdasarkan kepatuhan pada peraturan. Etika ini kadang-kadang disebut etika berbasis "kewajiban" atau "obligasi" karena peraturan memberikan kewajiban kepada seseorang.

Istilah deontologi berasal dari kata Yunani *deon* yang berarti kewajiban. Yang menjadi dasar baik buruknya perbuatan adalah kewajiban. Pendekatan deontologi sudah diterima dalam konteks agama, sekarang merupakan juga salah satu teori etika yang terpenting. Contohnya : kewajiban seseorang yang memiliki dan mempecahkan agamanya, maka orang tersebut harus beribadah, menjalankan perintah dan menjauhi larangannya.

Dalam era globalisasi filsafat moral keberadaannya sangat penting, sebab filsafat moral dapat menginspirasi dan mendorong manusia untuk berpikir dan menerapkan kebaikan atau berperilaku bermoral dalam kehidupannya. Untuk menciptakan generasi muda bermoral yang berani mengambil keputusan dengan pertimbangan moral khususnya pelajar diperlukan strategi diantaranya adalah penerapan model pembelajaran *Moral Reasoning* (perkembangan moral) dalam pembelajaran di kelas. Deontologi yaitu kewajiban dan tanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Sukrisno, Ardana, I cenik. Etika Bisnis dan Profesi: Tantangan membangun manusia seutuhnya. 2014. Jakarta : Salem
- Dr. Amril M. MA, Etika Islam; Telaah Pemikiran Filsafat Moral Raghib Al-Ishafani, Cet.1 (Pekanbaru: Pustaka Pelajar, 2002).
- Fu'ad Farid Ismail & Abdul Hamid Mutawalli, Cara Mudah Belajar Filsafat : Barat Dan Islam, cet . I (Jogjakarta, IRCiSoD, 2012).

MODUL VII PENDIDIKAN MORAL

A. Pengertian Konsep, Nilai dan Moral

1. Pengertian Konsep

Pengertian dan Makna Konsep adalah suatu pernyataan yang masih bersifat abstrak/pemikiran untuk mengelompokkan ide-ide atau peristiwa yang masih dalam angan-angan seseorang. Meski belum diimplementasikan, konsep yang bersifat positif memiliki makna yang baik. Begitu pula sebaliknya, jika konsep itu bersifat negatif maka juga akan memiliki makna negatif pula. Contoh konsep : HAM, demokrasi, globalisasi, dan masih banyak lagi. Menurut Bruner, setiap konsep mengandung nama, ciri/atribut, dan aturan.

Perhatikan contoh pemikiran Bruner dikaitkan dengan HAM seperti di bawah ini!

Contoh: Konsep Hak Asasi Manusia (HAM) di rumah dan sekolah ,
Nama konsep : Hak asasi manusia terhadap anak. Contoh positif :Adanya kesadaran dari orang tua, guru, masyarakat, pemerintah terhadap hak-hak anak yang harus diberikan. Misal anak diberi waktu belajar, bermain, mengutarakan pendapatnya baik di rumah, disekolah maupun didalam masyarakat. Contoh negatif : Orang tua yang merampas hak anak dengan memaksanya berjualan kue atau koran, sehingga dia tidak sempat belajar atau menyelesaikan sekolahnya.

2. Pengertian Nilai

Pengertian nilai (value), menurut Djahiri (1999), adalah harga, makna, isi dan pesan, semangat, atau jiwa yang tersurat dan tersirat dalam fakta, konsep, dan teori, sehingga bermakna secara fungsional. Disini, nilai difungsikan untuk mengarahkan, mengendalikan, dan menentukan kelakuan seseorang, karena nilai dijadikan standar perilaku. Sedangkan menurut Dictionary dalam Winataputra (1989),

nilai adalah harga atau kualitas sesuatu. Artinya, sesuatu dianggap memiliki nilai apabila sesuatu tersebut secara instrinsik memang berharga. Pendidikan nilai adalah pendidikan yang mensosialisasikan dan menginternalisasikan nilai-nilai dalam diri siswa. Pelaksanaan pendidikan nilai selain dapat melalui taksonomi Bloom dkk, dapat juga menggunakan jenjang afektif (Kratzwoh, 1967), berupa penerimaan nilai (receiving), penaggapan nilai (responding), penghargaan nilai (valuing), pengorganisasi nilai (organization), karaterisasi nilai (characterization).

Dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, maupun bernegara, nilai Pancasila merupakan standar hidup bangsa yang berideologi Pancasila. Nilai ini sudah pernah dikemas dan disosialisasikan melalui P4 (Pedoman, Penghayatan, dan Pengamalan Pancasila), dan dianjurkan disekolah-sekolah sebagaimana telah dibahas di muka. Anda hendaknya sadar bahwa secara historis, nilai Pancasila digali dari puncak-puncak kebudayaan, nilai agama, dan adat istiadat bangsa Indonesia sendiri, bukan dikulak dari negara lain. Nilai ini sudah ada sejak bangsa Indonesia lahir. Oleh karena itu, sudah sepantasnya jika Pancasila mendapat predikat sebagai jiwa bangsa. Nilai Pancasila yang digali dari bumi Indonesia sendiri merupakan pandangan hidup/panutan hidaup bangsa Indonesia. Kemudian, ditingkatkan kembali menjadi Dasar Negara yang secara yuridis formal ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945, yaitu sehari setelah Indonesia merdeka. Secara spesifik, nilai Pancasila telah tercermin dalam norma seperti norma agama, kesusilaan, kesopanan, kebiasaan, serta norma hukum. Dengan demikian, nilai Pancasila secara individu hendaknya dimaknai sebagai cermin perilaku hidup sehari-hari yang terwujud dalam cara bersikap dan dalam cara bertindak. Berdasarkan uraian di muka dapat disimpulkan bahwa pengertian dan makna nilai adalah suatu bobot/kualitas perbuatan kebaikan yang mendapat dalam berbagai hal yang dianggap sebagai sesuatu yang berharga, berguna, dan

memiliki manfaat. Dalam pembelajaran PKN SD, nilai sangat penting untuk ditanamkan sejak dini karena nilai bermanfaat sebagai standar pegangan hidup.

3. Pengertian Moral

Pengertian moral, menurut Suseno (1998) adalah ukuran baik-buruknya seseorang, baik sebagai pribadi maupun sebagai warga masyarakat, dan warga negara. Sedangkan pendidikan moral adalah pendidikan untuk menjadikan anak manusia bermoral dan manusiawi. Sedangkan menurut Ouska dan Whellan (1997), moral adalah prinsip baik-buruk yang ada dan melekat dalam diri individu atau seseorang. Walaupun moral itu berada dalam diri individu, tetapi moral berada dalam suatu sistem yang berwujud aturan. Moral dan moralitas memiliki sedikit perbedaan, karena moral adalah prinsip baik-buruk sedangkan moralitas merupakan kualitas pertimbangan baik-buruk.

Apabila membicarakan krisis moral (akhlak), yang perlu dipahami adalah pengertian dari moral (akhlak) itu sendiri agar tidak terjadi kesalahan semantik. Bertens memandang moral (akhlak) sebagai keseluruhan asas dari nilai yang berkenaan dengan baik dan buruk. Semua bangsa mempunyai pengalaman terhadap baik dan buruk, tetapi tidak selalu ada pendapat yang sama tentang apa yang harus dianggap baik atau buruk itu. Pengertian tentang baik dan buruk merupakan sesuatu yang umum yang terdapat di mana-mana dan di segala zaman. Dengan kata lain akhlak atau moralitas merupakan fenomena manusiawi (kemanusiaan) yang universal.

Moral atau "*ethos*" seseorang atau sekelompok orang adalah bukan hanya apa yang dilakukan oleh orang atau sekelompok orang itu, melainkan juga apa yang menjadi pemikiran dan pendirian mereka mengenai apa yang baik dan apa yang tidak baik, mengenai apa yang patut dan tidak patut untuk dilakukan. Perbuatan-perbuatan atau

perilaku orang pada umumnya, tidak selalu adalah tanda, adalah manifestasi keyakinan atau pandangan hidup orang.

Dalam penggunaannya sebagai kata sifat, moral dapat dimaknakan sebagai

- a. Sesuatu yang menyangkut penilaian atau pengajaran tentang kebaikan atau keburukan watak atau kelakuan
- b. Sesuatu yang bersetujuan dengan ukuran-ukuran maupun kelakuan yang baik
- c. Sesuatu yang timbul dari hati nurani
- d. Hal yang punya dampak kejiwaan bukan keragaan
- e. Hal yang didasarkan atas kelayakan daripada bukti
- f. Prinsip yang diajarkan (atau disimpulkan) lewat sebuah cerita atau kejadian
- g. Aturan-aturan kebiasaan tingkah laku (khususnya tingkah laku seksual).

Dalam konteks Islam, moral (akhlak) dimaknai sebagai pandangan dan sikap hidup terpuji berlandaskan ajaran Allah yang termaktub dalam al-Qur'an dan disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Secara lebih terperinci, objek atau lapangan akhlak dalam Islam meliputi bagaimana seharusnya hubungan manusia dengan penciptanya, manusia terhadap dirinya, manusia terhadap keluarganya, manusia terhadap masyarakatnya, manusia yang satu dengan masyarakat lainnya, manusia terhadap hewan, dan manusia terhadap makhluk lainnya.

Beberapa pengertian tentang baik atau buruk, baik dari sudut rasionalitas akal,- maupun dari sudut pandang agama di atas, dapat mengarahkan bahwa moral (akhlak) bukan merupakan sesuatu yang inheren dalam diri manusia sewaktu dilahirkan, melainkan akhlak terus muncul melalui proses pendidikan (pembinaan) dan proses sosialisasi. Jadi moral seseorang akan sangat ditentukan oleh seberapa jauh proses pendidikan (pembinaan) berlangsung pada individu.

Pendidikan tersebut tentu saja melibatkan banyak unsur. Lingkungan sesama individu, mulai dari keluarga, lingkungan pendidikan (sekolah), dan lingkungan masyarakat luas sampai pada negara atau pemerintah.

Dengan demikian, hakekat dan makna moralitas bisa dilihat dari cara individu yang memiliki moral dalam mematuhi maupun menjalankan aturan. Ada beberapa pakar yang mengembangkan pembelajaran nilai moral, dengan tujuan membentuk watak atau karakteristik anak. Pakar-pakar tersebut diantaranya adalah Newman, Simon, Howe, dan Lickona. Dari beberapa pakar tersebut, pendapat Lickona yang lebih cocok diterapkan untuk membentuk watak/karakter anak. Pandangan Lickona (1992) tersebut dikenal dengan *educating for character* atau pendidikan karakter/watak untuk membangun karakter atau watak anak. Dalam hal ini, Lickona mengacu pada pemikiran filosofi Michael Novak yang berpendapat bahwa watak/ karakter seseorang dibentuk melalui tiga aspek yaitu, *moral knowing*, *moral feeling*, dan *moral behavior*, yang satu sama lain saling berhubungan dan terkait. Lickona menggarisbawahi pemikiran Novak. Ia berpendapat bahwa pembentukan karakter/watak anak dapat dilakukan melalui tiga kerangka pikir, yaitu konsep moral (*moral knowing*), sikap moral (*moral feeling*), dan perilaku moral (*moral behavior*). Dengan demikian, hasil pembentukan sikap karakter anak pun dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu konsep moral, sikap moral, dan perilaku moral. Pemikiran Lickona ini mengupayakan dapat digunakan untuk membentuk watak anak, agar dapat memiliki karakter demokrasi. Oleh karena itu, materi tersebut harus menyentuh tiga aspek teori (Lickona), seperti berikut.

Konsep moral (*moral knowing*) mencakup kesadaran moral (*moral awareness*), pengetahuan nilai moral (*knowing moral value*), pandangan ke depan (*perspective talking*), penalaran moral (*reasoning*),

pengambilan keputusan (decision making), dan pengetahuan diri (self knowledge).

Sikap moral (moral feeling) mencakup kata hati (conscience), rasa percaya diri (self esteem), empati (emphaty), cinta kebaikan (loving the good), pengendalian diri (self control), dan kerendahan hati (and huminity). Prilaku moral (moral behavior) mencakup kemampuan (compalance), kemauan (will) dan kebiasaan (habbit).

Berdasarkan uraian di muka, dapat disimpulkan bahwa pengertian moral atau moralitas adalah suatu tuntutan prilaku yang baik yang dimiliki individu sebagai moralitas, yang tercermin dalam pemikiran/konsep, sikap, dan tingkah laku. Dalam pembelajaran PKN, moral sangat penting untuk ditanamkan pada anak usia SD, karena proses pembelajaran PKN SD memang bertujuan untuk membentuk moral anak, yaitu moral yang sesuai dengan nilai falsafah hidupnya.

B. Tujuan Pendidikan Moral

Suatu usaha atau kegiatan apabila tidak mempunyai tujuan jelas tidak akan berarti apa-apa. Oleh karena itu tidak ada kegiatan yang tanpa tujuan. Sedangkan tujuan itu sendiri telah terkandung dalam pengertian kegiatan, agar suatu kegiatan terarah dan mencapai sesuatu yang kita harapkan, tentu saja dengan adanya tujuan, demikian juga dengan pendidikan. Untuk dapat melihat tujuan dan orientasi pendidikan moral, perlu kiranya menjadikan peta wacana pendidikan moral yang berkembang sebagai parameter.

Adapun tujuan pendidikan moral menurut Nurul Zuriah adalah:

- a. Anak mampu memahami nilai-nilai budi pekerti di lingkungan keluarga, lokal, nasional, dan internasional melalui adat istiadat, hukum, undang-undang, dan tatanan antar bangsa.
- b. Anak mampu mengembangkan watak atau tabiatnya secara konsisten dalam mengambil keputusan budi pekerti di tengah-tengah rumitnya kehidupan bermasyarakat saat ini.

- c. Anak mampu menghadapi masalah nyata dalam masyarakat secara rasional bagi pengambilan keputusan yang terbaik setelah melakukan pertimbangan sesuai dengan norma budi pekerti.
- d. Anak mampu menggunakan pengalaman budi pekerti yang baik bagi pembentukan kesadaran dan pola perilaku yang berguna dan bertanggung jawab Lebih lanjut.

Frankena mengemukakan lima tujuan pendidikan moral sebagai berikut:

- a. Mengusahakan suatu pemahaman |pandangan moral| ataupun cara-cara moral dalam mempertimbangkan tindakan-tindakan dan penetapan keputusan apa yang seharusnya dikerjakan, seperti membedakan hal estetika, legalitas, atau pandangan tentang kebijaksanaan.
- b. Membantu mengembangkan kepercayaan satu atau beberapa prinsip umum yang fundamental, ide atau nilai sebagai suatu pijakan atau landasan untuk pertimbangan moral dalam menetapkan suatu keputusan.
- c. Membantu mengembangkan kepercayaan atau mengadopsi norma-norma konkret, nilai-nilai, kebaikan-kebaikan seperti pada pendidikan tradisional yang selama ini dipraktikkan.
- d. Mengembangkan suatu kecenderungan untuk melakukan sesuatu yang secara moral baik dan benar.
- e. Meningkatkan pencapaian refleksi otonom, pengendalian diri atau kebebasan mental spiritual, meskipun itu disadari dapat membuat seseorang menjadi pengkritik terhadap ide-ide dan prinsip-prinsip, dan aturan-aturan umum yang sedang berlaku.

Disamping itu, jika masyarakat menjadi tujuan tindakan moral, maka tujuan moral juga harus dipandang sebagai sesuatu yang diinginkan pada dirinya dan tidak hanya karena berguna bagi individu.

Dalam mengikat dirinya dengan masyarakat setiap orang harus mempunyai kepentingan. Keterikatan hanya mungkin terealisasi bila manusia rela menjadi sesuatu yang bukan dirinya. Sebab dalam kenyataannya mengaitkan diri dengan makhluk lain berarti sampai tingkat bergabung atau menyatu bersamanya, bahkan siap menggantikan makhluk tersebut apabila keterikatan memang menuntut pengorbanan. Oleh karena itu untuk menjadi manusia yang baik, orang harus segera menyatu dengan sumber utama kehidupan moral dan mental yang menjadi ciri manusia yaitu masyarakat. Berasal dari masyarakat segala sesuatu yang paling baik dalam diri manusia.

C. Internalisasi Nilai Dalam Pendidikan Moral

1. Pengertian Internalisasi Nilai Dalam Pendidikan Moral

Internalisasi (*internalization*) adalah suatu proses memasukkan nilai atau memasukkan sikap ideal yang sebelumnya dianggap berada di luar, agar tergabung dalam pemikiran seseorang dalam pemikiran, keterampilan dan sikap pandang hidup seseorang. Internalisasi dalam pengertian dimaksud, dapat pula diterjemahkan dengan pengumpulan nilai atau pengumpulan sikap tertentu agar terbentuk menjadi kepribadian yang utuh.

Internalisasi pada hakikatnya adalah upaya berbagi pengetahuan (*knowledge sharing*). Internalisasi dengan demikian, dapat pula diterjemahkan sebagai salah satu metode, prosedur dan teknik dalam siklus manajemen pengetahuan yang digunakan para pendidik untuk memberikan kesempatan kepada anggota suatu kelompok, organisasi, instansi, perusahaan atau anak didik agar berbagi pengetahuan yang mereka miliki kepada anggota lainnya atau kepada orang lain.

Secara etimologis, internalisasi menunjukkan suatu proses. Dalam kaidah bahasa Indonesia akhiran-isasi mempunyai definisi proses. Sehingga internalisasi dapat didefinisikan sebagai suatu proses. Dalam kamus besar bahasa Indonesia internalisasi diartikan sebagai

penghayatan, pendalaman, penguasaan secara mendalam yang berlangsung melalui binaan, bimbingan dan sebagainya (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1989 : 336).

Jadi teknik pembinaan agama yang dilakukan melalui internalisasi adalah pembinaan yang mendalam dan menghayati nilai-nilai relegius (agama) yang dipadukan dengan nilai-nilai pendidikan secara utuh yang sarannya menyatu dalam kepribadian peserta didik, sehingga menjadi satu karakter atau watak peserta didik.

Dalam kerangka psikologis, internalisasi diartikan sebagai penggabungan atau penyatuan sikap, standart tingkah laku, pendapat dan seterusnya di dalam kepribadian. Freud yakin bahwa superego, atau aspek moral kepribadian berasal dari internalisasi sikap-sikap parental (orang tua). (Chaplin, 2002 : 256).

Dalam proses internalisasi yang dikaitkan dengan pembinaan peserta didik atau anak asuh ada tiga tahap yang mewakili proses atau tahap terjadinya internalisasi (Muhaimin, 1996 : 153), yaitu:

- a. **Tahap Transformasi Nilai** : Tahap ini merupakan suatu proses yang dilakukan oleh pendidik dalam menginformasikan nilai-nilai yang baik dan kurang baik. Pada tahap ini hanya terjadi komunikasi verbal antara pendidik dan peserta didik atau anak asuh.
- b. **Tahap Transaksi Nilai** : Suatu tahap pendidikan nilai dengan jalan melakukan komunikasi dua arah, atau interaksi antara peserta didik dengan pendidik yang bersifat interaksi timbal-balik.
- c. **Tahap Transinternalisasi** : Tahap ini jauh lebih mendalam dari tahap transaksi. Pada tahap ini bukan hanya dilakukan dengan komunikasi verbal tapi juga sikap mental dan kepribadian. Jadi pada tahap ini komunikasi kepribadian yang berperan secara aktif (Muhaimin, 1996 : 153).

Nilai-nilai yang diinternalisasikan adalah yang berkaitan dengan olah pikir (agar anak cerdas), olah hati (religius, jujur, bertanggung jawab), olahraga (bersih dan sehat), olah rasa dan karsa, peduli dan kreatif yang muaranya menuju nilai-nilai luhur dan perilaku berkarakter.

Proses internalisasi pendidikan karakter di sekolah tidak dapat dilakukan secara instan, namun secara bertahap sedikit demi sedikit dan dilakukan secara terus-menerus atau secara berkelanjutan. Dalam menginternalisasi pendidikan karakter di sekolah-sekolah dapat dilakukan berbagai cara, tergantung dari sekolah tersebut dalam mengemasnya.

Jadi dikaitkan dengan perkembangan manusia, proses internalisasi harus berjalan sesuai dengan tugas-tugas perkembangan. Internalisasi merupakan sentral proses perubahan kepribadian yang merupakan dimensi kritis pada perolehan atau perubahan diri manusia, termasuk di dalamnya pemribadian makna (nilai) atau implikasi respon terhadap makna. Contoh sekolah-sekolah yang menginternalisasikan pendidikan karakter kepada peserta didiknya, di antaranya:

1) Sekolah Dasar Insan Teladan, Bogor

Program-program SD Insan Teladan yang sangat berpengaruh terhadap perubahan karakter adalah duduk hening, integrasi nilai kemanusiaan ke dalam mata pelajaran, dan kelas integrasi khusus yang menghubungkan satu tema tertentu dengan banyak mata pelajaran.

Setiap pagi, sebelum memulai pelajaran seluruh siswa wajib mengikuti pelajaran, seluruh siswa wajib mengikuti kegiatan duduk hening. Seperti namanya, siswa diajak duduk tenang bersila. Dalam keadaan mata terpejam, mereka mengatur nafas sembari meresapi makna kalimat-kalimat yang diungkapkan guru pembimbing mereka. Acara ini berlangsung selama sekitar 10 menit. Dalam duduk hening

tersebut, siswa diminta menegakkan badan dan mengatur nafas secara perlahan-lahan dan berkonsentrasi.

2) MTs Negeri Kebumen 1

Salah satu sekolah menengah berbasis agama yang berada di kota Kebumen ini, menerapkan pendidikan karakter. Internalisasi pendidikan karakter pada sekolah ini melalui peraturan-peraturan baik tertulis maupun peraturan yang tidak tertulis. Selain melalui peraturan, dilakukan melalui para pendidiknya atau para guru dengan memasukan pendidikan karakter saat pelajaran, namun secara tersirat sehingga para peserta didik tidak menyadarinya. Diantara proses internalisasi pendidikan karakter di MTs N Kebumen 1 adalah sebelum pelajaran dimulai berdoa terlebih dahulu dilanjutkan pembacaan juz amma. Hal ini dilakukan secara terus-menerus. Sehingga peserta didik akan terbiasa berdoa ketika hendak melakukan apapun. Ketika pelajaran guru disamping menyampaikan materi juga memberikan pendidikan karakter berupa nilai-nilai moral kehidupan yang diselipkan pada saat penyampaian materi. Pendidikan karakter banyak disampaikan para guru kepada peserta didiknya. Dengan demikian para guru menjadi contoh para peserta didiknya.

Selain internalisasi karakter seperti yang dicontohkan diatas dalam bentuk peraturan umumnya, proses internalisasi dapat dilakukan dengan menyelipkan saat pelajaran berlangsung tanpa siswa diketahui oleh para siswanya, jika sang guru sedang memberikan pendidikan karakter. Untuk contoh: ketika sedang pelajaran geografi, tugas guru selain menyampaikan materi juga memberikan pendidikan karakter yang sesuai dengan mata pelajaran yang sedang diajarkan.

2. Tujuan Internalisasi

Pendidikan karakter di sekolah memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Memperkuat dan mengembangkan nilai-nilai kehidupan yang dianggap penting dan perlu sehingga menjadi kepribadian/ kepemilikan peserta didik yang khas sebagaimana nilai-nilai yang dikembangkan.
- b. Mengoreksi perilaku peserta didik yang disesuaikan dengan nilai-nilai yang dikembangkan oleh sekolah.
- c. Membangun koneksi yang harmoni dengan keluarga dan masyarakat dalam memerankan tanggung jawab pendidikan karakter secara bersama.

Metode internalisasi, menurut A. Tafsir, memiliki tiga tujuan. Ketiga tujuan dimaksud adalah:

- a. Agar peserta didik tahu atau mengetahui (*knowing*). Di sini tugas guru ialah mengupayakan agar peserta didik mengetahui sesuatu konsep. Peserta didik diajar agar mengetahui menghitung luas bidang. Guru mengajarkan dengan cara memperlihatkan beberapa contoh bidang. Untuk mengetahui apakah peserta didik telah memahami guru sebaiknya memberikan soal-soal latihan, baik dikerjakan di sekolah maupun di rumah. Akhirnya guru yakin bahwa peserta didiknya telah mengetahui bahwa cara menentukan luas bidang segi empat. Selesai aspek *knowing*.
- b. Agar peserta didik mampu melaksanakan atau mengerjakan yang ia ketahui itu (*doing*). Dalam hal mengetahui luas bidang seharusnya peserta didik dibawa ke alam nyata yaitu menyaksikan bidang (bidang-bidang) tertentu, lantas satu persatu peserta didik (dapat juga dibagi menjadi kelompok-kelompok) mengukur secara nyata dan menentukan luas bidang-bidang itu. Bila semua peserta didik (sekali lagi: semua peserta didik) telah menghitung dengan *cara* yang benar dan *hasil* yang benar maka yakinlah guru bahwa peserta didik telah mampu melaksanakan yang ia ketahui itu (dalam hal ini konsep dalam rumus itu tadi). Sampai disini tercapailah tujuan pembelajaran aspek *doing*.

- c. Agar peserta didik menjadi orang seperti yang ia ketahui itu. Konsep itu seharusnya tidak sekedar menjadi miliknya tetapi menjadi satu dengan kepribadiannya. Dalam hal ini setiap ia hendak mengetahui luas, ia selalu menggunakan rumus yang telah diketahuinya itu. Inilah tujuan pengajaran aspek *being*.

D. Pendekatan Pendidikan Moral

Pendekatan dalam pendidikan moral berkaitan dengan bagaimana cara menyampaikan nilai-nilai moral itu kepada peserta didik. Terdapat berbagai klasifikasi yang dipakai para ahli pendidikan moral tentang pendekatan ini.

Menurut Superka dalam Teuku Ramli (2001), dikenal adanya lima (5) jenis pendekatan dalam pendidikan budi pekerti, yaitu :

- 1) Pendekatan penanaman nilai (*inculcation approach*)
- 2) Pendekatan perkembangan moral kognitif (*cognitive moral development approach*)
- 3) Pendekatan analisis nilai (*values analysis approach*)
- 4) Pendekatan klarifikasi nilai (*values clarification approach*), dan
- 5) Pendekatan pembelajaran berbuat (*action learning approach*).

a) Pendekatan Penanaman Nilai (*Inculcation Approach*)

Pendekatan penanaman nilai (*Inculcation Approach*) adalah suatu pendekatan yang memberi penekanan pada penanaman nilai-nilai sosial dalam diri siswa. Tujuan pendidikan nilai menurut pendekatan ini adalah:

Pertama, diterimanya nilai-nilai sosial tertentu oleh siswa; Kedua, berubahnya nilai-nilai siswa yang tidak sesuai dengan nilai-nilai sosial yang diinginkan. Metoda yang digunakan dalam proses pembelajaran menurut pendekatan ini antara lain: keteladanan, penguatan positif dan negatif, simulasi, permainan peranan, dan lain-lain.

Pendekatan penanaman nilai boleh dilaksanakan melalui cara yang berikut:

- 1) Melalui contoh teladan daripada tokoh-tokoh tempatan, negara dan luar negeri.
- 2) Pengukuhan perlakuan positif kepada tingkah laku yang baik dan dendaan yang sesuai bila berlakunya tingkah laku negatif.
- 3) Memberi keterangan serta memanipulasi keadaan atau pengalaman yang dialami oleh pelajar supaya mereka menerima dengan baiknya sesuatu nilai yang dikehendaki.

b) Pendekatan Perkembangan Moral Kognitif (*Cognitive Moral Development Approach*)

Pendekatan ini dikatakan pendekatan perkembangan kognitif kerana karakteristiknya memberikan penekanan pada aspek kognitif dan perkembangannya. Pendekatan ini mendorong siswa untuk berpikir aktif tentang masalah-masalah moral dan dalam membuat keputusan-keputusan moral. Perkembangan moral menurut pendekatan ini dilihat sebagai perkembangan tingkat berpikir dalam membuat pertimbangan moral, dari suatu tingkat yang lebih rendah menuju suatu tingkat yang lebih tinggi. Tujuan yang ingin dicapai oleh pendekatan ini ada dua hal yang utama. Pertama, membantu siswa dalam membuat pertimbangan moral yang lebih kompleks berdasarkan kepada nilai yang lebih tinggi. Kedua, mendorong siswa untuk mendiskusikan alasan-alasannya ketika memilih nilai dan posisinya dalam suatu masalah moral.

Proses pengajaran nilai menurut pendekatan ini didasarkan pada dilemma moral, dengan menggunakan metoda diskusi kelompok. Proses diskusi dimulai dengan penyajian cerita yang mengandung dilemma. Dalam diskusi tersebut, siswa didorong untuk menentukan posisi apa yang sepatutnya dilakukan oleh orang yang terlibat, apa alasan-alasannya. Siswa diminta mendiskusikan tentang alasan-alasan

itu dengan teman-temannya. Cara melaksanakan pendekatan perkembangan moral kognitif ialah seperti yang berikut:

- 1) Mengemukakan satu dilema moral dan soalan probe untuk seseorang berfikir tentang beberapa alternative dalam dilemma tersebut.
- 2) Membuat pilihan moral dan memberi sebab ke atas pilihan tersebut.
- 3) Berdasarkan kepada sebab yang diberikan tentukan peringkat pertimbangan moral
- 4) Tambah soalan probe untuk meningkatkan tahap pemikiran moral murid.

c) Pendekatan Analisis Nilai (*Values Analysis Approach*)

Pendekatan analisis nilai (*Values Analysis Approach*) memberikan penekanan pada perkembangan kemampuan siswa untuk berfikir logis, dengan cara menganalisis masalah yang berhubungan dengan nilai-nilai sosial. Jika dibandingkan dengan pendekatan perkembangan kognitif, salah satu perbedaan penting antara keduanya bahwa pendekatan analisis nilai lebih menekankan pada pembahasan masalah-masalah yang memuat nilai-nilai sosial. Adapun pendekatan perkembangan kognitif memberi penekanan pada dilemma moral yang bersifat perseorangan. Ada dua tujuan utama pendidikan moral menurut pendekatan ini. Pertama, membantu siswa untuk menggunakan kemampuan berfikir logis dan penemuan ilmiah dalam menganalisis masalah-masalah sosial, yang berhubungan dengan nilai moral tertentu. Kedua, membantu siswa untuk menggunakan proses berfikir rasional dan analitik, dalam menghubungkan-hubungkan dan merumuskan konsep tentang nilai-nilai mereka. Selanjutnya, metoda-metoda pengajaran yang sering digunakan adalah: pembelajaran secara individu atau kelompok tentang masalah-masalah sosial yang memuat

nilai moral, penyelidikan kepustakaan, penyelidikan lapangan, dan diskusi kelas berdasarkan kepada pemikiran rasional.

Cara melaksanakan pendekatan analisis nilai ialah seperti yang berikut:

- 1) Kenal pasti dan menjelaskan soalan/isu nilai
- 2) Mengumpul fakta/bukti untuk membuat pertimbangan nilai
- 3) Menilai fakta yang relevan dan membuat keputusan tentative
- 4) Menguji keputusan tentative dengan situasi yang berbeza, meletakkan diri ke dalam situasi sebenar atau berdasarkan kepada prinsip moral yang sejagat

d) Pendekatan Klarifikasi Nilai (*Values Clarification Approach*)

Pendekatan klarifikasi nilai (*Values Clarification Approach*) memberi penekanan pada usaha membantu siswa dalam mengkaji perasaan dan perbuatannya sendiri, untuk meningkatkan kesadaran mereka tentang nilai-nilai mereka sendiri. Teknik Klarifikasi nilai bermaksud menanamkan nilai kepada subyek didik dengan melalui kesadarannya sendiri. dapat dikatakan bahwa teknik ini mengikuti aliran konstruksivisme.

Tujuan pendidikan nilai menurut pendekatan ini ada tiga. Pertama, membantu siswa untuk menyadari dan mengidentifikasi nilai-nilai mereka sendiri serta nilai-nilai orang lain; Kedua, membantu siswa, supaya mereka mampu berkomunikasi secara terbuka dan jujur dengan orang lain, berhubungan dengan nilai-nilainya sendiri; Kedua, membantu siswa, supaya mereka mampu menggunakan secara bersama-sama kemampuan berpikir rasional dan kesadaran emosional, untuk memahami perasaan, nilai-nilai, dan pola tingkah laku mereka sendiri Dalam proses pengajarannya, pendekatan ini menggunakan metoda: dialog, menulis, diskusi dalam kelompok besar atau kecil, dan lain-lain.

e) Pendekatan Pembelajaran Berbuat (*Action Learning Approach*)

Pendekatan pembelajaran berbuat (*Action Learning Approach*) memberipenekanan pada usaha memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan perbuatan-perbuatan moral, baik secara perseorangan maupun secara bersama-sama dalam suatu kelompok.

Ada dua tujuan utama pendidikan moral berdasarkan kepada pendekatan ini. Pertama, memberi kesempatan kepada siswa untuk melakukan perbuatan moral, baik secara perseorangan mahupun secara bersama-sama, berdasarkan nilai-nilai mereka sendiri; Kedua, mendorong siswa untuk melihat diri mereka sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam pergaulan dengan sesama, yang tidak memiliki kebebasan sepenuhnya, melainkan sebagai warga dari suatu masyarakat, yang harus mengambil bagian dalam suatu proses demokrasi.

Metoda-metoda pengajaran yang digunakan dalam pendekatan analisis nilai dan klarifikasi nilai digunakan juga dalam pendekatan ini. Metoda-metoda lain yang digunakan juga adalah projek-projek tertentu untuk dilakukan di sekolah atau dalam masyarakat, dan praktek keterampilan dalam berorganisasi atau berhubungan antara sesama.

Klasifikasi lain menyatakan bahwa pendekatan dalam pendidikan moral dibedakan menjadi tiga (3) yaitu;

- 1) Pendekatan Lawrence Kohlberg disebut Cognitive Moral Development
- 2) Pendekatan L Metccalf dan Iman al Ghozalli disebut Affektive Moral Development
- 3) Pendekatan Albert Bandura dan Skinner disebut Behavior Moral Development

Pendidikan moral atau budi pekerti selanjutnya perlu diberikan di sekolah. Hal ini karena sekolah merupakan salah satu lingkungan pendidikan yang bertanggung jawab terhadap kedewasaan peserta didik. Dalam hal pemberian pendidikan budi pekerti di sekolah muncul perbedaan tentang modus pemberian pendidikan budi pekerti itu sendiri. Dalam modus

pemberian pendidikan budi pekerti, para pakar berbeda pendapat. Pendapat pertama, bahwa pendidikan budi pekerti diberikan berdiri sendiri sebagai suatu mata pelajaran. Pendapat kedua, pendidikan budi pekerti diberikan secara terintegrasi dalam mata pelajaran civics/PPKn, pendidikan agama, dan mata pelajaran lain yang relevan. Pendapat ketiga, pendidikan budi pekerti terintegrasi ke dalam semua mata pelajaran.

Kesimpulan

Pendidikan berkarakter moral adalah kunci untuk perbaikan sosial dan kemajuan peradaban bangsa yang menjunjung tinggi integritas nilai dan kemanusiaan. Harapan dari pendidikan berkarakter moral adalah tercapainya keseimbangan antara pengetahuan dan moral. Pendidikan moral ditujukan untuk memagari manusia dari melakukan perbuatan yang buruk yang tidak sesuai dengan norma-norma yang ada baik itu dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan demikian suatu pendekatan dalam Pendidikan moral dapat membantu untuk memahami dan melakukan pendidikan moral. Pendekatan dalam pendidikan moral yang dibentuk adalah berasaskan kepada berbagai teori yang berkaitan dengan perkembangan moral dan pembentukan sahsiah individu. Dengan menguasai pendekatan-pendekatan ini, guru dapat memilih teknik pengajaran dan pembelajaran yang sesuai untuk mengembang ketiga-tiga aspek dalam pendidikan moral iaitu pemikiran moral, perasaan moral dan amalan moral. Selain daripada itu, seorang guru harus mewujudkan satu suasana atau iklim moral dalam pembelajaran dan pembelajaran pendidikan moral. Iklim atau suasana moral akan wujud jika adanya amalan nilai-nilai murni di kalangan pelajar dan guru sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Samani, Muchlas dan hariyanto.2012.Konsep dan Model Pendidikan Karakter.Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Aqib, Zainal.2011.Pendidikan Karakter Membangun Perilaku Positif Anak Bangsa.Bandung: Yrama Widya

Desmita.2009.PSIKOLOGI PERKEMBANGAN PESERTA DIDIK. Bandung:
PT Remaja Rosdakarya

Kesuma, Dharma; Triatna, Cepi; Permana, Johar.2011. Pendidikan Karakter. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Asrori Ardiansyah.2011. Proses Internalisasi Nilai.
<http://www.majalahpendidikan.com/2011/04/proses-internalisasinilai.html>

Zubaidi, H. Achmad, dkk.2002. *PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN*. Yogyakarta:Paradigma

MODUL VIII AGAMA, NILAI DAN KEPERCAYAAN

1. Pengertian Nilai, Agama dan Kepercayaan

Nilai adalah sesuatu yang berguna dan baik yang dicita-citakan dan dianggap penting oleh masyarakat oleh masyarakat. sesuatu dikatakan mempunyai nilai, apabila mempunyai /kegunaan, kebenaran, kebaikan, keindahan dan religiusitas. sedangkan Norma merupakan ketentuan yang berisi perintah-perintah atau larangan-larangan yang harus dipatuhi warga masyarakat demi terwujudnya nilai-nilai.

Agama, berasal dari bahasa sansekerta artinya menunjukkan kepercayaan manusia berdasarkan wahyu dari Tuhan. Secara etimologis berasal dari suku kata *A-Gam-A* berarti tidak pergi atau tetap atau kekal jadi agama dapat diartikan pedoman hidup yang kekal. Menurut *Kitab Sunarigama*, berasal dari kata *A-Ga-Ma* berarti ajaran tentang hal-hal yang sifatnya misteri.

Menurut *KBBI* agama adalah ajaran atau system yang mengatur tata keimanan dan peribadatan kepada Tuhan YME serta kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia sertalingkungannya.

Kepercayaan atau Religi, berasal dari bahasa Latin *Religere/religare* artinya berhati-hati dan berpegang teguh pada aturan-aturan dasar. Jadi kepercayaan atau religi berarti kecenderungan batin (rohani) manusia yang terikat dengan hal-hal yang gaib, suci (kekuatan alam).

Agama Islam

Nama Kitab Suci : Al-Qur'an

Nama Pembawa : Nabi Muhammad SAW

Permulaan : Sekitar 1400 tahun yang lalu

Tempat Ibadah : Masjid

Hari Besar Keagamaan : Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha, Tahun Baru Hijrah, Isra' Mi'raj

Jumlah Penganut : 207.176.162 jiwa (87,18%)

Agama Kristen Protestan

Nama Kitab Suci : Alkitab
Nama Pembawa : Yesus Kristus
Permulaan : Sekitar 2000 tahun yang lalu
Tempat Ibadah : Gereja
Hari Besar Keagamaan : Hari Natal, Hari Jumat Agung, Hari Paskah, Kenaikan Isa Almasih
Jumlah Penganut : 16.528.513 jiwa (6,96%)

Agama Katolik

Nama Kitab Suci : Alkitab
Nama Pembawa : Yesus Kristus
Permulaan : Sekitar 2000 tahun yang lalu
Tempat Ibadah : Gereja
Hari Besar Keagamaan : Hari Natal, Hari Jumat Agung, Hari Paskah, Kenaikan Isa Almasih
Jumlah Penganut : 6.907,873 jiwa (2,91%)

Agama Hindu

Nama Kitab Suci : Weda
Nama Pembawa : –
Permulaan : Sekitar 3000 tahun yang lalu
Tempat Ibadah : Pura
Hari Besar Keagamaan : Hari Nyepi, Hari Saraswati, Hari Pagerwesi
Jumlah Penganut : 4.012.116 jiwa (1,69%)

2. Nilai-Nilai Agama Islam, Kristen, Budha

Nilai dalam agama islam

a) Nilai Akidah

Nilai akidah memiliki peranan yang sangat penting dalam ajaran Islam, sehingga penempatannya berada di posisi yang utama. Akidah secara etimologis berarti yang terikat atau perjanjian yang teguh, dan kuat, tertanam dalam hati yang paling dalam. Secara etimologis berarti *credo*, *creed* yaitu sebuah keyakinan hidup dalam arti khas, yaitu pengingkaran yang bertolak dari hati. Dengan demikian, akidah adalah urusan yang wajib diyakini kebenarannya oleh hati, menentramkan jiwa, dan menjadi keyakinan yang tidak bercampur dengan keraguan.

Aspek nilai akidah tertanam sejak manusia dilahirkan, telaah tersebut tertuang dalam surat Al-A'raf ayat 172:

Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): "Bukankah aku ini Tuhanmu?" mereka menjawab: "Betul (Engkau Tuhan kami), Kami menjadi saksi". (kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan: "Sesungguhnya Kami (Bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (keesaan Tuhan)".

Akidah atau keimanan merupakan landasan bagi umat Islam, sebab dengan akidah yang kuat seseorang tidak akan goyah dalam hidupnya. Akidah dalam Islam mengandung arti adanya keyakinan dalam hati tentang Allah sebagai Tuhan yang wajib disembah, ucapan dalam lisan dan kalimat syahadat dan perbuatan dengan amal sholeh. Oleh karena itu, persyaratan bagi seseorang agar bisa disebut orang muslim dalam mengucapkan dua kalimah syahadat. Akan tetapi, pengakuan tersebut tidak sekedar pengucapan semata, tetapi juga harus disertai keyakinan yang kuat dalam hati dan dibuktikan dengan amal.

Akidah sebagai sebuah keyakinan akan membentuk tingkah laku, bahkan mempengaruhi kehidupan seorang muslim. Menurut Abu A'la Al-Maududi, pengaruh akidah dalam kehidupan sebagai berikut:

- 1) Menjauhkan manusia dari pandangan yang sempit dan picik.
- 2) Menghilangkan sifat murung dan putus asa dalam menghadapi setiap persoalan dan situasi
- 3) Menanamkan kepercayaan terhadap diri sendiri dan tahu harga diri.
- 4) Menanamkan sifat kesatria, semangat dan berani, tidak gentar menghadapi resiko.
- 5) Membentuk manusia menjadi jujur dan adil.
- 6) Membentuk pendirian yang teguh, sabar, taat dan disiplin dalam menjalankan illahi.
- 7) Menciptakan sikap hidup damai dan ridha.

Akidah atau keimanan yang dimiliki setiap orang selalu berbeda. Akidah mempunyai tingkatan-tingkatan yang berbeda pula. Tingkatan-tingkatan iman adalah:

- 1) Taqlid, tingkatan keyakinan berdasarkan pendapat orang lain tanpa dipikirkan. Dengan kata lain, keyakinan yang dimilikinya adalah meniru ada orang lain tanpa tahu dasarnya.
- 2) Yakin, tingkatan keyakinan yang didasarkan atas bukti dan dalil yang jelas, tetapi belum menemukan hubungan yang kuat antara obyek keyakinan dengan dalil yang diperolehnya.
- 3) Ainul yakin, tingkatan keyakinan berdasarkan dalil rasional, ilmiah dan mendalam sehingga mampu membuktikan obyek keyakinan dengan dalil-dalil serta mampu memberikan argumentasi terhadap sanggahan-sanggahan yang datang.
- 4) Haquul yakin, tingkatan keyakinan yang disamping berdasarkan dalil-dalil rasional, ilmiah dan mendalam, juga mampu membuktikan hubungan antara objek keyakinan dengan dalil-dalil, serta mampu menemukan dan merasakan keyakinan tersebut melalui pengalaman agamanya.

b) Nilai Syari'ah

Syariah menurut bahasa berarti tempat jalannya air, atau secara maknawi syariah artinya sebuah jalan hidup yang ditentukan oleh Allah sebagai panduan dalam menjalankan kehidupan dunia dan Akhirat. Syariah merupakan sebuah panduan yang diberikan oleh Allah SWT berdasarkan sumber utama yang berupa Al-Quran dan As-Sunnah serta sumber yang berasal dari akal manusia dalam ijtihad para ulama atau para sarjana Islam.

Kata syariah menurut pengertian hukum Islam adalah hukum-hukum atau aturan yang diciptakan Allah untuk semua hamba-hambaNya agar diamalkan demi mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Syariah juga bisa diartikan sebagai satu sistem ilahi yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan alam sekitarnya. Menurut Mamoud Syaltout dalam Muhammad Alim, syariah sebagai peraturan-peraturan atau pokok-pokoknya digariskan oleh Allah agar manusia berpegang kepadanya, dalam mengatur hubungan manusia dengan Tuhanya, sesama manusia, alam dan hubungan manusia dengan kehidupan.

Menurut Taufik Abdullah, syariah mengandung nilai-nilai baik dari aspek ibadah maupun mumallah. Nilai-nilai tersebut diantaranya:

- 1) Kedisiplinan, dalam beraktifitas untuk beribadah. Hal ini dapat dilihat dari perintah sholat dengan waktu-waktu yang telah ditentukan.
- 2) Sosial dan kemanusiaan.
- 3) Keadilan, Islam sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Hal ini bisa dilihat dalam waris, jual, haad(hukuman), maupun pahala dan dosa.
- 4) Persatuan, hal ini terlibat pada sholat berjamaah, anjuran dalam pengambilan saat musyawarah.
- 5) Tanggung jawab, dengan adanya aturan-aturan kewajiban manusia sebagai hamba kepada TuhanNya adalah melatih manusia untuk bertanggung jawab atas segala hal yang dilakukan.

Jika syariah dikaji secara mendetail bahwa di dalamnya terdapat nilai-nilai dan norma dalam ajaran agama Islam yang ditetapkan oleh Tuhan bagi segenap manusia yang akan dapat mengantarkan pada makna hidup yang hakiki.

Hidup yang selalu berpegang teguh pada syariah akan membawa kehidupannya untuk selalu berperilaku yang sejalan dengan ketentuan Allah dan RasulNya. Sejalan dengan hal tersebut, kualitas iman seseorang dapat dibuktikan dengan pelaksanaan ibadah secara sempurna dan terealisasinya nilai-nilai yang terkandung di dalam syariah dalam menjalankan kehidupan sehari-hari.

c) Nilai Akhlak

Dalam agama Islam, akhlak atau perilaku seseorang muslim seseorang dapat memberikan suatu gambaran akan pemahamannya terhadap agama Islam. nilai-nilai akhlak sangatlah penting untuk diketahui dan diaktualisasikan oleh seseorang muslim atau seseorang ketika dalam proses pembinaan dan membentuk karakter yang tercermin sebagai muslim yang sejati. Secara etimologi, pengertian akhlak berasal dari bahasa arab yang berarti budi pekerti, tabi'at, perangai, tingkah laku buatan, ciptaan.

Adapun akhlak secara terminologi yang mengutip pendapat dari ulama Ibn Maskawaih dalam bukunya *Tahdzib al-ahlak* yang mendefinisikan bahwa akhlak adalah keadaan jiwa seseorang yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan tanpa terlebih dahulu melalui pemikiran dan pertimbangan. Selanjutnya dari Imam Al-Ghazali kitabnya *Ihya' Ulum Al-Din* menyatakan bahwa akhlak adalah gambaran tingkah laku dalam jiwa yang daripadanya lahir perbuatan-perbuatan dengan mudah tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan.

Dari pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa akhlak adalah keadaan yang melekat pada jiwa manusia. Karena itu, suatu perbuatan tidak dapat disebut akhlak kecuali memenuhi beberapa syarat yaitu:

- 1) Perbuatan tersebut telah tertanam kuat dalam jiwa seseorang sehingga telah menjadi kepribadian

- 2) Perbuatan tersebut dilakukan dengan mudah tanpa pemikiran. Ini bukan berarti perbuatan itu dilakukan dalam keadaan tidak sadar, hilang ingatan, tidur, mabuk, atau gila.
- 3) Perbuatan tersebut timbul dari dalam dorongan seseorang yang mengerjakannya tanpa ada suatu paksaan atau tekanan dari luar.
- 4) Perbuatan tersebut dilakukan dengan sesungguhnya, bukan main-main, pura-pura atau sandiwara.

Akhlak menempati posisi yang sangat penting dalam agama Islam. akhlak diibaratkan suatu –buahll pohon Islam yang berakarkan aqidah, bercabang dan syari“ah. Dalam surat Al-Qoalam ayat 4 menjelaskan tentang pentingnya akhlak: *Dan Sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung.*

Nilai Kristiani yang harus ditanamkan

Kebenaran (*Truth*) – yaitu kita harus memegang kebenaran dan mengajarkannya dalam kebenaran berdasar kepada Alkitab.

- 1) Kesalehan (*Righteousness*) – Kesalehan berbicara tentang hubungan atau relasi antara kita dengan Allah dan kesederhanaan hidup.
- 2) Kekudusan (*Holiness*) – ini merupakan syarat seseorang dapat melihat Allah, dan masuk menghadap hadirat-Nya.
- 3) Kesetiaan (*Faithfulness*) – sifat setia sangat diharapkan untuk dapat dimiliki oleh setiap orang percaya. Kesetiaan orang Kristen harus didasarkan kepada kesetiaan Allah sendiri dengan senantiasa menyertai kita.
- 4) Keutamaan (*Excellency*) – semangat untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan dan sesama tentunya diilhami oleh Allah sendiri yang telah memberikan pemberian yang terbaik, yaitu Anak-Nya Yang Tunggal bagi dunia.
- 5) Kasih (*Love*) – ini merupakan ciri kehidupan umat Kristiani yang selalu dinantikan oleh orang-orang disekitar kita. Semua orang percaya diperintahkan untuk menyatakan kasih ini, yakni mengasihi Tuhan dan sesama.

Nilai-nilai agama Hindu

Yajurveda VII.45, yaitu : *"orang senantiasa berbuat jujur, berkata benar atau satya memperoleh perlindungan di dalam hidupnya"*.

Rgveda V.81.1, dinyatakan : *"buktikanlah segala kekuatanmu pada pekerjaan yang mulia dan bermanfaat"*

Atharwaveda III.24.5, dinyatakan sebagai berikut : *"wahai umat manus' kumpulkanlah kekayaan dengan serat tangan, bekerja keras dan setelah engka memperolehnya dermakanlah itu denga seribu tanganmu"*.

Yajurveda XI.2, sebagai berikut: *"hendaknya seseorang senang hidup di dunia ini dengan melakukan kerja keras untuk seratus tahun."*

Atharvaveda XX. 18.3, sebagai berikut *"Tuhan Yang Maha Esa hanya menyayangi orang yang bekerja keras dan membenci orang yang malas."*

Rgveda 1.41.6, yaitu : *"orang yang bekerja keras dan berbuat baik berdasarkan dharma dengan tidak mengenal lelah, memperoleh kekayaan yang berharga dan keturunan yang suputra karena ketekunannya; orang yang berjalan di jalan dharma mencapai keberhasilan dan kebahagiaan hidup. Tuhan Yang Maha Esa tidak pernah menolong orang malas "*.

Atharvaveda X.2.31,32, yang menyebutkan bahwa : *"tubuh manusia adalah lambang keadaan universal; dalam tubuh manusia terdapat kota sthana dewata, dengan delapan roda dan sembilan pintu; badan merupakan pura bagi jiwa yang abadi, yang diterangi sinar yang luhur; jiwa terbungkus oleh badannya sendiri, raja seluruh alam semesta; la penuh rahasia dan hanya diketahui oleh mereka yang memperoleh penerangan "*.

Rgveda 1.91.13, dinyatakan bahwa : *"Semoga Tuhan Yang Maha Esa datang dan bersemayan dalam hati yang merupakan pura atau sthana-Nya; semoga kami bebas menikmati pahala dari karma kami seperti sapi yang merumput di padang hijau; semoga kita dapat memelihara kebun kehidupan demi keagungan Tuhan Yang Maha Esa; semoga pula kita tetap menjadi abdi-Nya yang benar"*.

Bhagavacigita XVII.8, dinyatakan beberapa jenis makanan yang bersifat Sattvika, yakni makanan yang memberi manfaat yaitu menyucikan hidup; menyehatkan dan menguatkan tubuh; memberikan kegembiraan atau kenikmatan;

memberikan kepuasan dan cinta kasih; meningkatkan hidup; memberikan kelembutan atau kehalusan; memberikan ketahanan dan menyenangkan.

Atharvaveda VI.135.1, dinyatakan mengenai hubungan antara makanan dengan kesehatan, yaitu : *"hendaknya menikmati makanan dengan penuh hati-hati, sehingga makanan itu memberikan manfaat untuk .kekuatan badan; dengan cara ini seseorang mampu mengendalikan petir"*.

Atharvaveda X. 42.2, menyatakan : *"hendaknya makan dengan penuh perhatian"*. Lebih lanjut di dalam Atharvaveda II.13.1, disebutkan bahwa *"mentega cair, madu dan susu sangat baik untuk kesehatan"*.

Manava-dharmasastra V.109, sebagai berikut: *"adbhirgatrani suddhiyanti manah satyena suddhyati, widyatapobyam bhutatma bhudir jnanena suddhyati"* Artinya: Badan dibersihkan dengan air, pikiran disucikan dengan kebenaran, jiwa manusia dengan pelajaran suci dan tapa brata, dan kecerdasan dengan pengetahuan yang benar.

3. Kepercayaan Islam, Hindu, Budha

a. Islam

Kepercayaan dasar Islam dapat ditemukan pada dua kalimat shahādātāin ("dua kalimat persaksian"), yaitu "Laa ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah" yang berarti "Tiada Tuhan selain Allah, Muhammad adalah utusan Allah". Adapun bila seseorang meyakini dan kemudian mengucapkan dua kalimat persaksian ini, berarti ia sudah dapat dianggap sebagai seorang Muslim atau mualaf (orang yang baru masuk Islam dari kepercayaan lamanya). Kaum Muslim percaya bahwa Allah mewahyukan al-Qur'an kepada Nabi Muhammad SAW, Penutup segala Nabi Allah (khataman-nabiyyin), dan menganggap bahwa al-Qur'an dan Sunnah (kata dan amalan Nabi Muhammad SAW) sebagai sumber fundamental Islam Islam juga meyakini al-Qur'an sebagai kitab suci dan pedoman hidup mereka yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. melalui perantara Malaikat Jibril yang sempurna dan tidak ada keraguan di dalamnya (QS al-Baqarah:2). Allah juga telah berjanji akan menjaga keotentikan al-Qur'an hingga akhir zaman dalam suatu ayat.

b. Kristen

Pengakuan **iman** mereka menyebutkan **kepercayaan** akan Allah Tritunggal yang Mahakudus, yakni Bapa, Anak (Yesus **Kristus**), Roh Kudus, Gereja yang satu, kudus, katolik, apostolik; pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal.

c. Budha

Dalam Agama Hindu ada lima keyakinan dan kepercayaan yang disebut dengan Pancasradha. Pancasradha merupakan keyakinan dasar umat Hindu. Kelima keyakinan tersebut, yakni:

- 1) Widhi Tattwa – percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa dan segala aspeknya.
- 2) Atma Tattwa – percaya dengan adanya jiwa dalam setiap makhluk.
- 3) Karmaphala Tattwa – percaya dengan adanya hukum sebab-akibat dalam setiap perbuatan.
- 4) Punarbhava Tattwa – percaya dengan adanya proses kelahiran kembali (reinkarnasi).
- 5) Moksa Tattwa – percaya bahwa kebahagiaan tertinggi merupakan tujuan akhir manusia.

4. Kesimpulan

Nilai adalah sesuatu yang berguna dan baik yang dicita-citakan dan dianggap penting oleh masyarakat oleh masyarakat. *A-Gam-A* berarti tidak pergi atau tetap atau kekal jadi agama dapat diartikan pedoman hidup yang. *Kepercayaan atau Religi*, berasal dari bahasa Latin *Religere/religare* artinya berhati-hati dan berpegang teguh pada aturan-aturan dasar. Jadi kepercayaan atau religi berarti kecenderungan batin (rohani) manusia yang terikat dengan hal-hal yang gaib, suci (kekuatan alam). Indonesia memiliki beberapa agama, sehingga menjadikan persatuan antar umat beragama, pada umumnya semua agama mengajarkan hal-hal yang baik hanya manusianya saja yang sering melanggaranya, maka dari itu toleransi antar umat beragama sangat dianjurkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Kansil, CST & Christine, STK. 2005. *Pendidikan Kewarganegaraan Di Perguruan Tinggi*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Muslich, Masnur. 2011. *Pendidikan Karakter Menjawab Tantangan Krisis Multidimensional*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ruminiati. 2011. *Akulturasi Budaya Asli Indonesia suatu Kajian Multikulturalisme Berbasis Riset*. Malang: Penerbit Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang .Universitas Negeri Malang. 2010.

MODUL IX TEORI KEPRIBADIAN

1. Pengertian Moral

Istilah Moral berasal dari bahasa Latin. Bentuk tunggal kata moral yaitu *mos* sedangkan bentuk jamaknya yaitu *mores* yang masing-masing mempunyai arti yang sama yaitu kebiasaan, adat. Bila kita membandingkan dengan arti kata etika, maka secara etimologis, kata etika sama dengan kata moral karena kedua kata tersebut sama-sama mempunyai arti yaitu kebiasaan, adat. Dengan kata lain, kalau arti kata ‘moral’ sama dengan kata etika, maka rumusan arti kata moral adalah nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Sedangkan yang membedakan hanya bahasa asalnya saja yaitu etika dari bahasa Yunani dan moral dari bahasa Latin. Jadi bila kita mengatakan bahwa perbuatan pengedar narkoba itu tidak bermoral, maka kita menganggap perbuatan orang itu melanggar nilai-nilai dan norma-norma etis yang berlaku dalam masyarakat. Atau bila kita mengatakan bahwa pemerkosa itu bermoral bejat, artinya orang tersebut berpegang pada nilai-nilai dan norma-norma yang tidak baik.

Moralitas (dari kata sifat Latin *moralis*) mempunyai arti yang pada dasarnya sama dengan moral, hanya ada nada lebih abstrak. Berbicara tentang moralitas suatu perbuatan, artinya segi moral suatu perbuatan atau baik buruknya perbuatan tersebut. Moralitas adalah sifat moral atau keseluruhan asas dan nilai yang berkenaan dengan baik dan buruk.

2. Pengertian Dan Teori Kepribadian

Kata *personality* dalam bahasa Inggris berasal dari bahasa Yunani kuno *prosopon* atau *persona*, yang artinya ‘topeng’ yang biasa dipakai artis dalam teater.

Personality mempunyai sinonim yang sangat banyak dalam aplikasinya. Namun ketika semua istilah tersebut dipakai dalam psikologi mempunyai arti atau makna yang berbeda-beda.

Istilah yang berdekatan maknanya itu antara lain:

- a. Personality (kepribadian) penggambaran tingkah laku secara diskriptif tanpa memberi nilai (devaluative).
- b. Character (karakter), penggambaran tingkah laku dengan menonjolkan nilai (benar-salah, baik buruk) baik secara eksplisit maupun implisit.
- c. Disposition (watak), karakter yang telah lama dimiliki dan sampai sekarang belum berubah.
- d. Temperamen (temperamen); kepribadian yang berkaitan erat dengan determinan biologik atau fisiologik, disposisi hereditas.
- e. Traits (sifat); respon yang senada (sama) terhadap sekelompok stimuli yang mirip, berlangsung dalam kurun waktu yang (relatif) lama.
- f. Type-attribute (ciri); mirip dengan sifat, namun dalam kelompok stimuli yang lebih terbatas.
- g. Habit (kebiasaan) respon yang sama cenderung berulang untuk stimulus yang sama pula.

Dalam berbagai kata yang mempunyai pengertian yang hampir sama, para psikolog kemudian membuat definisi tersendiri menurut pengetahuan mereka masing-masing, antara lain:

- a. Allport mengemukakan kepribadian adalah organisasi-organisasi dinamis dari sistem-sistem psikofisik dalam individu yang turut menentukan cara-caranya yang unik atau khas dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya.
- b. Koentjaraningrat (1980) menyebut kepribadian atau personality sebagai –susunan unsur-undur akal dan jiwa yang menentukan perbedaan tingkah laku atau tindakan dari tiap-tiap individu manusia.
- c. Hartmann menyebutkan kepribadian adalah Susunan yang terintegrasi dari ciri-ciri umum seseorang individu sebagaimana dinyatakan dalam corak khas yang tegas diperlihatkannya kepada orang lain.

Dari seluruh definisi yang telah dikemukakan diatas Wetherington menyimpulkan bahwa kepribadian mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Manusia karena keturunannya mula sekali hanya merupakan individu dan kemudian barulah merupakan suatu pribadi karena pengaruh belajar dan lingkungan sosialnya.
- b. Kepribadian adalah istilah untuk menyebutkan tingkah laku seseorang secara terintegrasi dan bukan hanya beberapa aspek saja dari keseluruhan itu.
- c. Kata kepribadian menyatakan pengertian tertentu saja yang ada pada pikiran orang lain dan isi pikiran itu ditentukan oleh nilai perangsang sosial seseorang.
- d. Kepribadian tidak menyatakan sesuatu yang bersifat statis, seperti bentuk badan atau ras, tetapi menyertakan keseluruhan dan kesatuan dari tingkah laku seseorang.
- e. Kepribadian tidak berkembang secara pasif saja, setiap orang mempergunakan kapasitasnya secara aktif untuk menyesuaikan diri kepada lingkungan sosial.

Jadi pada dasarnya dapat disimpulkan bahwa kepribadian merupakan pernyataan atau istilah yang digunakan menyebut tingkah laku seseorang yang terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari.

Selanjutnya dari sudut filsafat dikemukakan pendapat: William Stern Menurut William Stern kepribadian adalah suatu kesatuan yang banyak (Unita Multi Complex) yang diarahkan kepada tujuan-tujuan tertentu dan mengandung sifat-sifat khusus individu, yang bebas menentukan dirinya sendiri.

Prof Kohnstamm Ia menentang William Stern yang meniadakan kesadaran pada pribadi terutama kepada Tuhan. Menurut Kohnstamm; Tuhan merupakan pribadi yang menguasai alam semesta. Dengan kata lain kepribadian sama artinya dengan teistis (keyakinan). Orang yang berkepribadian menurutnya ialah orang yang berkeyakinan ketuhanan. Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan, bahwa dalam pandangan filsafat kepribadian diidentikkan dengan kepercayaan terhadap Tuhan dan keagamaannya.

3. Kemoralan Sosial

Kemoralan Sosial ialah Hukum, adat, kebiasaan dan budi pekerti Kesusilaan, adab, sopan santun dan tradisi yang menentukan peraturan & kepriawaian sebuah komuniti yang bergaul & bercampur dgn masyarakat. Berkait erat dengan hubungan sesama manusia Etika (ethos), Moral (mores) Sosial, teori Kemoralan Sosial, Peraturan yang ditentukan oleh masyarakat dan dijadikan sebagai undang-undang dalam masyarakat. Berkaitan erat dengan peraturan masyarakat seperti tatahukum, tatasusila, tatatertib, norma, tradisi, kebiasaan, nilai

4. Kepribadian Mulia

Teori keperibadian mulia menekankan sifat pribadi untuk mencapai kehidupan yang baik menekankan sifat pribadi untuk mencapai kehidupan yang baik.

5. Contoh Perilaku Akhlak Yang Mulia:

- a. Berani jika melakukan hal kebaikan
- b. Adil dalam menentukan atau memutuskan sesuatu keputusan;
- c. Bijaksana dalam menghadapi dan memutuskan sesuatu;
- d. Mendahulukan kepentingan orang lain dari pada kepentingan diri sendiri;
- e. Pemurah dan suka memberi atau bersedekah;
- f. Ikhlas dalam melakukan setiap pertolongan;
- g. Bersopan-santun dan menjaga bahasa semasa bertutur;
- h. Tidak berbohong dan bersikap jujur;
- i. Bersikap tenang dalam menghadapi masalah;
- j. Bersikap pemaaf dan meminta maaf jika melakukan kesalahan;

6. Kesimpulan

Arti kata ‘moral’ sama dengan kata etika, maka rumusan arti kata moral adalah nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya.

Hartmann menyebutkan kepribadian adalah Susunan yang terintegrasikan dari ciri-ciri umum seseorang individu sebagaimana dinyatakan dalam corak khas yang tegas diperlihatkannya kepada orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Kansil, CST & Christine, STK. 2005. *Pendidikan Kewarganegaraan Di Perguruan Tinggi*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Muslich, Masnur. 2011. *Pendidikan Karakter Menjawab Tantangan Krisis Multidimensional*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ruminiati. 2011. *Akulturasi Budaya Asli Indonesia suatu Kajian Multikulturalisme Berbasis Riset*. Malang: Penerbit Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang .Universitas Negeri Malang. 2010

MODUL X WAWASAN NUSANTARA

1. Pengertian Wawasan Nusantara

Wawasan nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan bentuk geografinya berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dalam pelaksanaannya, wawasan nusantara mengutamakan kesatuan wilayah dan menghargai kebhinekaan untuk mencapai tujuan nasional

2. Sifat Wawasan Nusantara

Wawasan nusantara mempunyai sifat:

1. Manunggal

Keserasian dan keseimbangan yang dinamis dalam segenap aspek kehidupan, baik aspek alamiah maupun aspek sosial. Segenap aspek sosial itu selalu menuntut untuk dimanunggalkan secara serasi dan berimbang, sesuai dengan makna Bhineka Tunggal Ika yang merupakan sifat asasi dari negara pancasila.

2. Utuh menyeluruh.

Utuh menyeluruh bagi nusantara dan rakyat Indonesia sehingga merupakan satu kesatuan yang utuh, bulat dan tidak dapat dipecah-pecah oleh kekuatan apapun dan bagaimanapun, sesuai dengan satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa.

3. Cara kerja.

Cara kerja dalam wawasan nusantara berpedoman pada pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, bahwa dalam pandangan hidup bangsa Indonesia yaitu pancasila telah terkandung pula cita-cita, asas-asas serta nilai-nilai filosofis.

3. Manfaat Dan Peran Wawasan Nusantara Terhadap Pendidikan Karakter Bangsa

Sebagai bangsa yang berketuhanan Yang Maha Esa mempercayai bahwa Tuhan telah menciptakan makhluk manusia yang paling sempurna. Disamping manusia mempunyai bentuk, wujud, kehidupam, reaksi, naluri juga mempunyai daya fikir.

Kansil, CST & Christine, STK (2005:) menyimpulkan bahwa: Kita ketahui bahwa tujuan dari wawasan nusantara adalah mewujudkan kesatuan dalam segala aspek kehidupan nasional yaitu aspek alamiah dan aspek sosial. Aspek alamiah meliputi hubungan manusia dengan alam dan manusia adalah makhluk yang wajib menjaga alam ini agar tetap lestari untuk menjaga alam ini perlu kesadaran manusia, kesadaran ini tidak akan terwujud tanpa adanya budi pekerti yang baik serta wawasan atau pandangan dalam melihat masa depan. Aspek sosial meliputi hubungan antara manusia dengan manusia, hubungan antara manusia dengan manusia ini akan mudah untuk mencapai kesatuan, apabila dibarengi dengan kesadaran serta pemikiran yang jernih dan saling menghargai.

Dari kedua aspek tersebut terlihat bahwa wawasan nusantara merupakan alam fikiran yang dapat menimbulkan atau menumbuhkan kembangkan kesadaran hidup manusia, kesadaran hidup manusia ini adalah langkah pertama untuk mencapai moral yang baik dalam kehidupan. Jika moral seorang itu baik, maka moral yang baik itu akan mendorong untuk menjadikan nurani manusia menjadi baik (budi nurani). Secara umum jika budi nurani itu sudah muncul maka budi pekerti yang sangat dibutuhkan untuk mencapai karakter yang baik akan berkembang dalam hidup manusia.

Dari pengertian diatas terlihat bahwa peran wawasan nusantara sangat besar dalam menumbuhkan kembangkan karakter dalam diri manusia. Dan peran wawasan nusantara terhadap pendidikan karakter bangsa ini sangat membantu dan bermanfaat.

4. Wawasan Nusantara Dalam Kehidupan Nasional

Wawasan Nusantara dalam kehidupan nasional adalah menjadi pola yang mendasari cara berfikir, bersikap dan bertindak dalam rangka menghadapi, menyikapi, menangani berbagai permasalahan menyangkut kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang berorientasi pada kepentingan rakyat dan wilayah tanah air secara utuh dan menyeluruh dalam bidang :

- a. Politik, menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis.
- b. Ekonomi, menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata.
- c. Sos-Bud (Sosial dan Budaya), menciptakan sikap batiniah dan lahiriah yang mengakui dan menerima serta menghormati : segala bentuk perbedaan (kebhinekaan) sebagai kenyataan yang hidup disekitarnya dan sekaligus sebagai karunia Tuhan.
- d. Han-Kam (Pertahanan dan Keamanan), menumbuhkembangkan kesadaran cinta tanah air dan bangsa yang lebih lanjut akan membentuk sikap bela negara pada setiap warga negara Indonesia.

5. Peranan Wawasan Nusantara Dalam Era Globalisasi

Wawasan nusantara adalah cara pandang suatu bangsa yang telah menegara tentang diri dan lingkungannya dalam eksistensinya yang serba terhubung (interaksi & interelasi) serta pembangunannya di dalam bernegara di tengah-tengah lingkungannya baik nasional ,regional,maupun global.Wawasan nasional di bentuk dan di jiwai oleh paham kekuasaan dan geopolitik yang dianut oleh Negara yang bersangkutan. Wawasan nasional indonesia di kembangkan berdasarkan wawasan nasional secara universal sehingga di bentuk dan di jiwai oleh paham kekuasaan dan geopolitik yang di pakai Negara Indonesia.

Masuknya globalisasi ekonomi dan budaya oleh negara sekular ke negara berkembang selalu akan melalui sistem pemerintahan negara berkembang itu sendiri. Oleh karena itu, sistem pemerintahan negara berkembang yang bercorak sekular dan materialistik akan menjadi makanan empuk bagi program globalisasi negara maju. Akan ditemui segelintir elit (pejabat pemerintah dan swasta) nasional yang mendukung program mereka dalam memperkaya diri dan mengeksploitasi rakyat serta menyerap kekayaan tanah air. Oleh karena itu diperlukan orang-orang kuat dalam negara berkembang yang mampu menahan gelombang arus globalisasi disamping penataan sistem pemerintahan berdasarkan moral agama.

6. Kesimpulan

Wawasan nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkan ide nasionalnya, yang dilandasi Pancasila dan UUD 1945, Pancasila dan UUD 1945 merupakan aspirasi bangsa Indonesia yang merdeka berdaulat dan bermartabat serta menjiwai tata hidup dan tindak kebijakannya dalam mencapai tujuan nasional. Pendidikan karakter merupakan suatu pondasi bangsa yang sangat penting dan perlu ditanamkan sejak dini kepada anak-anak.

Tujuan dari wawasan nusantara adalah mewujudkan kesatuan dalam segala aspek kehidupan nasional yaitu aspek alamiah dan aspek sosial. Aspek alamiah meliputi hubungan manusia dengan alam dan manusia adalah makhluk yang wajib menjaga alam ini agar tetap lestari untuk menjaga alam ini perlu kesadaran manusia, kesadaran ini tidak akan terwujud tanpa adanya budi pekerti yang baik serta wawasan atau pandangan dalam melihat masa depan. Aspek sosial meliputi hubungan antara manusia dengan manusia, hubungan antara manusia dengan manusia ini akan mudah untuk mencapai kesatuan, apabila dibarengi dengan kesadaran serta pemikiran yang jernih dan saling menghargai.

DAFTAR PUSTAKA

- Kansil, CST & Christine, STK. 2005. *Pendidikan Kewarganegaraan Di Perguruan Tinggi*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Muslich, Masnur. 2011. *Pendidikan Karakter Menjawab Tantangan Krisis Multidimensional*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ruminiati. 2011. *Akulturasi Budaya Asli Indonesia suatu Kajian Multikulturalisme Berbasis Riset*. Malang: Penerbit Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang .Universitas Negeri Malang. 2010.
- Pedoman Penulisan Karya Ilmiah: Skripsi, Tesis, Desertasi, Artikel, Makalah, Tugas Akhir, Laporan Penelitian*. Edisi Kelima. Malang: Penerbit Universitas Negeri Malang.

MODUL XI GEOPOLITIK

1. Pengertian Geopolitik

Geopolitik berasal dari dua kata yakni –Geo dan –Politik. Dari dua kata tersebut dapat diartikan bahwa geopolitik tidak terlepas dari pembahasan yang mencakup masalah geografi dan politik suatu negara. Istilah Geopolitik pertama kali digunakan oleh Rudolf Kjeellen, seorang ahli politik dari Swedia pada tahun 1905, sebagai cabang dari geografi politik, geopolitik fokus pada perkembangan dan kebutuhan akan ruang bagi suatu negara.

Geopolitik diartikan sebagai sistem politik atau peraturan-peraturan dalam wujud kebijaksanaan dan strategi nasional yang didorong oleh aspirasi nasional geografik (kepentingan yang titik beratnya terletak pada pertimbangan geografik, wilayah atau teritorial dalam arti luas) suatu negara, yang apabila dilaksanakan dan berhasil akan berdampak langsung atau tidak langsung kepada sistem politik suatu negara. Sebaliknya politik negara itu secara langsung akan berdampak langsung kepada geografi negara bersangkutan. Geopolitik bertumpu pada geografi sosial (hukum geografis), mengenai situasi, kondisi, atau konstelasi geografi dan segala sesuatu yang dianggap relevan dengan karakteristik geografi suatu Negara.

Sebagai negara kepulauan dan ber bhineka Indonesia mempunyai kekuatan dan kelemahan. Kekuatannya terletak pada posisi dan keadaan geografi yang strategis dan kaya sumberdaya alam. Sementara kelemahannya terletak pada wujud kepulauan dan keanekaragaman masyarakat yang harus disatukan dalam satu bangsa dan satu tanah air, sebagaimana telah diperjuangkan oleh para pendiri negara ini. Dorongan kuat untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan melalui Sumpah Pemuda tahun 1928 dan berlanjut pada proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945¹. Dalam pelaksanaannya Indonesia tidak bebas dari

¹ Harsawaskita, A. 2007. “*Great Power Politics di Asia Tengah: Suatu Pandangan Geopolitik*”, dalam *Transformasi dalam Studi Hubungan Internasional*. Bandung: Graha Ilmu

pengaruh interaksi dan interaksi dengan lingkungan sekitarnya, baik lingkungan, regional maupun internasional.

Penyelenggaraan Negara kesatuan Republik Indonesia sebagai system kehidupan nasional bersumber dari dan bermuara pada landasan ideal pandangan hidup dan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. dalam pelaksanaannya bangsa Indonesia tidak bebas dari pengaruh interaksi dan interelasi dengan lingkungan sekitarnya, baik lingkungan regional maupun internasional. Dalam hal ini bangsa Indonesia perlu memiliki prinsip-prinsip dasar sebagai pedoman agar tidak terombang-ambing dalam memperjuangkan kepentingan nasional untuk mencapai cita-cita dan tujuan nasionalnya. Salah satu pedoman bangsa Indonesia adalah wawasan nasional yang berpijak pada wujud wilayah nusantara sehingga disebut dengan wawasan nusantara. Kepentingan nasional yang mendasar bagi bangsa Indonesia adalah upaya menjamin persatuan dan kesatuan wilayah, bangsa, dan segenap aspek kehidupan nasionalnya. Karena hanya dengan upaya inilah bangsa dan Negara Indonesia dapat tetap eksis dan dapat melanjutkan perjuangan menuju masyarakat yang dicita-citakan.

Oleh karena itu, wawasan nusantara adalah geopolitik Indonesia. Hal ini dipahami berdasarkan pengertian bahwa dalam wawasan nusantara terkandung konsepsi geopolitik Indonesia, yaitu unsur ruang, yang kini berkembang tidak saja secara fisik geografis, melainkan dalam pengertian secara keseluruhan.

2. Wawasan Nusantara sebagai Geopolitik Indonesia

Cara pandang suatu bangsa memandang tanah air dan beserta lingkungannya menghasilkan wawasan nasional. Wawasan nasional itu selanjutnya menjadi pandangan atau visi bangsa dalam menuju tuannya. Namun tidak semua bangsa memiliki wawasan nasional Inggris adalah salah satu contoh bangsa yang memiliki wawasan nasional yang berbunyi *Britain rules the waves*. Ini berarti tanah inggris bukan hanya sebatas pularnya, tetapi juga lautnya. Adapun bangsa Indonesia memiliki wawasan nasional yaitu wawasan nusantara.

Secara konsepsional wawasan nusantara (Wasantara)² merupakan wawasan nasionalnya bangsa Indonesia. Perumusan wawasan nasional bangsa Indonesia yang selanjutnya disebut Wawasan Nusantara itu merupakan salah satu konsepsi politik dalam ketatanegaraan Republik Indonesia.

Sebagai Wawasan nasional dari bangsa Indonesia maka wilayah Indonesia yang terdiri dari daratan, laut dan udara di atasnya dipandang sebagai ruang hidup (lebensraum) yang satu atau utuh. Wawasan nusantara sebagai wawasan nasionalnya bangsa Indonesia dibangunatas pandangan geopolitik bangsa. Pandangan bangsa Indonesia didasarkan kepada konstelasi lingkungan tempat tinggalnya yang menghasilkan konsepsi wawasan Nusantara. Jadi wawasan nusantara merupakan penerapan dari teori geopolitik bangsa Indonesia.

Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam. Atau cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayahh dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Kedudukan wawasan nusantara adalah sebagai visi bangsa. Visi adalah keadaan atau rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan. Wawasan nasional merupakan visi bangsa yang bersangkutan dalam menuju masa depan. Visi bangsa Indonesia sesuaidengan konsep wawasan Nusantara adalah menjadi bangsa yang satu dengan wilayah yang satu dan utuh pula.

² Hidayat, I.Mardiyono. 1983. *Geopolitik, Teori dan Strategi Politik dalam Hubungannya dengan Manusia, Ruang dan Sumber Daya Alam*. Surabaya: Usaha Nasional.

3. Implementasi Geopolitik (Wawasan Nusantara)

a. Wawasan Nusantara Sebagai Pancaran Falsafah Pancasila

Falsafah Pancasila diyakini sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia yang sesuai dengan aspirasinya. Keyakinan ini dibuktikan dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia sejak awal proses pembentukan Negara kesatuan Republik Indonesia sampai sekarang. Konsep Wawasan Nusantara berpangkal pada dasar Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama yang kemudian melahirkan hakikat misi manusia Indonesia yang terjabarkan pada sila-sila berikutnya. Wawasan nusantara sebagai aktualisasi falsafah Pancasila menjadi landasan dan pedoman kelangsungan hidup bangsa Indonesia.

Dengan demikian wawasan Nusantara menjadi pedoman bagi upaya mewujudkan kesatuan aspek kehidupan nasional untuk menjamin kesatuan, persatuan dan keutuhan bangsa, serta upaya untuk mewujudkan ketertiban dan perdamaian dunia. dan Wawasan Nusantara merupakan konsep dasar bagi kebijakan dan strategi pembangunan Nasional.

b. Perwujudan kepulauan Nusantara sebagai Satu kesatuan Politik

Kekayaan di seluruh wilayah Nusantara, baik potensial maupun efektif, adalah modal dan milik bangsa untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan di seluruh wilayah Indonesia secara merata. Tingkat perkembangan ekonomi harus seimbang dan serasi di seluruh daerah tanpa mengabaikan ciri khas yang dimiliki daerah masing-masing. serta Kehidupan perekonomian di seluruh Indonesia diselenggarakan sebagai usaha bersama dengan asas kekeluargaan dalam sistem ekonomi kerakyatan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

c. Penerapan Geopolitik (Wawasan Nusantara)

Salah satu manfaat paling nyata dari penerapan wawasan Nusantara, khususnya, di bidang wilayah, adalah diterimanya konsepsi Nusantara di forum internasional, sehingga terjaminlah integritas wilayah teritorial Indonesia. Laut Indonesia yang semula dianggap bebas menjadi bagian integral dari wilayah Indonesia. Di samping itu pengakuan terhadap landas kontinen Indonesia dan ZEE Indonesia menghasilkan penambahan luas wilayah yang cukup besar.

Pertambahan luas wilayah sebagai ruang hidup tersebut menghasilkan sumber daya alam yang cukup besar untuk kesejahteraan bangsa Indonesia. Penerapan wawasan nusantara dalam pemabangunan Negara di berbagai bidang tampak pada berbagai proyek pembangunan sarana dan prasarana komunikasi dan transportasi. Penerapan di bidang sosial budaya terlihat pada kebijakan untuk menjadikan bangsa Indonesia yang Bhineka Tungga Ika tetap merasa sebangsa dan setanah air, senasib sepenanggungan dengan asas pancasila. Penerapan Wawasan Nusantara di bidang pertahanan keamanan terlihat pada kesiapan dan kewaspadaan seluruh rakyat melalui Sistem Pertahan keamanan Rakyat semesta untuk menghadapi berbagai ancaman bangsa dan Negara.

4. **Kesimpulan**

Geopolitik merupakan suatu sistem politik atau peraturan-peraturan dalam wujud kebijaksanaan dan strategi nasional yang didorong oleh aspirasi nasional geografik. Konsep geopolitik ini hendaknya terus diterapkan dan dikembangkan agar dapat mencapai tujuan-tujuan Wawasan Nusantara yang telah ditetapkan, yaitu mewujudkan kesejahteraan, ketenteraman dan keamanan bagi Bangsa Indonesia, dengan demikian ikut serta juga dalam membina kebahagiaan dan perdamaian bagi seluruh umat manusia di dunia

DAFTAR PUSTAKA

- Harsawaskita, A. 2007. *“Great Power Politics di Asia Tengah: Suatu Pandangan Geopolitik”*, dalam *Transformasi dalam Studi Hubungan Internasional*. Bandung: Graha Ilmu.
- Hidayat, I.Mardiyono. 1983. *Geopolitik, Teori dan Strategi Politik dalam Hubungannya dengan Manusia, Ruang dan Sumber Daya Alam*. Surabaya: Usaha Nasional.
<http://daniiskandarmanajemen.blogspot.com/2014/11/17/implementasi-wawasan-nusantara.html>
- Kaelan, M.S. dan Zubaidi, Ahmad. 2007. *Pendidikan Kewarganegaraan utuk Perguruan Tinggi*. Yogyakarta : Penerbit Paradigma Yogyakarta.
- Makarim,N.A.2004.Geopolitik. Tersedia:[http://www.kompas.com/kompas cetak utama](http://www.kompas.com/kompas_cetak_utama).
- Sunardi, RM, 2004, *Pembinaan Ketahan Bangsa*, PT. Kuarternita Adidarma, Jakarta.

MODUL 12 GEOSTRATEGI

1. Pengertian Geostrategi

Geostrategi berasal dari kata –geologi yang berarti bumi, dan –strategi diartikan sebagai usaha dengan menggunakan segala kemampuan atau sumber daya baik SDM maupun SDA untuk melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan. Dalam kaitannya dengan kehidupan suatu negara, geostrategi diartikan sebagai metode atau aturan-aturan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan melalui proses pembangunan yang memberikan arahan tentang bagaimana membuat strategi pembangunan dan keputusan yang terukur dan terimajinasi guna mewujudkan masa depan yang lebih baik, lebih aman dan bermartabat.

Geostrategi merupakan strategi dalam memanfaatkan konstelasi geografi negara untuk menentukan kebijakan, tujuan, serta sarana-sarana untuk mencapai tujuan nasional. Geostrategi dapat pula dikatakan sebagai pemanfaatan kondisi lingkungan dalam upaya mewujudkan tujuan politik. Suatu strategi memanfaatkan kondisi geografi Negara dalam menentukan kebijakan, tujuan, sarana utk mencapai tujuan nasional (pemanfaatan kondisi lingkungan dalam mewujudkan tujuan politik). Geostrategi Indonesia diartikan pula sebagai metode untuk mewujudkan cita-cita proklamasi sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan dan UUD 1945. Ini diperlukan utk mewujudkan dan mempertahankan integrasi bangsa dalam masyarakat majemuk dan heterogen berdasarkan Pembukaan dan UUD 1945.

Pada awalnya geostrategi diartikan sebagai geopolitik untuk kepentingan militer atau perang. Di Indonesia geostrategi diartikan sebagai metode untuk mewujudkan cita-cita proklamasi, sebagaimana tercantum dalam Mukadimah UUD 1945, melalui proses pembangunan nasional. Karena tujuan itulah maka ia menjadi doktrin pembangunan dan diberi nama Ketahanan Nasional. Mengingat geostrategi Indonesia memberikan arahan tentang bagaimana membuat strategi pembangunan guna mewujudkan masa depan yang lebih baik, lebih aman.

Ketahanan nasional pertama kali diperkenalkan oleh Bung Karno pada tahun 1960-1n. Geostrategi Indonesia tiada lain adalah ketahanan nasional. Ketahanan

Nasional merupakan kondisi dinamik suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional, di dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman, baik yang datang dari luar maupun dari dalam, yang langsung maupun tidak langsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan Negara serta perjuangan mengejar tujuan nasional.

2. **Konsep Dasar Ketahanan Nasional**

Terdapat 4 konsep dasar ketahanan nasional yaitu :

A. Model Astagatra

Model Astagatra merupakan perangkat hubungan bidang kehidupan manusia dan budaya yang berlangsung diatas bumi dengan memanfaatkan segala kekayaan alam. Terdiri 8 aspek kehidupan nasional :

- 1) Tiga aspek (tri gatra) kehidupan alamiah, yaitu :
 - a) Gatra letak dan kedudukan geografi
 - b) Gatra keadaan dan kekayaan alam
 - c) Gatra keadaan dan kemampuan penduduk
- 2) Lima aspek (panca gatra) kehidupan social, yaitu :
 - a) Gatra ideologi
 - b) Gatra Politik
 - c) Gatra ekonomi
 - d) Gatra sosial budaya
 - e) Gatra pertahanan dan keamanan.

B. Model Morgenthau

Model Morgenthau bersifat deskriptif kualitatif diturunkan secara analitis atas tata kehidupan nasional secara makro sehingga ketahanan masyarakat bangsa terwujud sebagai kekuatan.

C. Model AT Mahan

Model AT Mahan merupakan kekuatan nasional yang meliputi :

- 1) Letak geografi
- 2) Bentuk dan wujud bumi

- 3) Luas wilayah
- 4) Jumlah penduduk
- 5) Watak nasional dan bangsa
- 6) Sifat pemerintahan

D. Model Cline

Model Cline melihat suatu Negara dari luar sebagaimana dipersepsikan oleh Negara lain. Baginya hubungan antar Negara pada hakekatnya amat dipengaruhi oleh persepsi suatu Negara terhadap Negara lainnya, termasuk didalamnya persepsi atas sistem penangkalan dari Negara lainnya.

3. Hakikat Ketahanan Nasional

Kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa untuk dapat menjamin kelangsungan hidupnya menuju kejayaan bangsa dan Negara. Ketahanan Nasional tergantung pada kemampuan bagus dan seluruh warga Negara dalam membina dan mengembangkan aspek alamiah serta aspek social. Ketahanan nasional mengandung makna keutuhan semua potensi yang terdapat di wilayah nasional, baik secara fisik maupun social serta memiliki hubungan erat antara gatra (unsur) di dalamnya secara komprehensif – integral. Kelemahan salah satu unsur akan mengakibatkan kelemahan bidang yang lain. Demikian pula sebaliknya, sehingga dapat mempengaruhi kondisi secara keseluruhan. Ketahanan nasional berinteraksi positif dengan segenap unsur kehidupan nasional.

4. Ketahanan Nasional sebagai Perwujudan Geostrategi Indonesia

Perkembangan Konsep Pengertian Tannas

Gagasan Tannas oleh Seskoad tahun 1960-an. Tannas adalah pertahanan wilayah oleh seluruh rakyat. Gagasan Tannas oleh Lemhanas tahun 1963-an. Tannas adalah keuletan dan daya tahan nasional dalam menghadapi segala kekuatan, baik yang datang dari luar maupun dan dalam yang langsung ataupun tidak langsung membahayakan kelangsungan negara dan bangsa Indonesia.

Gagasan Tannas oleh Lemhanas tahun 1969-an. Tannas adalah keuletan dan daya tahan nasional dalam menghadapi segala ancaman, baik yang datang dari luar maupun dari dalam yang langsung ataupun tidak langsung membahayakan kelangsungan negara dan bangsa Indonesia

Gagasan Tannas berdasar SK Menhankam/Pangab No. SKEP/1382/XG/1974. Ketahanan Nasional adalah merupakan kondisi dinamis suatu bangsa berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional di dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman, gangguan, dan tantangan, baik yang datang dari dalam maupun dari luar yang langsung ataupun tidak langsung , membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan nasional.

Gagasan Tannas menurut GBHN 1978-1997. Tannas adalah kondisi dinamis yang merupakan integritasi dari kondisi tiap aspek kehidupan bangsa dan negara.

5. Hubungan Geopolitik dan Geostrategi

Dalam penyelenggaraan kehidupan nasional agar tetap megarah pada pencapaian tujuan nasional diperlakukan suatu landasan dan pedoman yang kokoh berupa konsepsi wawasan nasional. Wawasan Nasional Indonesia menumbuhkan dorongan dan rangsangan untuk mewujudkan aspirasi bangsa serta kepentingan dan tujuan nasional. upaya pencapaian tujuan nasional dilakukan dengan pembangunan nasional yang juga harus berpedoman pada wawsan nasional.

Dalam proses pembangunan nasional untuk pencapaian tujuan nasional selalu menghadapi berbagai kendala dan ancaman. Untuk mengatasi perlu dibangun suatu kondisi kehidupan nasional yang disebut katahan nasioanl. Kenerhasilan pembangunan akan meningkatkan kondisi dinamik kehidupan nasional dalam wujud ketahan nasional yang tangguh. Sebaliknya, ketahan nasional yang tangguh akan mendorong pembangunan nasional semakin baik.

Sebagai satu kesatuan negara kepulauan, secara konseptual, geopolitik Indonesia dituangkan dalam salah satu doktrin nasional yang disebut Wawasan Nusantara dan politik luar negeri bebas aktif. sedangkan geostrategi Indonesia

diwujudkan melalui konsep Ketahanan Nasional yang bertumbuh pada perwujudan kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Dengan mengacu pada kondisi geografi bercirikan maritim, maka diperlukan strategi besar (grand strategy) maritim sejalan dengan doktrin pertahanan defensif aktif dan fakta bahwa bagian terluar wilayah yang harus dipertahankan adalah laut. Implementasi dari strategi maritim adalah mewujudkan kekuatan maritim (maritime power) yang dapat menjamin kedaulatan dan integritas wilayah dari berbagai ancaman. Selain itu hubungan geopolitik dan geostrategi terdapat dalam astra gatra.

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa Geopolitik dan Geostrategi merupakan konsepsi yang saling mendukung antara sebagai pedoman bagi penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara agar tetap jaya dan berkembang seterusnya.

6 Studi Kasus yang terkait dengan Geopolitik dan Geostrategi di Indonesia Ambalat, Diplomasi Vs Konfrontasi

AMBALAT kembali mencuri perhatian. Kapal perang Malaysia berkali-kali melanggar teritori Indonesia dan diusir armada angkatan laut kita. Mencuat pada 2005, mengapa krisis Ambalat kembali terjadi? Apa solusi terbaiknya? Ambalat adalah sebuah gugus pulau di sekitar 118.2558 Bujur Timur (BT)-118.254167 BT dan 2.56861 Lintang Utara (LU)- 3.79722 LU yang terletak di perairan Laut Sulawesi, sebelah timur Pulau Kalimantan Timur. Sengketa Ambalat Indonesia-Malaysia menyeruak karena klaim kepemilikan. Pada 2005³, krisis Ambalat ditandai dengan show of force kedua angkatan bersenjata, penembakan kapal nelayan kita oleh Malaysia, dan aneka aksi demonstrasi mengecam Malaysia. Ambalat disebut sebagai wilayah Republik Indonesia (RI) sesuai Undang-undang No 4 Tahun 1960 tentang Perairan RI yang telah sesuai dengan konsep hukum Negara Kepulauan (Archipelagic State). Undang-undang ini telah diakui dalam Konvensi PBB tentang Hukum Laut (United Nations Convention on the Law of the Sea/UNCLOS) ditetapkan dalam Konferensi III PBB di Montego Bay,

³ Soeminaro, Slamet, 2005, *Geopolitik Indonesia*, Jakarta, Dirjendikti, Makalah SUSCADOS Angkatan I 2005.

Jamaika, 10 Desember 1982. Konvensi ini kemudian diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-undang No 17 Tahun 1985 tentang pengesahan UNCLOS.

Malaysia mengklaim Ambalat sebagai wilayah kedaulatannya sesuai dengan peta wilayah yang dibuat Malaysia pada 1979. Peta itu didasarkan pada The Convention on The Territorial Sea and the Contiguous zone 1958 dan The Continental Shelf Convention 1958.

Peta Laut 1979 tersebut juga telah memasukkan Pulau Sipadan dan Ligitan ke dalam wilayah Malaysia. Malaysia memberi Ambalat (wilayah XYZ) kepada Shell atas dasar perjanjian bagi hasil (Production Sharing Contract) pada 16 Februari 2005.

Masalah Ambalat menjadi penting bagi Indonesia karena setidaknya ia mencakup tiga dari empat variabel kepentingan nasional. Pertama, dari sisi keamanan nasional, ada masalah penjagaan integritas wilayah nasional yang cukup sensitif. Bagi kaum realisme politik internasional, masalah- masalah keamanan nasional semacam ini justru menjadi fokus utama kebijakan negara. Pengamat militer, Andi Wijayanto dalam wawancara TVOne (27/5/09) menyatakan, langkah Malaysia sejatinya bisa dimaknai sebagai upaya ingin menguji kedaulatan efektif kita atas Ambalat.

Kedua, ada persoalan citra dan harga diri bangsa karena perasaan terlecehkan sebagai negara berdaulat dengan manuver angkatan laut Malaysia. Ini berakumulasi dengan memori kehilangan kita atas Sipadan dan Ligitan, aneka kasus kekerasan pada TKI, klaim Malaysia atas Lagu 'Rasa Sayang', reog dan batik misalnya. Artinya para patriot dan nasionalis menginginkan bahwa harga diri kita harus tegak sebagai bangsa berdaulat.

Ketiga ada ancaman bagi kesejahteraan ekonomi karena potensi ekonomi dari minyak Ambalat ditakutkan jatuh ke pihak luar. Pakar ekonomi minyak Dr Kurtubi pada 2005 menyatakan secara kasar Ambalat memiliki cadangan migas seharga 40 miliar dolar AS. Tentu, nilai ini cukup signifikan jika bisa masuk ke kas negara kita

Dengan ketiga kepentingan nasional tersebut, maka pilihan instrumen politik luar negeri yang tersedia adalah diplomasi atau konfrontasi. Namun diplomasi

memiliki beberapa kelebihan. Pertama, pada tataran praktik, secara nyata telah ada upaya diplomasi sejak 2005 yang dijalankan kedua negara untuk menyelesaikan Ambalat. Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono (20/5/09) juga menyatakan perundingan Ambalat masih berlangsung. Artinya pilihan penyelesaian diplomatik adalah yang paling rasional meski harus dikawal.

Komunikasi Diplomatik

Penyelesaian diplomatik dimulai dengan pembukaan komunikasi diplomatik Indonesia dengan Malaysia (keterangan pers Departemen Luar Negeri, Jumat 4 Maret 2005). Malaysia menjawab pada 25 Februari 2005 dengan menyampaikan pandangan mereka bahwa wilayah itu adalah wilayahnya. Presiden SBY kemudian berkomunikasi dengan Perdana Menteri Malaysia Abdullah Ahmad Badawi melalui telepon Senin 8 Maret 2005 sebelum meninjau Ambalat. Pembicaraan berlangsung konstruktif untuk menyelesaikan masalah dengan baik dan Badawi pun akan mengirimkan Menteri Luar Negeri Malaysia untuk mengunjungi Indonesia.

Diplomasi memasuki babak baru setelah Menlu Malaysia Syed Hamid Albar bertemu dengan Menlu RI Hasan Wirajuda di Jakarta (9/3/2005) bahkan diterima oleh Presiden SBY. Dalam pertemuan antarmenlu telah disepakati bahwa kedua belah pihak akan membentuk tim teknis yang akan melakukan perundingan ke arah penyelesaian Blok Ambalat. Pertemuan penyelesaian diplomasi pertama dilakukan pada 22 dan 23 Maret 2005. Pertemuan tim teknis Indonesia-Malaysia dilanjutkan di Langkawi pada 25-26 Mei, di Yogyakarta 25-26 Juli, di Johor Baru pada 27-28 September 2005 dan Desember 2005.

Namun hingga 2006 masalah sengketa Blok Ambalat antara Malaysia dan Indonesia masih dalam proses perundingan oleh kedua negara dan belum ada penyelesaian yang dapat diterima oleh kedua negara. Dalam pertemuan bilateral antara PM Abdullah Ahmad Badawi dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Gedung Negara Tri Arga, Bukittinggi, Sumatera Barat, pada 12-13 Januari 2006 telah disepakati bahwa, sengketa Blok Ambalat akan terus diselesaikan secara perundingan.

Kedua, secara moral penyelesaian diplomasi lebih dipilih karena diplomasi merupakan instrumen politik luar negeri yang beradab, murah, dan terukur. Konfrontasi dan perang semakin banyak dicibir karena tidak hanya mahal tetapi juga karena efek rusaknya yang sulit terkontrol. Yang menyedihkan adalah analisa bahwa dari sisi Alutsista kita akan kalah. Perintah untuk tidak mengeluarkan tembakan dari kapal perang kita da cukup mengusir kapal Malaysia cukup bijaksana. Alasan lain, Indonesia dan Malaysia adalah tetangga serumpun yang ada dalam kerangka *the ASEAN Way* dalam penyelesaian aneka sengketa yang ada.

Fase Diplomasi

Alur penyelesaian diplomatik yang telah disepakati sendiri mencakup dua fase. Fase pertama adalah pembicaraan untuk mengeksplorasi dan mengetahui posisi masing-masing negara atas klaimnya di Blok Ambalat. Fase kedua adalah bagaimana kedua negara bisa menyepakati jalan keluar dari klaim tumpang tindih atas Blok Ambalat. Jalan keluar ini ada tiga alternatif. Satu, negara yang bersengketa tidak menyepakati solusi dan membiarkan permasalahan ini tidak terselesaikan (baca: mengambang) dengan catatan negara yang bersengketa menyepakati suatu status quo. Dua, negara yang bersengketa tidak menyepakati batas, tetapi bersepakat untuk melakukan pengelolaan bersama. Tiga, negara yang bersengketa sepakat untuk membawa sengketa mereka ke forum penyelesaian sengketa. Alur penyelesaian diplomatik yang telah disepakati sendiri mencakup dua fase. Fase pertama adalah pembicaraan untuk mengeksplorasi dan mengetahui posisi masing-masing negara atas klaimnya di Blok Ambalat. Fase kedua adalah bagaimana kedua negara bisa menyepakati jalan keluar dari klaim tumpang tindih atas Blok Ambalat.

Jika diplomasi gagal maka krisis bisa kembali terjadi kapan saja. Konfrontasi akan sangat kontra produktif bagi hubungan bilateral, maupun stabilitas regional ASEAN ke depan. Krisis dan konfrontasi juga akan berakibat perluasan spektrum politik luar negeri⁴ tidak lagi semata menjadi pembahasan para elite decision makers tetapi meluas merambah ke wilayah keterlibatan publik. Ini tentu saja

⁴ Sunardi, RM, 2004, *Pembinaan Ketahanan Bangsa*, PT. Kuaternita Adidarma, Jakarta.

positif dalam konteks demokratisasi politik luar negeri agar kebijakan yang diambil accountable terhadap rakyat.

Tetapi sayang, mencermati krisis terdahulu, keterlibatan publik lebih cenderung mengarah kepada ekspresi emosi, kemarahan, sweeping, ajakan berperang, penggalangan relawan dan sebagainya. Padahal eloknya keterlibatan itu lebih terarah kepada pernyataan sikap, artikulasi kepentingan, maupaun aksi yang rasional dan terukur.

Penyelesaian Ambalat membutuhkan tidak hanya tekad dan upaya diplomasi bilateral masih bergulir, provokasi dan pelanggaran teritori tentu berbahaya. Bagi Indonesia, diplomasi juga harus dikawal dengan menunjukkan kewibawaan, kekuatan dan ketegasan. Kaum realis mengatakan, _‘Jika ingin damai bersiaplah untuk berperang(if you want peace, prepare for war).

7 Kesimpulan

Geostrategi adalah suatu strategi dalam memanfaatkan kondisi geografi system dalam menentukan kebijakan, tujuan, dan sarana sebagai upaya untuk mewujudkan cita-cita proklamasi dan tujuan nasional. Secara konseptual, geopolitik Indonesia dituangkan dalam salah satu doktrin nasional yang disebut Wawasan Nusantara dan politik luar negeri bebas aktif. sedangkan geostrategi Indonesia diwujudkan melalui konsep Ketahanan Nasional yang bertumbuh pada perwujudan kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Keadaan geografis Indonesia yang unik, menuntut sebuah konsep geopolitik khusus yang dapat diterapkan dengan baik oleh bangsa Indonesia. Konsep geopolitik tersebut adalah Wawasan Nusantara. Berbeda dengan pemahaman geopolitik negara lain yang cenderung mengarah kepada tujuan ekspansi wilayah, konsep geopolitik Indonesia, atau Wawasan Nusantara, justru bertujuan untuk mempertahankan wilayah. Wawasan Nusantara merupakan sebuah konsep geopolitik yang paling tepat untuk negara Indonesia yang memiliki belasan ribu pulau yang tersebar sepanjang jutaan mil.

DAFTAR PUSTAKA

- Harsawaskita, A. 2007. *“Great Power Politics di Asia Tengah: Suatu Pandangan Geopolitik”*, dalam *Transformasi dalam Studi Hubungan Internasional*. Bandung: Graha Ilmu.
- Hidayat, I.Mardiyono. 1983. *Geopolitik, Teori dan Strategi Politik dalam Hubungannya dengan Manusia, Ruang dan Sumber Daya Alam*. Surabaya: Usaha Nasional.
<http://daniiskandarmanajemen.blogspot.com/2014/11/17/implementasi-wawasan-nusantara.html>
- Kaelan, M.S. dan Zubaidi, Ahmad. 2007. *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*. Yogyakarta : Penerbit Paradigma Yogyakarta.
- Makarim,N.A.2004.Geopolitik. Tersedia:[http://www.kompas.com/kompas cetak utama](http://www.kompas.com/kompas_cetak_utama).
- Sunardi, RM, 2004, *Pembinaan Ketahanan Bangsa*, PT. Kuaternita Adidarma, Jakarta.